

BC

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

STRATEGI HAMAS DALAM KEMENANGAN PEMILU LEGESLATIF PALESTINA 2006

SKRIPSI

Fis HI 09/107
Yuw
S



Disusun Oleh

Ismanto Yuwono
NIM: 070116421

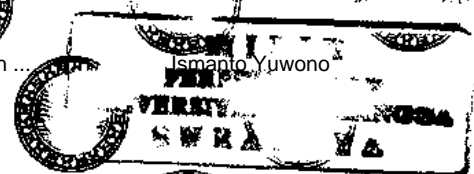
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2006

Skrripsi

Strategi Hamas Dalam Kemenangan

Ismanto Yuwono



LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI HAMAS DALAM KEMENANGAN
PEMILU LEGESLATIF 2006**

Skripsi ini dipertahankan dihadapan dewan penguji pada:

**Hari : Senin
Tanggal : 8 Januari 2007
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB**

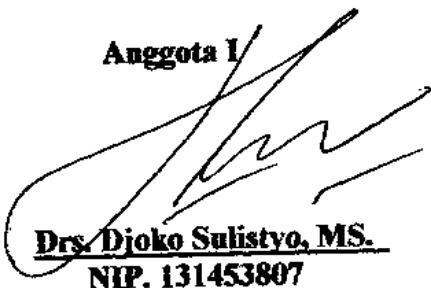
Tim Penguji

Ketua Penguji



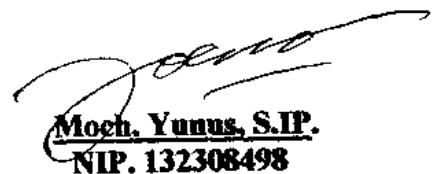
**Drs. L. Basis Susilo, MA.
NIP. 130337977**

Anggota I



**Drs. Djoko Sulisty, MS.
NIP. 131453807**

Anggota II



**Moch. Yunus, S.IP.
NIP. 132308498**

LEMBAR PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan kepada
mereka yang hidup untuk diri dan orang lain*

LEMBAT MOTTO

The logo of Universitas Airlangga is a circular emblem. It features a central blue eagle with its wings spread, perched on a globe. The eagle is surrounded by a yellow border containing the university's name in Indonesian. The text is written in a stylized, calligraphic font.

*Setiap kebuntuan pasti ada jalan...!
Jalan itu adalah kerja keras*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
DAFTAR ISI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kerangka Pemikiran	10
1.4.1 Peringkat Analisis	10
1.4.2 Kerangka Teori	10
1.4.2.1 Enam Tahapan Perkembangan Gerakan Sosial Politik	11
1.4.2.2 Strategi dan Gerakan Sosial politik	14
1.4.2.3 Agama dan Visi politik	16
1.4.2.4 Kampanye dan Tujuan Politik	19
1.4.2.4.1 Efek Kampanye	21
1.4.2.4.2 <i>The Communicative Functions Model</i>	22
1.4.2.4.3 Strategi Persuasi untuk Praktik Kampanye	23
1.4.2.4.4 Saluran Kampanye	25
1.5 Hipotesa	26
1.6 Metodologi	27
1.6.1 Definisi Konseptual	27
1.6.1.1 Strategi	27
1.6.1.2 Gerakan Sosial Politik	28
1.6.1.3 Pemilu	28
1.6.2 Definisi Operasional	28
1.6.2.1 Pemilu	29
1.6.2.2 Gerakan Sosial Politik	29
1.6.2.3 Strategi	29
1.6.3 Tipe Penelitian	30
1.6.4 Jangkauan Penelitian	30
1.6.5 Teknik Mengumpulkan Data	30
1.6.6 Teknik Analisa Data	31
1.6.7 Sistematika Penulisan	31

BAB II : SEJARAH PERJALANAN HAMAS DI PALESTINA (1989- 200)	
2.1 Sejarah Masuknya Ikhwanul Muslimin di Palestina	34
2.2 Faktor-faktor Berkembangnya Ikhwanul Muslimin di Palestina	36
2.3 Upaya Gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir Membangun Basis Gerakan di Palestina	43
2.4 Hamas: Transformasi Ikhwanul Muslimin Palestina sebagai Gerakan Perlawanan terhadap Israel	47
2.5 Hamas dan Intifada	51
2.6 Ideologi Hamas	55
2.7 Struktur Organisasi Hamas	57
2.8 Strategi Hamas Sebagai Organisasi Perlawanan	60
2.9 Hamas dan Politik	64
BAB III : HAMAS dan PEMILU PALESTINA: DARI BOIKOT 1996 SAMPAI PARTISIPASI 2006	
3.1 Pemilu 1996: Aksi Boikot Pemilu Palestina	
3.1.1 Kesepakatan Oslo dan Reaksi Faksi Perlawanan Palestina	69
3.1.2 Pemilu Palestina 1996 dan Sikap Faksi Perlawanan Palestina	74
3.2 Pemilu 2006: Faktor-faktor yang mendorong Hamas terlibat dalam Pemilu Palestina	
3.2.1 Kesuksesan Hizbullah: Menyandingkan Perlawanan dan Perjuangan Politik	75
3.2.2 Menguatnya Tekanan Eksternal dalam Hamas	78
3.2.3 Menguatnya Populeritas Hamas di Mata Rakyat Palestina	81
3.2.4 Kemunduran Faksi Fatah	84
BAB IV : STRATEGI HAMAS DALAM PEMILU LEGESLTIF PALESTINA 2006	
4.1 Aktifitas Kampanye Hamas untuk Menarik Konstituen ...	94
4.1.1 Pemasangan Atribut Partai	95
4.1.2 Kampanye di Media Massa	96
4.1.3 Pawai dan Orasi Terbuka	97
4.1.4 Debat Publik	98
4.1.5 Memanfaatkan Kharisma Tokoh	99
4.2 Taktik Hamas dalam Memenangkan <i>Distric Ballot</i>	102
4.3 Strategic Issues: Hamas Fokus pada Isu Anti Korupsi dan Resistensi	104
4.4 Instrumen Utama Pendulang Suara Hamas	
4.4.1 Kader Perempuan: Ujung Tombak Hamas dalam Pemilu	112

4.4.2 Hamas Manfaatkan Masjid untuk Galang Dukungan	115
4.5 Dukungan Eksternal Fatah: Mempengaruhi Hamas Menangkan Pemilu.....	121
BAB V: PENUTUP	
Kesimpulan	126
Daftar Pustaka	130
Lampiran-lampiran	



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang maha luas cinta kasih-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Yang Maha Bijaksana dalam memperlakukan makhluk-Nya dan Maha Perkasa dalam menguatkan semangat dan tekad makhluk-Nya.

Sungguh telah banyak sekali pelajaran yang dapat penulis petik dari Hamas. Sebagai gerakan yang merepresentasikan kelompok tertindas, dalam bergerak dia cukup elegan. Sampai saat ini, Hamas merupakan satu-satunya gerakan sosial politik yang mampu menyandingkan kemampuan destruktif dan konstruktif. Dalam sela-sela perjuangannya melawan Zionisme Israel, Hamas bekerja keras membangun masyarakatnya.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada

1. Bapak I. Basis Susilo yang telah menjadi dosen wali yang baik.
2. Mbak Irma yang telah dengan sabar membimbing penulisan skripsi ini, meskipun sedang repot-repotnya mengurus si kembar.
3. Kepada seluruh dosen di KP Ilmu hubungan Internasional Pak Joko, Pak Ajar, Ibu Sartika, Ibu Lilik, Ibu Tatik, Mas Joko, Mas Wahyu, Pak Dugis dan Bu Aniq yang telah membimbing dan menularkan ilmunya dengan ikhlas.

Terima kasih yang tak terlewatkan kepada komunitas Jojoran 4 dan Jojoran Perintis yang selalu menyemangati untuk segera menuntaskan skripsi. Kepada kru Litbang Kompas yang berkenan melayani penulis, kepada ustadz Amrozi dari COMES atas datanya, dan kepada semua yang tanpa penulis ketahui selalu berdoa dan berharap segera selesainya skripsi ini.

Kami juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

Mas Yudi (*my beloved brother*) yang selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi. Yeni, Tri, Agus, dan Floresta adik-adiku sayang yang selalu membuat hatiku riang. Buwono yang telah menjadi teman diskusi yang penuh dengan intrik. The Djahyo yang telah membantu dalam pencarian data hingga ke Jakarta. Zuhri yang selalu dengan setia membantu untuk merapikan berbagai berkas skripsi. Yusup, Prapto, Veru, Iqbal, Rizqy, Dibyo, Anwar dan Helmy yang telah menjadi teman bercanda di kala peneliti sedang mengalami kepenatan. Andri atas nasihat-nasihatnya untuk tepat waktu dan selalu bersih-bersih. Agung sang calon Apoteker yang dengan suka rela membiarkan tinta printernya saya gunakan dengan gratis. Mas Angga dan Novri atas buku-buku dan diskusinya yang menarik. Nyta, Ira, Nuning yang telah mendoakan saya agar cepat lulus. Mas Agus atas bantuannya mengedit beberapa bagian skripsi ini. Teman-teman di UKM Kempo yang membantu menjaga kebugaran penulis. Teman-teman di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang menjadi teman menjaga idealisme dan memperjuangkannya. Selain itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada para pembaca atas atensinya terhadap karya yang tidak sempurna ini. Penulis mengharap ada saran dan kritik konstruktif demi semakin sempurnanya karya ini.

Surabaya, 22 Desember 2006

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Akhir Pemilu Legislatif Palestina 2006	2
Tabel 2. Hasil Akhir Pemilu Legislatif Palestina 1996	74
Tabel 3. Trend Dukungan Pemilih terhadap Kontestan Pemilu Legislatif Palestina 2006.....	83
Tabel 4. Distribusi Suara <i>Distric Ballot</i> untuk Distrik Tulkarem.	104
Tabel 5. Distribusi Dukungan sesuai Hasil Survei <i>Office of Research United States</i>	105
Tabel 6. Daftar Dana Kampanye Partai	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Teori Pembelajaran Sosial Bandura	14
Gambar 2. <i>The Communicative Functions Model</i>	23
Gambar 3. Skema Institusi Sosial Utama di Jalur Gaza.	47
Gambar 4. Skema Struktur Organisasi Gerakan HAMAS	58
Gambar 5. Peta Wilayah Tepi Barat dengan Pembagian Area Menurut Kesepakatan Oslo.....	71
Gambar 6. Grafik Derajat Urgensi Isu Politik	107
Gambar 7. Grafik Tingkat Kepercayaan Palestina Terhadap Isu Spesifik	108

ABSTRAK

Hamis menjadi gerakan yang menjadi pusat perhatian dunia Internasional kerana sepak terjangnya di Palestina. Di Barat gerakan ini dikenal sebagai gerakan teroris yang menjadi sponsor *istishadi* (bom bunuh diri). Namun oleh dunia Islam, Hamas dianggap sebagai gerakan heroik melawan penjajahan. Ketika Hamas memutuskan untuk mengikuti Pemilu, dalam lingkup internasional timbul pro-kontra. Pihak Barat khawatir jika Hamas menang, maka proses perundingan damai akan berhenti. Paska pemilu dan Hamas keluar sebagai pemenang mereka menunjukkan reaksi yang keras dengan melakukan boikot.

Kesuksesan Hamas menimbulkan tanda tanya mengenai latar belakang dan strategi Hamas untuk memenangkan Pemilu Legislatif Palestina 2006. Penelitian ini mencoba menjawab tanda tanya tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan *pertama*, apa faktor-faktor yang mendorong Hamas terlibat dalam Pemilu Legislatif Palestina 2006. *Kedua*, Bagaimanakah strategi Hamas dalam memenangkan Pemilu Legislatif Palestina 2006. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian pengujian hipotesis (*testing research*) atau penelitian eksplanatif (*explanatory research*) yang mengamati hubungan kausal berbagai variabel yang menjadi determinan Hamas dalam menentukan strategi kemenangan. Penelitian ini menggunakan unit analisa strategi Hamas dalam memenangkan Pemilu Palestina 2006. Sebagai unit eksplanasinya adalah faktor-faktor determinan yang menjadi pertimbangan Hamas untuk menyusun strategi kemenangan tersebut. Sebagai sumber data, peneliti menggunakan sumber data sekunder.

Hasilnya, strategi Hamas sangat terkait dengan investasi sosial yang telah lama dia tanam di Palestina. Citranya yang bersih dan kadernya yang setia menjadi kunci kemenangannya. Strategi kampanye hanya menjadi alat untuk memobilisasi dukungan dan simpati yang sudah terbentuk cukup lama.

Kata kunci:

Hamis, Palestina, Strategi, Pemilu Legislatif.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu Legislatif Palestina 2006 merupakan rangkaian pesta demokrasi rakyat Palestina. Sebelum pemilu legislatif 2006, Pemerintahan otoritas Palestina telah menggelar dua Pemilu, yakni pemilu presiden dan *municipal Election* (pemilu untuk memilih pemimpin distrik)¹. Pemilu presiden dilaksanakan untuk memilih pengganti Yaser Arafat yang meninggal dunia pada tanggal 11 November 2004. Dalam pemilu presiden tersebut, yang menjadi pemenang adalah kandidat dari Fatah; Mahmoud Abbas yang terkenal dengan nama Abu Mazen. Mahmoud Abbas menang dengan sangat meyakinkan, dengan jumlah perolehan suara mencapai 62.52%, posisi kedua ditempati oleh Mustafa Barghouti, kandidat dari *Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP), dengan perolehan suara yang hanya mencapai 19.48%. Kemenangan meyakinkan tersebut dapat terjadi karena rival utama mereka, Hamas, tidak ambil bagian dalam pemilu ini.

Sedangkan dalam *municipal election*, Fatah keluar sebagai peraih kursi terbanyak dengan memperoleh 53.73%, Hamas 26.3%, *the Popular Front* (PFLP) 5.40% dan *the People's Party* 1.77%.² Meski secara total perolehan suara Hamas jauh tertinggal dari Fatah, namun Hamas menjadi pemenang di Jalur Gaza. Kemenangan Hamas ini wajar, karena Jalur Gaza merupakan pusat gerakannya.

Dalam pemilu Legislatif 2006, Hamas keluar sebagai pemenang,

¹ Pemilu presiden berlangsung pada tanggal 9 januari 2006 dan *municipal election* berlangsung dalam tiga tahap; tahap pertama pada tanggal 23 Desember 2006, tahap kedua pada tanggal 27 januari 2006 dan tahap ketiga berlangsung pada tanggal 29 September 2005.

² <http://www.pogar.org/countries/elections.asp?cid=14>, diakses 2 Mei 2006.

membalikkan prediksi para pengamat politik. Dalam dua pemilu terdahulu (presiden dan *municipal election*) suara Hamas jauh lebih kecil dari Fatah. Bahkan, asumsi tentang kemenangan Fatah semakin kuat dengan beberapa polling yang diambil oleh beberapa pihak yang berbeda, semua polling menempatkan Fatah sebagai kandidat pemenang.³ Komisi Pemilihan Palestina mengumumkan bahwa kelompok militan Hamas meraih 76 kursi (57.56%) dan Fatah memperoleh 43 kursi (32.6%) dari 132 kursi Parlemen dalam pemilihan umum hari Rabu, 2 Februari 2006. Lebih dari 77 % warga palestina yang berhak memilih menggunakan hak pilihnya⁴. Hasil selengkapnya dapat anda lihat dalam diagram berikut.

Tabel 1. Hasil Akhir Pemilu Legislatif Palestina 2006⁵

Rangkuman Hasil Akhir Pemilu Legislatif Palestina 2006			
Aliansi dan Partai	Votes (Proportional)	% (Proportional)	Seats (Proportional/District seats)
		1)	

³ Polling yang dilakukan oleh *The Palestinian Research for Policy and Survei Research* menunjukkan bahwa Fatah sebagai peraih suara terbanyak dengan 42%, diikuti HAMAS yang meraih 35% suara. Polling ini dirancang dengan batas kesalahan 4%. Polling Universitas Birzeit juga menunjukkan tren yang sama, menurut mereka Fatah akan meraih suara sekitar 46.4% (63 kursi) dan HAMAS diposisi kedua dengan perolehan suara 39.5% (58 kursi) (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu>, diakses 5 April 2006).

⁴ <http://voanews.com>, diakses 22 Februari 2006

⁵ Komisi Pemilihan umum Palestina dalam Pemilu Legislatif 2006 menggunakan kombinasi system proposional dan sistem paralel. Separuh dari seluruh jumlah kursi (132 kursi) dipilih dengan sistem paralel dan separuhnya menggunakan sistem proposional. Sistem paralel merupakan pemilihan dengan cara merangking hasil pemungutan suara pada suatu distrik. Yang mendapat suara teratas sesuai dengan jumlah kursi maka dialah yang terpilih, misal dalam distrik itu tersedia dua kursi maka kontestan dua teratas yang mendapat kursi. Komisi Pemilihan Umum Palestina memberikan keistimewaan kepada kaum Kristiani dengan memberi mereka 6 kursi yang kemudian diperebutkan antar kandidat mereka (dua kursi di distrik Jerusalem dan Bethlehem dan masing-masing satu kursi di Distrik Ramallah dan Gaza). Jadi pemilih mencoblos dua kali, satu untuk partai atau gabungan partai peserta pemilu dan yang satunya adalah surat suara senator.

<i>Change and Reform (Hamas)</i>	440,40	44.4	74 (29/45)
	9	5	
<i>Fatah or Liberation Movement of Palestine (Harakat al-Tahrâr al-Filistini)</i>	410,55	41.4	45 (28/17)
	4	3	
<i>Martyr Abu Ali Mustafa (PFLP - Popular Front for the Liberation of Palestine)</i>	42,101	4.25	3 (3/0)
<i>The Alternative (Coalition of Democratic Front for the Liberation of Palestine, Palestinian People's Party, Palestine Democratic Union (FIDA) and Independents) (al-Badeel)</i>	28,973	2.92	2 (2/0)
<i>Independent Palestine (Mustafa Barghouthi and Independents) (Palestinian National Initiative)</i>	26,909	2.72	2 (2/0)
<i>Third Way (Salam Fayyad, Hanan Ashrawi and others)</i>	23,862	2.41	2 (2/0)
<i>Freedom and Sosial Justice (Palestinian Popular Struggle Front)</i>	7,127	0.72	0 (0/0)
<i>Freedom and Independence (Palestinian Arab Liberation Front)</i>	4,398	0.44	0 (0/0)
<i>Martyr Abu Abbas (Palestine Liberation Front)</i>	3,011	0.30	0 (0/0)
<i>National Coalition for Justice and Democracy (Wa'ad) (Eyad El-Sarraj)</i>	1,806	0.18	0 (0/0)
<i>Palestinian Justice (Samir Qadri)</i>	1,723	0.17	0 (0/0)
<i>Independents</i>	-	-	4 (0/4)

Total (turnout: 74.6%)	990,87	100.	132 (66/66)
	3	0%	
Source: Central Election Commission, Preliminary results, Final tally amendments, 2006-01-29, Final results			

Hamas adalah akronim *Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya* (Gerakan Perlawanan Islam). Hamas dalam bahasa Arab berarti semangat dan keberanian. Hamas merupakan gerakan perlawanan yang mulai aktif sejak permulaan *Intifada*⁶ di tahun 1987. Daerah operasi utama Hamas adalah Tebi Barat dan Jalur Gaza. Karena konsistensinya dalam melakukan perlawanan terhadap Israel maka dinyatakan sebagai gerakan terlarang oleh Israel.

Hamas merupakan sayap *Ikhwanul Muslimin* Mesir (*Muslim Brotherhood*) di Palestina. *Ikhwanul Muslimin* mulai membangun basis di Palestina sejak tahun 1946. Cikal bakal Hamas adalah sebuah gerakan sosial yang didirikan pada tahun 1973, dengan nama *Al-Mujama' Al-Islami (Islamic Council)* Gerakan ini dipimpin oleh Syaikh Ahmad Yasin (ketua *Ikhwanul Muslimin* di Gaza), yang kemudian menjadi tokoh spiritual Hamas. Fokus kerja gerakan ini pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan da'wah (sosialisasi pandangan hidup Islam) serta memberi dukungan terhadap berbagai institusi perlawanan di Palestina, universitas dan masjid.⁷

Hamas pada mulanya adalah sebuah organ aksi yang digunakan untuk memobilisasi masa dalam *Intifada* pertama tahun 1987. Organ ini dibentuk oleh

⁶ merupakan gerakan perjuangan semesta rakyat Palestina untuk membebaskan wilayahnya dari okupasi Israel. Perlawanan dilakukan dengan menggunakan senjata tradisional (batu, ketapel, dan bom Molotov). Tujuan gerakan ini adalah berdirinya Negara Palestina yang berdaulat.

⁷ <http://www.fas.org/irp/crs/931014-HAMAS.htm>, diakses 22 Februari 2006.

Abd Al-Aziz al-Rantisi (seorang dosen jurusan kedokteran di Universitas Islam Gaza), bersama dua mahasiswanya (Salah Sahada dan Yahya al-Sinuwwar) yang saat itu menjabat ketua dewan mahasiswa. Ketiga orang tersebut merupakan pengurus *Ikhwanul Muslimin* di Gaza. Baru dua bulan kemudian, Hamas ditetapkan sebagai satu-satunya wadah yang mengendalikan seluruh aktifitas perlawanan (*Intifada*) *Ikhwanul Muslimin* di Palestina. Setelah Intifada pertama, Hamas menjadi institusi yang mewadahi seluruh organisasi *Ikhwanul Muslimin*, termasuk organisasi yang bersifat sosial. Pada tahun 1992, Hamas membangun sayap militer yang terkenal dengan nama *Izz ad-Din al-Qassam Brigades*, paska *Intifada* pertama, untuk mengenang Sheikh Izz ad-Din al-Qassam, tokoh perlawanan modern Arab yang dibunuh oleh Inggris pada tahun 1935. Sayap militer ini di bangun untuk menyatukan beberapa faksi militer yang berada dibawah kendali Hamas dan sebagai penggantinya yang mengalami perluasan fungsi dari organ perlawanan menjadi ormas.

Meski dikenal sebagai gerakan fundamentalis Islam, Hamas sangat toleran. Hal ini dibuktikan di antara 76 anggota legislatifnya ada seorang yang non-muslim. Dialah Hosam al-Taweel, warga kristen Palestina yang terpilih dari distrik Gaza. Al-Taweel mengabdikan sebagai aktivis gerakan internasional *Young Men & resque Christian Association* (YMCA) selama 30 tahun di Gaza. Pada mulanya, banyak yang meragukan al-Taweel didukung massa Hamas yang dicitrakan sebagai militan Islam yang radikal. Tapi, ternyata kolunnis harian Palestina, Al-Quds (nama lain Jerusalem) ini merebut satu kursi dari jatah enam

kursi untuk minoritas Kristen di Palestina.⁸

Kemenangan Hamas yang cukup mengejutkan tersebut mengundang reaksi yang beragam. Reaksi yang bernada negatif datang dari Barat (Amerika Serikat, Uni Eropa, Canada serta Australia) dan Israel. Reaksi negatif tersebut merupakan konsekuensi logis dari stereotip mereka terhadap Hamas. Dalam pandangan mereka Hamas adalah sebuah gerakan teroris yang berbahaya, yang menjadi batu rintangan serius dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Memang, sejak *Intifada* pertama 1987 Hamas dikenal konsisten dalam melakukan perlawanan bersenjata terhadap Israel dan sampai saat ini dia tidak mau mengakui eksistensi atau kedaulatan negara Israel. Washington menyatakan tidak akan menerima masuknya Hamas ke pemerintah Palestina. Presiden George Walker Bush menyatakan, Amerika tidak bersedia berurusan dengan Hamas sebelum kelompok itu menyatakan tidak menyerang Israel⁹. Hampir senada dengan Amerika Serikat, juru bicara Perdana Menteri Inggris Tony Blair menyatakan, pemerintah Inggris siap berhubungan dengan Hamas setelah kelompok itu mencabut dukungannya kepada kelompok teroris.¹⁰

Perdana Menteri Prancis Dominique de Villepin juga mengaku prihatin dengan hasil pemilihan di Palestina. Keprihatinan tersebut tidak lepas dari kemenangan Hamas yang mengejutkan. Karena, yang diharapkan barat untuk

⁸ http://search.jawapos.com/index.php?act=detail_s&f_search=%20kampanye%20Hamas&id=209464, diakses 2 Mei 2006.

⁹ <http://www.tempointeraktif.com/hg/tuarnegeri/2006/01/26/brk.20060126-73019.id.html>, diakses 12 April 2006

¹⁰ *ibid*

menang adalah kelompok Fatah yang dianggap moderat dan memiliki inisiatif untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan cara damai.¹¹

Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi bahkan terang-terangan menyebutkan bahwa kemenangan Hamas membawa negosiasi damai di Timur Tengah mundur. Silvio Berlusconi mengatakan bahwa kemenangan Hamas adalah hal yang sangat buruk bagi prospek perdamaian Timur Tengah.¹² Sejak Intifada sampai saat ini, Hamas selalu menjadi oposan terhadap segala perjanjian damai Palestina-Israel. Dalam persepsi Hamas dan faksi radikal lainnya, perjanjian damai bukanlah jalan penyelesaian akhir dari konflik Palestina- Israel. Terlebih lagi perjanjian damai tidak menyentuh isu-isu utama yang menjadi target utama perjuangan mereka, misalnya masalah pemulangan pengungsi (*resettlement*), status kota Yerusalem dan kedaulatan Palestina yang seutuhnya.

Keluarnya Hamas sebagai pemenang ditanggapi sangat serius oleh Israel. Organisasi perlawanan yang selama ini selalu di garda depan dalam perlawanan terhadap Israel, telah berubah statusnya. Dari gerakan ekstraparlementer menjadi penguasa baru Palestina. Perdana Menteri sementara Israel, Ehud Olmert langsung mengadakan pertemuan mendadak dengan para pejabat militer, pejabat keamanan, dan para pembantu terdekatnya untuk membahas kemenangan Hamas. Dalam pernyataan tertulis Olmert, Israel tidak bisa menerima keberadaan Hamas dalam Otoritas Palestina. Menurutnya Hamas adalah organisasi teroris yang ingin menghancurkan Israel dan oleh sebab itu, maka senjata Hamas harus dilucuti.¹³

Bagi AS, rezim Zionis, dan sekutu-sekutunya, kemenangan Hamas telah

¹¹ ibid

¹² ibid

¹³ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/04/ln/2558990.htm>, diakses 12 April 2006

mengubah peta politik di kawasan Timur-Tengah. Berbeda dengan pemerintahan otonomi yang terbentuk sebelumnya (dibawah kendali Fatah), pemerintahan otonomi bentukan Hamas akan memiliki garis perjuangan yang tegas, yaitu tidak akan mengakui keberadaan Rezim Zionis, dan tidak akan menyerah pada proses perundingan artifisial sebagaimana yang selama ini telah dilakukan antara Israel-Palestina. Para pemimpin Hamas memiliki satu tujuan pasti, yaitu membentuk pemerintahan Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.¹⁴

Melihat nilai strategis Hamas dalam penentuan jalan damai Timur-Tengah, maka diperlukan gambaran yang lengkap tentang gerakan tersebut, agar setiap analis atau praktisi dalam usaha pembentukan jalan damai tidak salah jalan. Statusnya sebagai gerakan teroris membuat kita bertanya-tanya, mengapa gerakan tersebut mendapat simpati begitu besar dari rakyat Palestina dalam pemilu lalu. Meski sedang berdiri ditengah badai akibat embargo ekonomi Barat, mereka tetap teguh memegang prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang gerakan tersebut. Sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas tentang gerakan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang mendorong Hamas terlibat dalam Pemilu

¹⁴ <http://indonesian.irib.ir/POLITIK/2006/januari06/HAMAS.htm>, diakses 12 April 2006

Legislatif Palestina 2006?

2. Bagaimanakah strategi Hamas dalam memenangkan Pemilu Legislatif Palestina 2006?

1.3 Tujuan Penelitian

Hamas adalah sebuah gerakan yang fenomenal. Di mata Barat, Hamas dianggap sebagai gerakan yang bersifat radikal, *destruktif*, dan anti demokrasi. Sehingga cap sebagai kelompok teroris mereka sematkan pada gerakan tersebut. Namun mata rakyat Palestina, Hamas dianggap sebagai pahlawan yang konsisten berjuang untuk membawa Palestina keluar dari penjajahan Israel. Meski di mata Dunia Hamas dianggap sebagai gerakan perlawanan, gerakan ini ternyata memiliki sejarah panjang dalam membangun basis sosial atau berkhidmat dalam kegiatan yang bersifat pelayanan sosial. Dampak riil dari usaha mereka adalah semakin meluasnya dukungan dari rakyat . Kuatnya dukungan rakyat telah membawa Hamas keluar sebagai pemenang dalam pemilu legislatif 2006.

Dengan latar seperti itu, penelitian ini ditujukan untuk mengungkap berbagai kiprah Hamas selama ini sehingga dia mampu untuk mendulang simpati rakyat Palestina, dan atas dasar simpati tersebut kemudian Hamas dapat memenangkan pemilu Legislatif Palestina 2006. Penelitian ini juga menjelaskan situasi dan kondisi yang mendorong Hamas ikut dalam Pemilu, serta untuk memberikan gambaran tentang strategi yang telah diambil Hamas dalam kampanye untuk memobilisir rakyat agar tertarik untuk memilih.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Peringkat Analisis

Patric Morgan mengusulkan lima tingkat analisis. Yaitu individu, kelompok individu, Negara-Bangsa, Kelompok Negara Bangsa, dan sistem internasional.¹⁵ Untuk menajamkan analisis mengenai pembahasan tema yang telah dipilih maka digunakan peringkat analisis yang relevan. Penelitian ini menggunakan peringkat analisis kelompok individu, yakni Hamas.

Dalam proses memilih tingkat analisis, peneliti menetapkan unit analisis, yaitu yang perilakunya hendak dideskripsikan (variabel dependen) dan unit eksplanasi, yaitu yang dampaknya terhadap unit analisis hendak kita amati (variabel independen)¹⁶. Penelitian ini menggunakan unit analisis strategi Hamas Hamas dalam kemenangan Pemilu Palestina 2006 . Dan sebagai unit eksplanasinya adalah faktor-faktor determinan yang menjadi pertimbangan Hamas Hamas untuk menyusun strategi kemenangan tersebut.

1.4.2 Kerangka Teori

Kerangka teori kami susun sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini. Kerangka teori yang pertama membahas mengenai tahapan perkembangan gerakan sosial. Dengan berpedoman teori tersebut kita dapat menganalisa alur sejarah perkembangan Hamas. Selanjutnya kami ulas teori yang membahas mengenai dinamika hubungan strategi dengan gerakan sosial politik. Dengannya kita dapat melihat bahwa strategi gerakan sosial politik selalu kontekstual,

¹⁵ Patric Morgan, *Theories and Approaches to International Politics*, dalam Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.40, edisi revisi.

¹⁶ *ibid.* hlm 35.

mengikuti perubahan situasi dan kondisi. Karena Hamas adalah gerakan religius maka kami menuliskan teori yang membahas mengenai hubungan agama dan visi politik gerakan sosial politik. Akhirnya kami membahas teori yang terkait dengan kampanye politik. Dengannya kita dapat membuat sebuah analisis terkait strategi kampanye Hamas untuk memenangkan Pemilu Legislatif Palestina.

1.4.2.1 Enam Tahapan Perkembangan Gerakan Sosial Politik

Menurut Neil J. Smelser semua gersospol pada dasarnya berkembang melalui enam tahapan.¹⁷ Gersosol biasanya berawal dari gejala dan format sistem sosio-ekonomi dan kultur masyarakatnya. Karena itu, semua gersospol tidak ada yang berkembang dalam vakum nilai. Mereka selalu bergerak dengan membawa nilai-nilai tertentu. Enam tahapan Gersospol tersebut antara lain:

1. *Structural conduciveness.*

Gersospol pada dasarnya sangat bergantung pada sistem sosio-ekonomi dan budaya masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari multi etnis dan dalam sistem sosialnya terjadi ketimpangan dan kesenjangan atau diskomunikasi antar etnis maka akan muncul pula gersospol yang bercorak etnis. *Structural conduciveness* mewujud ketika dalam suatu masyarakat sistem sosio-ekonomi dan kulturalnya tidak mengarah ke *general agreement* tentang persoalan yang terjadi, dalam masyarakat itu tidak ada lembaga dan norma yang bisa melakukan asimilisasi dari perbedaan antar komponen dalam sistem sosial.

2. *Structural strains*

Jika dalam masyarakat telah berkembang kondisi sosial yang mengarah ke

¹⁷ Neil J. Smelser dikutip Aribowo, Sejarah, Pola, dan Format Gerakan Mahasiswa Indonesia: Studi tentang Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta (Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1996) hlm. 17-19.

disparitas, ketimpangan, tidak ada asimilasi antar etnis, tidak ada komunikasi antar kelompok, maka secara gradual akan berkembang keadaan *structural strain*. Secara gradual dalam masyarakat akan berkembang keadaan ketegangan struktural karena dalam masyarakat itu tumbuh ambiguitas, ambivalensi, kontroversial, dan berbagai *disparitas* lainnya. Keadaan ambiguitas dan konflik sosial yang laten ini merupakan tanda-tanda masyarakat tersebut berada dalam keadaan ketegangan struktural. Pada tahap ini, masyarakat semakin gelisah akan berbagai persoalan ketimpangan dalam diri mereka sendiri. Masyarakat mulai mengalami *deprivasi relatif*. Mereka yang mengalami *deprivasi relatif* itu secara gradual akan masuk ke keadaan *anomie* (anarki).

3. *Spread of a generalized belief*

Dalam masyarakat yang telah terjadi *structural strain* bisa berkembang ke arah *spread of generalized belief* (SGB). Keadaan SGB merupakan keadaan dimana masyarakat tersebut mulai mengidentifikasi dan mencarai sumber-sumber terjadinya *ambiguitas*, kontroversial, dan ketegangan struktural dalam masyarakat. Mereka berusaha mencari prima kausa persoalan *disparitas* dan ketimpangan dalam masyarakat. Dalam tahapan ini dalam masyarakat mulai muncul rumor-rumor, joke-joke, dan selebaran-selebaran tentang keadaan masyarakat yang semakin mengalami kegelisahan.

4. *Precipitating factors*

Ketika masyarakat telah sampai pada tahapan ke-3 maka dalam masyarakat itu bagai api dalam sekam. Masyarakat itu telah sampai pada puncak kegelisahan dan kefrustasian tentang apa yang telah terjadi dalam diri sistem itu. Mereka telah

menemukan prima-kausa dari akar persoalan sosial yang ada dan ambiguitas itu semakin tampak dan jelas. Keadaan sosial bagi orang sakit bisul yang telah besar dan matang. Jika ada kasus sosial yang muncul, yang berkait dengan substansi ketegangan sosial yang ada, maka kasus itu dengan segera menjadi faktor pemicu suatu gersospol untuk muncul ke permukaan. Faktor pemicu itulah yang di sebut sebagai *precipitating factors*.

5. *Mobilization of participations for action*

Begitu terjadi faktor pemicu maka dengan cepat gersopol tumbuh dan meluas ditengah masyarakat. Masyarakat mulai berpartisipasi dalam gerakan. Dalam tahapan ini peran pemimpin sangat besar. Mereka menjadi kekuatan penting untuk memobilisir massa. Gersopol dalam tahap ini telah jadi dan mulai memantapkan posisinya agar bisa *estabilsh*.

6. *Operation of sosial control*

Kontrol sosial merupakan faktor-faktor pembanding yang mencegah, menginterupsi, membelokkan atau menghalangi faktor-faktor yang menimbulkan gerakan. Dengan menekan kemunculan gerakan baru, maka upaya pencapaian tujuan dapat berjalan dengan baik, karena tidak ada oposisi yang mengganggu

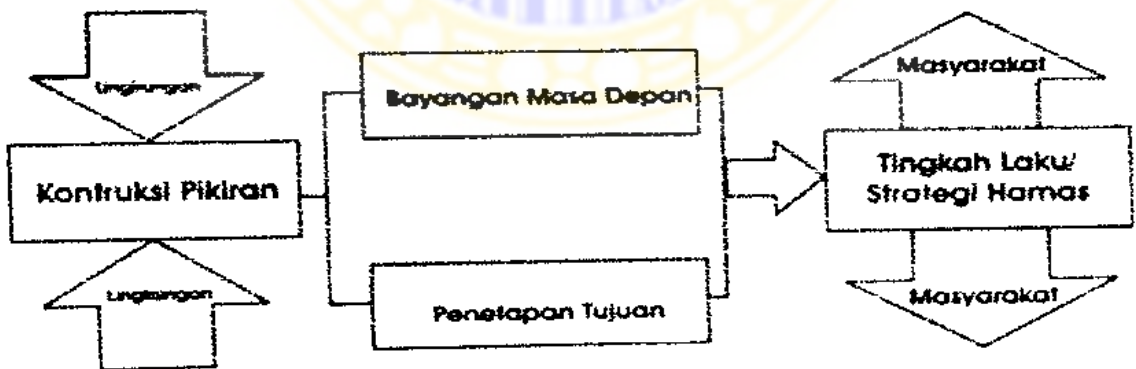
Mark N. Hagopian menyebut empat tahapan pertama sebagai masa inkubasi, dimana gerakan mulai tumbuh, membesar dan akhirnya siap untuk beroperasi. Tahap ke-5 adalah periode aksi dan tahap ke-6 merupakan periode institusionalisasi.¹⁸

¹⁸ M. Hagopian, *Regimes, Movement, and Ideologies*, dikutip Aribowo, Sejarah, Pola, dan Format Gerakan Mahasiswa Indonesia: Studi tentang Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta (Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1996) hlm. 20.

1.4.2.2 Strategi dan Gerakan Sosial Politik

Agar perjuangan dapat berjalan teratur dan terukur, maka setiap organisasi modern menyusun strategi yang nantinya menjadi arahan kerja organisasi. Strategi bersifat dinamis, dalam arti dia selalu adaptif dengan perubahan kondisi. Sun Tzu, seorang ahli strategi perang Cina kuno, telah menetapkan jalan kemenangan dalam sebuah pepatah; ” mengetahui musuh anda, mengetahui diri anda, kemenangan adalah niscaya. Mengetahui Bumi, mengetahui Surga, kemenangan anda menjadi lengkap”.¹⁹ Bumi dimaknai sebagai kondisi dinamis sosial politik dan Surga dimaknai sebagai kultur atau budaya yang menjadi latar dimana strategi dilancarkan. Untuk lebih jelas mengenai sifat dinamis strategi lihat diagram berikut.

Gambar 1. Skema Teori Pembelajaran Sosial Bandura



Sumber: Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004) hlm. 12.

Bila kita menelaah gambar satu, maka kita dapat melihat bagaimana

¹⁹ Angelica Low, *Penerapan The Art of War Sun Tzu dalam Strategi Politik*, (Jakarta: Inovasi, 2003) hlm. 45, terj.

konstruksi berpikir selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam diagram itu, konstruksi berpikir dibangun diatas dua pilar, yaitu bayangan masa depan dan penetapan tujuan. Dua pilar tersebut memiliki sifat yang jauh berbeda yang pertama bersifat ideal dan yang kedua bersifat pragmatis. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tindakan manusia diarahkan pada tujuan ideal, namun karena adanya faktor lingkungan yang menjadi penghambat, maka manusia dipaksa untuk melakukan tindakan yang realistis untuk dijalankan.

Untuk menganalisis strategi gerakan sosial politik, kita dapat menggunakan tiga faktor, yaitu: a) Faktor-faktor yang memberikan peluang dan hambatan terhadap kemajuan gerakan; b) bentuk organisasi (informal atau pun formal) yang menjadi instrumen untuk mobilisasi dukungan, menyebarkan informasi dan memupuk identitas kolektif; c) proses interpertasi kolektif, atribusi, dan konstruksi sosial yang menjadi mediasi antara *opportunity* dan aksi. Tiga faktor tersebut, dalam kajian gerakan sosial politik disebut secara berurutan sebagai *political opportunities*, *mobilizing structures*, dan *framing processes*²⁰. Makna *framing process* sebagai mediasi adalah menempatkan *political opportunities* sebagai faktor determinan dalam isi atau bentuk frame dan structure sebagai sarana untuk menyebarluaskan frame di tengah masyarakat.

Political opportunities memiliki beberapa dimensi utama. Pertama, terbukanya akses untuk berpartisipasi bagi aktor baru. Kedua, adanya tanda perubahan kecenderungan afiliasi politik masyarakat. Ketiga, kemunculan aliansi yang sangat berpengaruh. Keempat, perpecahan di kalangan elit politik, dan

²⁰ Doug Mc Adam, dkk. ed., *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings* (New York: Cambridge University Press, 1999) hlm 2-6.

terakhir penurunan kekuatan atau kapasitas Negara untuk mengatasi perpecahan. Selain faktor domestik *opportunity* dapat muncul akibat adanya perubahan dalam sistem internasional.²¹

Berdasarkan konsep psikologi, *framing* dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh alokasi sumber kognitif individu lebih besar. Konsekuensinya, elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting mempengaruhi penilaian individu dalam penarikan kesimpulan.²² Menurut Entmant, *framing* memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. *Frames*, menurutnya, menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda²³ Sumber atau agen *framing* adalah organisasi sosial politik, aktivis, media masa yang berinteraksi dengan kelompok kepentingan atau para ahli.²⁴

1.4.2.3 Agama dan Visi Politik

Bagi aktivis yang memperjuangkan tata-sosial baru (*The new socio-political order*) di masa depan atau untuk mengembalikan surga yang hilang,

²¹ Ibid. hlm. 10

²² Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 164.

²³ Endmant dikutip Hotman Siahaan dalam Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 164.

²⁴ Anthony Oberscall, *Opportunities and framing ini the Eastern European Revolt of 1989* dalam Doug Mc Adam, dkk. ed, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings* (New York: Cambridge University Press, 1999) hlm. 99.

religious vision mengilhami para aktifis untuk mengubah dunia²⁵. Visi Keagamaan menggambarkan adanya perbedaan diametral antara *the present evil world* dan masyarakat yang berkomitmen kepada *the highest spiritual ideas*.

Dalam prespektif historis, nilai agama memainkan posisi yang penting dalam gerakan sosial politik²⁶:

1. mempresentasikan sebuah kekuatan budaya atau modal simbolik yang mengartikulasikan *the ultimate purposes*, makna transidental, dan ethical ideals. Dalam komunitas religius ada pemahaman bersama tentang tujuan akhir perjuangan untuk mengubah *the present evil world* ke dalam bentuk yang lebih ideal. Agama memberi penjelasan tentang tujuan hidup, alasan tentang penderitaan, dan petunjuk khusus tentang tindakan moral. Dalam komunitas tersebut mereka tidak hanya bertukar wacana tentang agama semata, namun mereka juga mendiskusikan wacana politik, misalnya isu mengenai keadilan, kebajikan, kesetaraan, dan kemerdekaan.

2. nilai agama menjustifikasi rezim yang pernah atau sedang menjalankan kekuasaan politik. Gerakan sosial politik yang menggunakan agama sebagai modal simbolik jamak terjadi pada saat ini. *The World Council of Churches* membuat program untuk melawan rasisme dan eksploitasi ekonomi. Katolik dan *Evangelical Protestant* yang "pro life" menolak kebijakan aborsi dan menyamakan aborsi dengan pembunuhan. Hamas secara tegas menyatakan dirinya sebagai gerakan yang menyandarkan dirinya pada agama Islam. Mereka memandang Israel sebagai kaum terkutuk sesuai dengan ajaram Islam. Mereka

²⁵ Charles F. Adrain dan David E. Apter, *Political Protest and Sosial Change: Analyzing Politics* (New York: New York University Perss, 1995) hlm.59

²⁶ *ibid.* hlm 60-66.

juga memperjuangkan agar Palestina kembali diatur sesuai dengan *ethical ideals* atau kehidupan yang Islami.

3. institusi agama memiliki kemampuan untuk mengubah nilai-nilai etik menjadi kebijakan Negara yang spesifik. Misalnya kebijakan mengenai perkawinan.

4. nilai agama membentuk sikap yang adaptif. Terkait dengan perubahan sosial dan oportunitas yang berguna untuk merealisasikan perubahan masyarakat. Kepercayaan agama yang dianut oleh kaum revolusioner mempengaruhi pandangan mereka tentang dunia yang ideal yang menjadi tujuan perjuangan.

Dalam konteks internasional, masyarakat muslim saat ini berda posisi yang tidak menguntungkan (periperi). Menjadi pihak yang kalah diberbagai sektor kehidupan dengan Barat, dalam sektor ekonomi maupun nilai oleh Barat yang sekuler.. Padahal dalam sejarah, dunia Islam pada abad pertengahan menjadi sinar dunia atau pusat peradaban di negeri sendiri. Kondisi ini menjadi triger kemunculan gerakan Islam yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam (*The Islamic Revivalist Movement*). Gerakan tersebut muncul diberbagai negeri muslim, misalnya *Muslim Brotherhood* di Mesir dan Yordania, *The Tunissian Renaissance Party*, *The Algerian Islamic Salvation Front*, *Lebanese Hezbollah*, dan *The Palestinian Hamas*. Motor gerakan adalah kaum urban menengah-profesional: semisal guru, ilmuwan, insinyur, fisikawan, guru agama, dan pengacara. Gerakan sosial politik tersebut menolak pemerintah yang sekuler, meskipun mereka terlibat secara profesional dalam pemerintahan melalui

berbagai profesi yang ada. Mereka menekankan kolektifitas, individu memiliki arti jika mereka mengikuti panduan moral kehidupan sehari-hari dalam konteks komunal- *The Umma (Islamic Community)*. Meski dimotori oleh kaum menengah, mereka memiliki hubungan baik dengan massa bawah yang menjadi obyek pencerahan sekaligus membebaskan mereka dari kekangan politik, ekonomi dan budaya Barat, serta dari pemimpin yang pro-Barat ²⁷.

1.4.2.4 Kampanye dan Tujuan politik (*Political Goal*)

Definisi mengenai konsep kampanye yang paling terkenal adalah definisi Rogers dan Storey (1987)²⁸. Mereka mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.” Merujuk pada definisi tersebut maka setidaknya setiap aktifitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) sejumlah khalayak sasaran yang besar (3) biasanya dipusatkan pada kurun waktu tertentu dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Disamping empat ciri diatas. Venus menambahkan ciri lain, yaitu sumber yang jelas (*campaign makers*), yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus bertanggung jawab atas sebuah produk kampanye.²⁹ Kejelasan sumber dan pertanggungjawaban inilah yang membedakan kampanye

²⁷ Ibid. hlm. 85-88.

²⁸ Dalam C.R. Berger & S. H. Chaffee (Eds.), *Handbook of Communication Science* dikutip Antar Venus, *Manajemen Kampanye, Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004) hlm. 7

²⁹ Ibid. hlm 7

dengan kegiatan propaganda yang identik dengan kegiatan yang bersifat terselubung dan ilegal.

Keterbukaan ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Sebagian kampanye bahkan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum (*public interest*). Karena substansi kampanye adalah *public interest*, maka tidak diperlukan kegiatan yang bersifat memaksa dalam mempengaruhi publik. Segala tindakan kampanye pada prinsipnya dilandasi oleh persuasi yakni mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dalam ungkapan Perloff (1993) dikatakan "*campaigns generally exemplify persuasion in action*"³⁰

Charles U. Larson (1992) membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori yakni: *product-oriented campaigns*, *candidate-oriented campaigns*, dan *ideologically or cause oriented campaigns*. Kampanye yang berorientasi produk pada umumnya terjadi dilingkungan bisnis. Motivasi yang mendasari adalah memperoleh keuntungan finansial. *Candidate-oriented campaigns* umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai *political campaign*. Tujuannya antara lain untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum. *Ideologically campaigns*, oleh Kotler disebut

³⁰ Perloff, Richard M, *The Dynamics of Persuasion*, dalam *ibid.* hlm 7
Skripsi

sebagai *social change campaigns*, memiliki tujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.³¹

1.4.2.4 .1 Efek Kampanye

Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*). Ostegaard (2002) menyebut ketiga aspek tersebut dengan istilah '3A' sebagai kependekan dari *awareness*, *attitude* dan *action*. Ketiga aspek tersebut merupakan sasaran pengaruh (*target of influences*) yang mesti dicapai secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta.³² Pada tahap pertama kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran (*awareness*), perubahan keyakinan, atau meningkatnya pengetahuan khalayak tentang isu tertentu. Tahap selanjutnya adalah perubahan dalam ranah sikap. Sasarannya adalah untuk menimbulkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye. Sementara pada tahap terakhir diarahkan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye untuk bertindak sesuai dengan pesan persuasif yang telah disampaikan. Misalnya, pemilih dalam pemilu mencoblos kontestan tertentu yang sesuai dengan preferensi yang telah ia miliki.

³¹ *ibid.* hlm. 11

³² *ibid.* hlm. 10

1.4.2.4.2 *The Communicative Functions Model*

Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut.³³ Jadi model bukanlah fenomena itu sendiri. Model adalah gambaran tentang fenomena atau realitas yang telah disederhanakan. Model hanya mengambil aspek dan ciri-ciri realitas yang dianggap umum, sehingga dia tidak dapat menggambarkan fenomena secara sempurna. Namun dia sangat berguna untuk menuntun kita memahami proses berlangsungnya suatu hal.

Judith Trent dan Robert Frienden Berg, praktisi dan pengamat politik Amerika Serikat, mengembangkan sebuah model kampanye yang dikonstruksi dari lingkungan politik. Model tersebut mereka publikasi melalui bukunya yang berjudul *Political Campaign Communication*.

Model ini memusatkan analisisnya pada tahapan kegiatan kampanye. Langkah-langkahnya dimulai dari *surfacing*, *primary*, *nomination*, dan *election*.³⁴ Kegiatan dalam tahap *surfacing* (pemunculan) lebih banyak berkaitan dengan membangun landasan tahap berikutnya seperti: memetakan daerah-daerah yang dijadikan tempat kampanye, membangun kontak dengan tokoh-tokoh setempat, mengorganisasi dana, dan sebagainya. Pada tahap ini khalayak telah melakukan evaluasi awal terhadap citta kandidat secara umum.

Tahap berikutnya dalam model ini adalah *primary*. Pada tahap ini kita berusaha memfokuskan perhatian khalayak pada kandidat, gagasan, atau produk

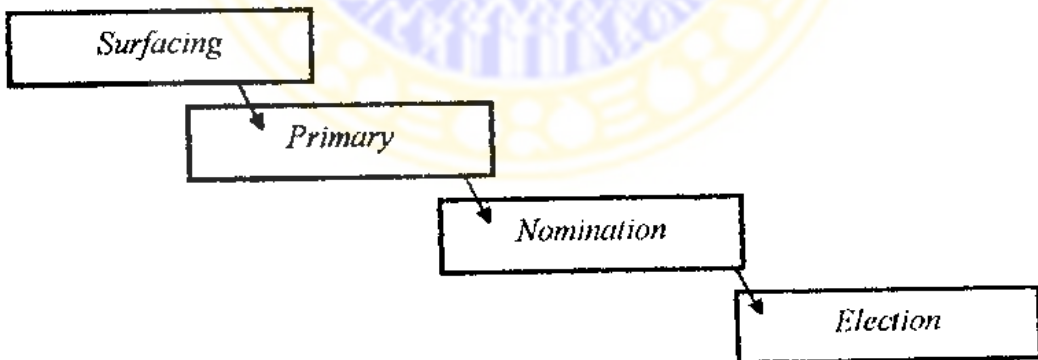
³³ Mulyana, Deddy. (2000). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* dalam *ibid.* hlm 12

³⁴ *ibid.* hlm 21

yang telah kita munculkan di tengah persaingan. Pada tahap ini kita sudah melibatkan khalayak untuk terlibat dalam kampanye. Untuk menarik perhatian massa, kandidat melakukan usaha persuasif, misalnya menghamburkan janji-janji politik yang terkait dengan kepentingan publik. Begitu perhatian publik telah tercurah pada kandidat, mendapat liputan media secara luas, atau gagasannya menjadi topik pembicaraan anggota masyarakat, maka tahap *nomination* pun dimulai.

Terakhir adalah tahap pemilihan. Pada tahap ini biasanya massa kampanye telah berakhir. Namun secara terselubung para kandidat masih melakukan kampanye. Untuk negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, pada tahap ini ada fenomena 'serangan fajar' yakni tindakan menyuap pemilih dengan sejumlah uang untuk memilih partai atau kandidat tertentu.

Gambar.2 *The Comunicative Functions Model*



Sumber: Antar Venus, *Manajemen Kampanye, Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004) hlm. 22

1.4.2.4.3 Startegi Persusi untuk Praktik Kampanye

Perloff (1993)³⁵ menyarankan menyarankan beberapa strategi persuasi yang dapat digunakan dalam praktik kampanye yakni:

- a. Pilih komunikator yang terpercaya. Diperlukan komunikator yang terpercaya untuk menyampaikan pesan. Semua bukti di dunia menunjukkan bahwa pesan yang dirancang dan disampaikan dengan sempurna tidak akan mendapat membawa perubahan perilaku jika khalayak tidak mempercayai komunikator.³⁶ Karena alasan ini maka kredibilitas pembawa pesan harus diperhatikan.
- b. Kemaslah pesan sesuai keyakinan khalayak. Pesan akan dapat mempunyai pengaruh yang besar untuk mengubah perilaku khalayak, jika dikemas sesuai dengan kepercayaan yang ada pada diri khalayak.³⁷ Nilai yang menjadi preferensi khalayak menentukan pilihan sikapnya.
- c. Munculkan kekuatan diri khalayak. Salah satu hal yang dapat merubah perilaku secara permanen pada diri khalayak adalah meyakinkan mereka secara personal mampu melakukan perubahan. Khalayak harus disadarkan bahwa mereka adalah bagian terpenting dari perubahan.
- d. Ajak khalayak untuk berpikir. Sebuah pesan dapat membawa perubahan perilaku jika dapat menumbuhkan pemikiran positif pada diri khalayak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyajikan data statistik, hasil penelitian, atau memberikan argumen yang rasional.
- e. Gunakan strategi pelibatan. Melibatkan khalayak sasaran kampanye dapat menarik anggota masyarakat yang lain terlibat dan memberikan dukungan.

³⁵ op. cit. Perloff dalam ibid hlm. 43-47.

³⁶ Larson, Charles U. 1992, *Persuasion; Reception and Responsibility*, dalam ibid hlm. 44

³⁷ Fishbein dan Ajzen dikutip perloff dalam ibid hlm.44

Apalagi, pelibatan ini dapat menarik anggota masyarakat yang menjadi tokoh panutan dilingkungannya.

- f. Gunakan strategi pembangunan inkonsistensi. Berdasarkan teori disonansi kognitif³⁸ munculkan sebuah pesan yang dapat memuncukkan disonansi (inkonsistensi) dengan apa yang selama ini mereka percayai. Ketidakcocokan ini akhirnya akan membawa khalayak untuk mencari kondisi yang seimbang. Kondisi yang sesuai dengan anjuran kampanye.
- g. Bangun resistensi khalayak dengan berita negatif. Strategi ini berguna untuk membuat khalayak mempunyai kekebalan terhadap suatu tindakan yang ingin dicegah atau dihambat oleh tindakan kampanye tersebut. Resistensi khalayak dapat dibentuk dengan mengekspos pesan kampanye negatif dengan menambahkan argumen yang mematahkan kampanye tersebut.

1.4.2.4.4 Saluran Kampanye

Katrin Voltmer dan Andre Rommele, pakar kampanye dari Jerman, menegaskan bahwa *the media are the central actors in public communication campaigns*.³⁹ Secara umum Schramm (1973) mengartikan saluran kampanye sebagai perantara apapun yang memungkinkan pesan-pesan samapai kepada

³⁸ teori yang diungkapkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 ini mengemukakan bahwa keyakinan seseorang dapat berubah pada saat mereka berada pada situasi konflik. Ini dapat terjadi karena pada dasarnya manusia didorong untuk oleh keinginan untuk selalu berada dalam suatu keadaan psikologis yang seimbang (konsonan). Baca Antar Venus, *Manajemen Kampanye, Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004) hlm. 36-37.

³⁹ *Ibid.* hlm. 83

penerima.⁴⁰ Bentuknya dapat berupa kertas untuk menulis pesan, telepon, internet, radio, atau bahkan televisi dan komunikasi antarpribadi. Salah satu contoh komunikasi antarpribadi adalah penggunaan pemuka masyarakat untuk menyampaikan pesan kampanye secara langsung kepada masyarakat.

Dalam kampanye komunikasi, media massa cenderung dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi utama. Karena media massa memiliki kemampuan untuk melipatgandakan kecepatan penyebaran informasi dan mempersuasi khalayak.⁴¹ Menurut teori *agenda setting*, media massa memiliki kemampuan untuk mengarahkan perhatian khalayak pada isu-isu tertentu yang diagendakan media tersebut. Asumsi yang mendasari teori *agenda setting* adalah media masa tidak dapat mempengaruhi khalayak untuk mengubah sikap (afektif), namun media massa dapat mempengaruhi khalayak tentang apa yang ada dipikiran mereka (kognitif).⁴² Artinya, media massa mempengaruhi masyarakat mengenai apa yang dianggap penting. Misalnya dalam kurun waktu tertentu media massa memberitakan salah satu kandidat, maka kandidat itu harus diperhitungkan dan dianggap penting.

1.5 Hipotesa

Dengan pertimbangan latar belakang dan kerangka teori maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Keterlibatan Hamas dalam pemilu Legislatif 2006 ditentukan oleh *Political Opportunity Structure* yang antara lain berbentuk perubahan preferensi

⁴⁰ Ibid. hlm. 84

⁴¹ Ibid. hlm. 84

⁴² Ibid. hlm. 94

masyarakat Palestina dan melemahnya kekuatan dan pengaruh rival utama mereka, Fatah, di tengah masyarakat Palestina. Perubahan sikap masyarakat ini disebabkan oleh harapan masyarakat Palestina yang tinggi, yang menginginkan terbentuknya pemerintahan baru yang mampu merubah kondisi kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Melemahnya kekuatan dan pengaruh Fatah tidak lepas dari perpecahan internal dan kegagalan pemerintah Palestina untuk memenuhi harapan masyarakat Palestina untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menghimpit mereka.

Strategi Hamas dalam pemenangan Pemilu Legislatif 2006 ditentukan pula oleh *Political Opportunity Structure* yang ada di Palestina. Faktor lain yang menjadi pertimbangan Hamas dalam penyusunan strategi adalah kekuatan sumberdaya internal dan kekuatan rival.

1. 6 Metodologi

1.6.1 Definisi konseptual

Definisi konseptual yang berguna adalah definisi yang memiliki tiga sifat. Pertama, definisi dapat menggambarkan ciri-ciri atau kualitas khas dari fenomena yang di definisikan. Kedua definisi tidak sirkular, dan terakhir definisi harus dinyatakan dalam istilah yang jelas dan tidak memiliki lebih dari satu arti

1.6.1.1 Strategi

Dalam kamus bahasa Inggris, strategi memiliki dua arti. Pertama, *an elaborate and systematic plan of action*. Kedua, *a plan of action resulting from strategy or intended to accomplish a specific goal*⁴³. Jadi perencanaan rinci dan

⁴³ www.thefreedictionary.com/strategy. diakses, 2 mei 2006.

sistematis dari tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik . Dalam salah satu kamus lama, konsep ini didefinisikan sebagai: "ilmu atau keahlian untuk memperkuat militer dalam peperangan dan untuk menentukan sasaran perang. Dalam politik internasional strategi mempunyai arti rencana operasionalisasi yang telah dijalankan oleh pemerintah, baik sipil maupun militer, dalam usahanya mencapai tujuan obyektif terhadap bangsa lain."⁴⁴

1.6.1.2 Gerakan Sosial Politik

Bulmer mendefinisikan gerakan sosial politik sebagai usaha kolektif yang memiliki tujuan untuk mendirikan tata sosial baru; memiliki tujuan jangka panjang untuk merubah kondisi sosial. ⁴⁵Della Porta dan Diani, mendefinisikan secara lebih lengkap, gerakan sosial sebagai jaringan interaksi informal atau pun formal yang didasari oleh nilai kolektif dan solidaritas, terkait dengan usaha kolektif yang terfokus pada konflik, termasuk menggunakan demonstrasi untuk mencapai tujuannya. ⁴⁶

1.6.1.3 Pemilu

Pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakilnya.⁴⁷

1.6.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah serangkaian prosedur yang mendiskripsikan kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mengetahui eksistensi empiris sebuah

⁴⁴ Frans Bona Sihombing, *Ilmu Politik Internasional: Teori, Konsep dan Sistem* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1986) hlm 92-93, cet ke-2.

⁴⁵ Bulmer dalam Marjorie Mayo, *Global Citizens: Sosial Movements and the Chalange of Globalization* (Toronto: Canadian Scholars' Press Inc) hlm. 54-.

⁴⁶ Ibid. hlm. 55.

⁴⁷ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006) hlm 4.

konsep. Definisi operasional juga berarti menjabarkan prosedur pengujian yang memberikan kriteria bagi penerapan konsep secara empiris⁴⁸.

1.6.2.1 Pemilu

Pemilu adalah rangkaian proses yang dimulai dari pendaftaran calon peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, masa kampanye, hari pencoblosan, penghitungan suara dan kemudian diakhiri dengan penetapan hasil atau pemenang Pemilu..

1.6.2.2 Gerakan Sosial Politik

Gerakan sosial politik adalah gerakan yang memiliki struktur yang kokoh (*estabilsh*). Dengan struktur tersebut dia mampu untuk menjalankan program yang telah ia tetapkan. Struktur gerakan tersebut mewakili organisasi dalam setiap interaksinya dengan masyarakat atau kelompok lainnya. Struktur bersifat hierarkis, sehingga kesatuan komando dapat terjaga. Oleh karena itu, setiap gerakan sosial politik yang mapan, dia memiliki jajaran pengurus yang memiliki jabatan sesuai dengan alur kaderisasi yang telah dia jalani. Untuk menjaga kelangsungan organisasi dia memiliki sistem kaderisasi yang jelas. Pola rekrutmen yang mereka lakukan bersifat personal atau melalui pelatihan formal yang telah digariskan organisasi. Untuk menegaskan jati dirinya ditengah masyarakat atau pun organisasi sosial politik lainnya, dia memiliki beberap simbol; misalnya lambang , bendera, dan mars organisasi.

1.6.2.3 Strategi

Strategi adalah serangkaian langkah kerja sistematis dan terencana yang

⁴⁸ Op. cit. hlm. 100.

disusun oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi disusun dengan mempertimbangkan analisis yang terkait dengan kekuatan internal, peluang, ancaman rival, dan kelemahan internal organisasi. Strategi biasanya merupakan hasil dari sebuah rapat kerja suatu organisasi.

1.6.3 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipilih untuk menganalisis adalah tipe penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Kemudian menarik permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau variabel tertentu.⁴⁹

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian difokuskan pada tahun 1987-2006, periode dimana gerakan ini lahir sampai ikut berkompetisi dalam pemilu Legislatif 2006. Meski tidak menutup kemungkinan untuk menarik fokus penelitian kebelakang jika ada data yang relevan. Pemilihan ini didasari oleh asumsi peneliti bahwa strategi Hamas dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2006 tidak lepas dari pengaruh dinamika organisasi sejak dia dilahirkan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang kami pakai adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan data-data sekunder yang bersumber dari beberapa literatur seperti buku, laporan resmi institusi, majalah koran, jurnal, dan sebagainya.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2001) hlm. 48

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis Domain. Teknik ini digunakan untuk menganalisis gambaran obyek penelitian secara umum, namun relatif utuh tentang obyek penelitian itu. Peneliti memulai menganalisis dengan memilih pola hubungan semantik tertentu. Kemudian dilakukan pemilahan data sehingga terlihat kesamaan tertentu yang dikelompokkan dalam jenis tertentu. Dari hasil pemilahan data tersebut, dicari konsep induk dari suatu domain yang sesuai dengan hubungan-hubungan semantik.⁵⁰ Hubungan semantik yang kami gunakan untuk menganalisis adalah rasional atau alasan, sebab-akibat, dan cara ke tujuan (*means-end*)

1.6.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian

BAB II Sejarah Perjalanan Hamas di Palestina (1989-2000)

Mendeskripsikan perjalanan sejarah perjuangan Hamas, dari masa penyemaian gerakan (inkubasi) sampai ketika gerakan memiliki struktur yang kokoh. Kita akan melihat bagaimana gerakan ini tumbuh dan berkembang dalam seting waktu yang berbeda dan proses transformasi apa saja yang dialami oleh gerakan ini.

BAB III Hamas dan Pemilu Palestina: Dari Boikot 1996 sampai Partisipasi 2006.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 85-88.

Dalam bab ini dijelaskan faktor-faktor yang mendorong Hamas memilih untuk melakukan boikot terhadap pemilu 1996. Dan faktor-faktor yang memaksa Hamas untuk merubah sikap dalam pemilu legislatif 2006. Pada pemilu periode tersebut Hamas ambil bagian dan keluar sebagai peraih kursi terbesar.

BAB IV Strategi Hamas dalam Pemilu Legislatif Palestina 2006

Dalam bab ini kami menyuguhkan analisis mengenai strategi yang telah diimplementasikan oleh Hamas, sehingga dapat meraih suara terbanyak. Kami akan menjelaskan instrumen dan framing isu yang dipakai Hamas untuk menarik dukungan.

BAB V Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini disimpulkan hasil penelitian dan pelajaran yang bisa kita ambil dari penelitian ini

BAB II

SEJARAH PERJALANAN HAMAS DI PALESTINA (1989-2000)

Pada bab II ini kami akan mengulas dalam kerangka historis perjalanan Hamas, dari masa penyemaian benih gerakan sampai gerakan ini eksis di tengah masyarakat Palestina. Penjelasan lengkap alur perkembangan Hamas akan memberikan gambaran mengenai dinamika yang telah dialami olehnya. Karena suatu gerakan sosial tidak bisa lepas dari masa lalu. Setiap langkah yang diambil di masa kini dan rencana untuk melangkah di masa depan selalu disusun dengan pertimbangan pengalaman kerja yang sudah dilakukan oleh organisasi. Dengan bercermin pada masa lalu, maka gerakan akan dapat melakukan inovasi dan koreksi terhadap kegagalan programnya.

Terkait dengan tema skripsi yang mencoba membedah strategi Hamas dalam pemenangan pemilu legislatif 2006, dimensi sejarah berguna untuk melihat alur perkembangan gerakan ini dan gambaran tentang interaksi gerakan ini dengan rakyat Palestina. Kedekatan dengan rakyat menjadi faktor utama penentu kemenangan dalam Pemilu. Karena kedekatan akan menumbuhkan indentifikasi atau afiliasi rakyat terhadap partai tertentu. Sehingga dalam komunikasi politik muncul slogan yang mengatakan bahwa *work better than words*, yang artinya kampanye politik itu dampaknya lebih kecil dari pada aksi riil yang telah dikontribusikan untuk masyarakat sebelumnya. Jadi kita perlu untuk melihat kebelakang, sebelum pemilu legislatif Palestina, agar kita mengetahui sejauh mana kedekatan Hamas dengan rakyat Palestina.

Pembahasan dimulai dengan mengulas secara singkat sejarah berdirinya Ikhwanul Muslimin Palestina, karena gerakan tersebut merupakan induk Hamas. Setelah itu, kami menjelaskan secara kronologis masuknya gerakan Ikhwanul Muslimin di Palestina, disertai konteks sejarah yang melingkupinya. Selanjutnya, didiskripsikan bagaimana Ikhwanul Muslimin di Palestina bertransformasi menjadi Hamas. Setelah itu, dibahas kiprah gerakan Hamas di Palestina.

2.1 Sejarah Masuknya Ikhwanul Muslimin di Palestina

Hamas merupakan transformasi Ikhwanul Muslimin Palestina. Oleh karena itu, secara ideologis dan organisatoris Hamas masih terkait dengan Ikhwanul Muslimin Mesir yang menjadi induk gerakan Ikhwanul Muslimin. Menurut Jensen, cabang Ikhwanul Muslimin Mesir sudah ada di Palestina sejak tahun 1946. Menurutnya, gerakan ini mulai terkenal sejak kekalahan Arab pada perang Arab-Israel pada tahun 1967.⁵¹ Pada pertengahan tahun 1940-an, Ikhwanul Muslimin di Mesir mengirim sejumlah pengikutnya ke Palestina untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya dan mendirikan cabang gerakan tersebut. Sejak akhir tahun 1946, beberapa cabang Ikhwanul Muslimin telah didirikan di sejumlah kota, termasuk di Yerusalem, Nablus, Tulkarem, Haifa, dan Jaffa. Pada tahun 1949, cabang lain didirikan di Hebron, dan sejak pertengahan 1950-an, cabang-cabang didirikan di kota-kota Tepi Barat⁵²

⁵¹ Michael Irving Jensen, *Islamism and Civil Society in the Gaza Strip*, in Ahmad S. Mousalli, *Islamic Fundamentalism: Myths and Realities*, (South Street Reading, UK: Ithaca Press, 1998) hlm. 198

⁵² Emile F. Saliyeh, *Tepi Barat dan Jalur Gaza*, dalam Shireen T. Hunter ed., *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2001) terjemah. hlm. 148.

Pada masa inkubasi ini, mereka bergerak dalam fase pembentukan pondasi gerakan. Pada masa ini, fokus yang dilakukan adalah merekrut anggota dan membentuk basis dukungan di tengah masyarakat. Perekrutan dilakukan dengan berdakwah⁵³. Oleh karena itu, pada fase ini gerakan berjalan dalam suasana damai atau non-konfrontatif. Sehingga ancaman eksternal, dari Israel dan organisasi lainnya, dapat dihindari. Sehingga seluruh sumberdaya gerakan dapat diarahkan untuk memperkokoh dan meluaskan pengaruh organisasi. Periode ini berlangsung sampai pada tahun 1970-an.

Pada akhir tahun 1970, Ikhwanul Muslimin mulai untuk membangun intitusi atau lembaga sosial.⁵⁴ Selain berdakwah, aktifitas lainnya adalah membangun institusi-institusi sosial yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen dan sentra gerakan. Melalui sentra gerakan, maka akan memudahkan untuk membentuk basis dukungan dan perekrutan anggota baru. Institusi sosial yang mereka bangun mengambil bentuk yang beraneka-ragam, mencoba untuk meraih segala segmentasi masyarakat. Emile Saliyeh mencatat:

⁵³ Makna dakwah tersirat dalam Qs. An-Nahf:125: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk .. Hikmah di atas bermakna perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil dan dapat dimaknai sebagai proses. Dalam arti, jika berdakwah kita harus menggunakan strategi sesuai dengan konteks wilayah dakwah. Dakwah bersifat persuasive, karena dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa Islam melarang pemaksaan. Tidak ada pemaksaan untuk memasuki agamas Islam (Qs. Al-Baqarah:256).*

Menurut Musthafa Mashyur, pemimpin Ikhwanul Muslimin ke-4, tujuan dakwah adalah tegaknya agama Islam di bumi dengan berdirinya pemerintahan Islam (Daulah Islamiyah 'Alamiyah) yang dipimpin oleh sistem Khilafah Islamiyah. Karena visi besar yang dimilikinya, kerja dakwah harus sistematis. Musthafa Mashyur merumuskan tiga tahapan (*marhalah*) dakwah:

1. Tahap pencetakan (*ta'rif*) atau tahap propaganda. Menyiarkan Islam keseluruh khalayak masyarakat.
2. Tahap pembinaan dan pembentukan (*ta'win*). Membina orang-orang yang tertarik atau terekrut oleh kegiatan syiar Islam.
3. Tahap beramal (*taf'idz*). Kader siap beramal untuk mencapai tujuan.

⁵⁴ Michael Irving Jensen, *Islamism and Civil Society in the Gaza Strip*, in Ahmad S. Mousalli, *Islamic Fundamentalism: Myths and Realities*, (South Street Reading, UK: Ithaca Press, 1998) hlm. 199.

Sejumlah aktifis Ikhwanul Muslimin di Jalur Gaza dan Tepi Barat menggunakan masjid sebagai pusat gerakan. Jaringan pelayanan sosial yang luas dibangun oleh Ikhwanul Muslimin di Jalur Gaza dan Tepi Barat untuk mencapai agenda politik mereka, seperti sekolah agama, klub olahraga, organisasi kepemudaan, klinik, panti asuhan, dan lembaga zakat didirikan. Pembentukan *Islamic Centre*, Universitas Islam Gaza, dan beberapa perguruan tinggi Islam lainnya. Institusi tersebut menjadi instrumen untuk merekrut anggota Baru dan melakukan doktrinasi nilai-nilai Islam⁵⁵

2.2 Faktor-faktor berkembangnya Ikhwanul Muslimin di Palestina

Menguatnya sentimen keagamaan yang pada ujungnya meningkatkan popularitas atau sebagai pemicu kemunculan gerakan yang berbasis pada ikatan agama merupakan fenomena global. Pengaruh semangat kebangkitan ini terjadi di Barat dan di Timur, termasuk Palestina. Kebangkitan atau Revivalisme agama terjadi diseluruh dunia pada dekade 1970-an. Kepel melihat adanya proses pembalikan paradigma, pada tahun dekade 1960-an orang berpikir untuk melakukan modernisasi (sekularisasi) agama, di awal tahun 1970-an yang terjadi adalah pembalikan paradigma, mengagamakan moderisme.⁵⁶ Mengagamakan modernisme sama artinya dengan menghalalkan agama untuk ikut campur dalam ranah publik. Meskipun Revivalisme agama muncul dalam peradaban-peradaban yang berbeda baik dalam akar kulturalnya maupun dalam tingkat pekungannya, semuanya menyatakan dirinya sebagai solusi krisis dalam

⁵⁵ Jensen dalam Mousalli ed. Op. cit. Hlm 199.

⁵⁶ Gilles Kepel, *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-agama Samawi di Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1977) terjemah. hlm. 10.

masyarakat, dan mengklaim telah menemukan sebab-sebab dan solusi krisis di luar gejala ekonomi, politik, dan kultural.

Kekecewaan terhadap sekularisme berkembang di Barat dibarengi oleh rasa khawatir, kemajuan sains dan teknologi akan lepas dari kontrol manusia dan menolak statusnya sebagai sebuah ciptaan Tuhan⁵⁷. Buntut arogansi akal yang mengabaikan Tuhan dan tidak tunduk pada siapapun kecuali dirinya sendiri adalah sebab lahirnya Nazi dan totalitarisme Stalin.⁵⁸

Dalam konteks dunia Arab atau Timur Tengah, muncul tiga bentuk nasionalisme pribumi yang bersifat sekuler; Pan-Turanisme⁵⁹ yang berawal dari gerakan Turki Muda, Pan-Iran di bawah Shah Reza yang didasarkan pada masa lalu bangsa Aria pra-Islam dan dalam sekup lebih luas, Pan-Arabisme⁶⁰ yang dipimpin oleh Naser. Pan-Arabisme ini mengalami kehancuran akibat kematian Naser, kekalahan Arab pada perang Arab-Israel Juni 1967 dan mundurnya bangsa Arab dari Pan-Arabisme.⁶¹

Faktor lain yang menjadi sebab memudarnya ideologi tersebut ada yang bersifat kultural dan historis. Konsep nasionalisme sekuler merupakan konsep

⁵⁷ Gilles Kepel, Op. cit. hlm. 82.

⁵⁸ Jean Marie Lustinger, *Le Choix de Dieu*, dalam Gilles Kepel, *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-agama Samawi di Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1977) terjemah. Hlm. 83.

⁵⁹ Paham nasionalisme khas turki yang ingin dibangun dengan ikatan primordial masa lalu bangsa turki. Gerakan ini juga menginginkan agar Turki diatur dengan sistem sekuler.

⁶⁰ Ide tentang pan-nasionalisme menyatakan bahwa negara-bangsa termasuk atau bahkan digolongkan dalam persatuan atas dasar etnik, agama, geografi, atau segi-segi umum yang lain. Visi Pan-Arabisme adalah peningkatan kerjasama di antara negara-negara Arab yang pada akhirnya akan menghilangkan batasan yang ditetapkan penguasa kolonial, sehingga terciptalah sebuah persatuan yang baru dan lebih kuat. Gerakan ini memiliki sebuah organisasi, Liga Arab dan sebuah tujuan untuk untuk menghancurkan Israel dan mengembalikan tanah air Palestina. Liga Arab didirikan tahun 1945 dan mewajibkan anggotanya untuk memiliki kebijakan luar negeri yang sama dan menyelesaikan perselisihan mereka melalui Liga. Baca lan Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*. (Yogyakarta: Qalam, 2004) terjemah. hlm. 136-143.

⁶¹ R. Hrair Dekmejian, *Kebangkitan Islam: Katalisator, Kategori dan Konsekuensi*, dalam Shireen T. Hunter ed., *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2001) terjemah. Hlm.9-10.

yang asing bagi tradisi kebudayaan Arab dan Islam⁶²; konsep itu dipinjam dari Barat oleh kelompok kecil yang kebanyakan adalah intelektual Kristen.⁶³ Dalam konsep Islam nasionalisme tidak sekedar dimaknai sebagai etintas wilayah, Nasionalisme Islam didasari oleh semangat keagamaan yang berbeda dengan Barat yang diwarnai oleh semangat sekularisme. Sekularisasi yang melekat dalam model barat tidak lepas dari latar historisnya. Nasionalisme di Eropa muncul sebagai reaksi atas dominasi Vatikan (Katolik Roma). Berbeda dengan pandangan Islam, dalam pandangan Islam tidak ada pemisaham antara agama dan negara. Oleh karena itu, golongan Islam puritan (taat) mendukung kerajaan Utsmani yang merupakan representasi eksistensi pemerintahan Islam. Paska kehancuran kerajaan Ustmani mereka mengimpikan untuk membangun imperium baru yang serupa.

Krisis yang berlarut-larut dalam masyarakat Islam (akibat kegagalan sistem sekuler) telah menyebabkan dikedepankannya alternatif Islam⁶⁴. Akibatnya muncul gerakan revivalisme Islam yang menjadi alternatif solusi kemandekan atau kegagalan dari berbagai idiologi non-agama (sekuler). Gerakan revivalisme Islam kontemporer memiliki kerangka Ideologi yang khas yang menekankan pada aspek⁶⁵ :

1. *Din wa Al-Dawlah*. Islam adalah sistem kehidupan yang total dan sempurna. Tidak ada pemisahan antara agama dan negara.

⁶² Dalam konsep Islam nasionalisme tidak sekedar dimaknai sebagai etintas wilayah, Nasionalisme Islam didasari oleh semangat keagamaan yang berbeda dengan Barat yang diwarnai oleh semangat sekularisme. Sekularisasi yang melekat dalam model barat tidak lepas dari latar historisnya. Nasionalisme di Eropa muncul sebagai reaksi atas dominasi Vatikan (Katolik Roma). Berbeda dengan Islam, Golongan Islam Revivalis mendukung kerajaan Utsmani dan persatuan Islam.

⁶³ Saliyeh dalam Hunter ed. Op. cit. 159.

⁶⁴ Dekmejian dalam Hunter ed. Op. cit. 13.

⁶⁵ Ibid. 14-16.

2. **Al-Quran dan Al-Sunnah.** Umat Islam diperintah untuk kembali pada akar atau fondasi Islam. Dalam Islam, fondasi adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah (Hadist Nabi Muhammad) dan tauladan dari para sahabatnya.
3. **Puritanisme dan keadilan sosial.** Nilai-nilai dan budaya Barat ditolak karena tidak sesuai dengan Islam. Menolak sistem ekonomi ribawi. Dan meminta masyarakat Islam agar tidak terjerumus pada situasi ketergantungan pada negara maju. Percaya bahwa Zakat yang disertai kebijakan negara akan memajukan keadilan sosial dan akan memperbaiki kesejahteraan kelas.
4. **Kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan Syari'ah.** Tujuan pokok umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka Bumi.
5. **Jihad.** Upaya jihad tidak untuk bertahan (ekspansif); tujuan jihad adalah menaklukkan semua halangan yang mungkin akan menghambat penyiaran Islam ke seluruh dunia.

Dalam konteks Palestina, ketidakpercayaan terhadap vitalitas Pan-Arabisme dan ideologi sejenisnya juga merebak. Hal ini ditandai oleh pesatnya perkembangan gerakan yang membawa Islam sebagai Ideologi. Jensen melihat ada sejumlah faktor lain yang menjadi penyebab tumbuh suburnya gerakan Islam pada dekade 1970-an di Palestina :⁶⁶

1. Kegagalan gerakan nasionalis Palestina untuk memenuhi impian rakyat Palestina; mewujudkan negara.
2. Dukungan atau bantuan tidak langsung dari pemerintah Israel. Dengan

⁶⁶ Jensen dalam Mousalli ed. Op. cit. 203-204.

membantu gerakan Islam moderat Israel berharap dapat melemahkan kekuatan politik PLO⁶⁷. Pada tahun tersebut, kelompok Islam tidak dipandang sebagai ancaman, karena arah perjuangannya tidak konfrontatif.⁶⁸

3. Bantuan dari pemerintah Jordania yang memiliki misi yang sama dengan Israel. Pada awal tahun 1970, pemerintah Yordania dan PLO telah terlibat perebutan kekuasaan di wilayah Pendudukan Palestina.
4. Dukungan finansial dari negara teluk yang mengalami *oil boom* sejak tahun 1973.
5. Maraknya aktivitas gerakan Islam di negara tetangga Palestina, seperti di Mesir dan Syiria. Kemarahan gerakan ini akibat kekalahan Arab pada perang Arab-Israel 1967.
6. Kesuksesan perjuangan Hizbullah di Libanon yang berhasil memaksa Israel untuk menarik pasukannya dari sebagian besar pendudukannya di Libanon. Kesuksesan tersebut menguatkan kepercayaan warga Rakyat

⁶⁷ PLO (*Palestine Liberation Organization*) atau *Munazhhamah Al-Tahrir Al-Filisthuniyyah* adalah gabungan dari beberapa faksi perjuangan Palestina. Organisasi ini didirikan pada tahun 1964 melalui Mukhtamar Umum Rakyat Palestina tanggal 28 Mei – 2 Juni 1964 di Al-Quds (Yerusalem). Tujuan akhir gerakan ini adalah kedaulatan rakyat Palestina. Faksi-faksi yang tergabung dalam PLO antara lain:

1. Faksi Fatah pimpinan Yaser Arafat yang berhaluan nasionalis.
2. *The Popular Front for the Liberation of Palestine* (PFLP); terbesar kedua setelah Fatah, berhaluan komunis dan bersifat militan radikal.
3. *The Democratic Front for the Liberation of Palestine* (DFLP); terbesar ketiga, berhaluan komunis.
4. *The Palestine People's Party* (PPP); moderat, berhaluan komunis.
5. *The Palestine Liberation Front* (PLF); faksi sayap kiri kecil.
6. *The Arab Liberation Front* (ALF); faksi kecil dibawah control partai Ba'ts Irak, berhaluan sosialis.
7. Al-Sa'iqa; faksi kecil yang dikontrol partai Ba'ts Syiria.
8. *The Palestine Democratic Union* (Fida); faksi kecil sayap kiri tidak militan.
9. *The Palestinian Popular Struggle Front* (PPSF); faksi kecil sayap kiri.

⁶⁸ HAMAS atau Ikhwanul Muslimin sebelum Intifada meletus merupakan gerakan moderat. Gerakan ini memfokuskan dirinya pada da'wah dan pelayanan sosial. Sehingga masyarakat Palestina pada mulanya enggan untuk bergabung pada gerakan ini, karena mereka lebih memilih gerakan yang bersifat radikal (anti-Israel). Lihat Jean-Francois Legrain, *HAMAS: Legitimate Heir of Palestinian Nationalism?*, in John L. Esposito ed., *Radical Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?* (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1997) hlm. 163.

Palestina bahwa Islam dapat membebaskan mereka dari okupasi Israel.

7. Semangat revolusi Islam di Iran pada tahun 1978-1979. Revolusi tersebut telah menjadi bukti paling otentik bahwa pembentukan negara Islam bukanlah impian semu belaka.

Saliyeh memberikan analisis yang hampir sama dengan Jensen. Menurut Saliyeh ada lima faktor yang memberikan peluang gerakan Islam sebagai gerakan alternatif berkembang pesat di Palestina.⁶⁹ Pertama, inisiatif-inisiatif Arab, Palestina dan dunia Internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak membuahkan hasil. Perpecahan di dunia Arab, juga keretakan di jajaran PLO menyusul perang Libanon, telah meningkatkan frustrasi dikalangan orang Palestina. Sebagian meyakini bahwa baik nasionalisme Arab atau Palestina, demikian pula pendekatan-pendekatan Barat, Sovyet dan pendekatan internasional lainnya terhadap persoalan Palestina, tidak tepat untuk menyelesaikan tugas itu. Dalam pandangan rakyat Palestina hanya Islam, dan penafsiran seputar perselisihan Arab-Israel dari perspektif Islamlah, yang dapat memberikan solusi terhadap persoalan Palestina.

Kedua, revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 merupakan pendorong dan momentum bagi tumbuhnya kecenderungan Islami di wilayah pendudukan Palestina. Kecenderungan itu dipertebal oleh keberhasilan perlawanan sayap militer Islam, Hizbullah, di Libanon Selatan terhadap tentara Israel. Kesuksesan Hizbullah memperkuat keyakinan banyak orang Palestina bahwa Islam mampu mengakhiri pendudukan Israel

⁶⁹ Saliyeh dalam Hunter *ed. Op. cit.* 151-152.

Ketiga, gerakan Islam di Tepi Barat dan Jalur Gaza juga merupakan respon atas kebangkitan Partai Likud di Israel dengan argumen-argumen keagamaannya untuk membenarkan kontrol yang permanen atas wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Serangan-serangan yang kerap dilakukan oleh kalangan ekstrimis Yahudi terhadap tempat-tempat suci umat Islam di Yerusalem dan Hebron memperkuat sentimen-sentimen ini. Sentimen keagamaan semakin tinggi akibat berkobarnya perang Israel-PLO pada tahun 1982 yang meluas di wilayah Palestina dan Libanon. Pada perang tersebut, Israel dibantu Amerika Serikat. Puncak dari perang tersebut adalah pembunuhan besar-besaran pengungsi Palestina yang tinggal di camp-camp pengungsian Libanon, peristiwa itu terkenal dengan tragedi Sabra dan Shatila. Perang tersebut telah dipandang sebagai suatu konspirasi Kristen –Yahudi melawan Islam.⁷⁰

Keempat, meningkatnya pengaruh komunis dan kelompok marxis lainnya, memaksa kelompok Islam untuk menyatukan barisan. Pada era itu, kelompok komunis lokal telah menguasai gerakan-gerakan pemuda, serikat buruh, dan organisasi masa lainnya. Contoh Aliansi adalah kerjasama kelompok mahasiswa Islam dalam pemilihan dewan Mahasiswa antara tahun 1979 dan 1981 di Universitas Ber Zeit maupun Universitas al-Najah.

Terakhir, sikap Israel yang cukup toleran terhadap gerakan Islam. Tumbuhnya gerakan Islam diharapkan dapat melemahkan perlawanan PLO yang memiliki orientasi sekuler. Israel melihat bahwa gerakan Islam bergerak dalam wilayah non-konfrontatif. Pada waktu itu, gerakan Islam berfokus pada

⁷⁰ Disarikan dari berbagai majalah gerakan Islam di Tepi Barat, antara lain *al-Noor al-Ilahi*, *Al-Tali'a al-Islamiyya*, *Al-Sahwah*, *Al-Muntalag*, dan *Al-Nida'* dikutip dari ibid hlm. 152

pemberdayaan rakyat Palestina. Selain dukungan pemerintah Israel, ada dukungan juga dari Yordania. Pemerintah Yordania dengan terang-terangan membiayai Departemen Urusan Waqaf Islam di Yerusalem, yang bertanggung jawab atas sejumlah masjid, para imam di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta untuk menyuplai perguruan tinggi Islam salah satunya Universitas Islam Gaza. Maksud dibalik bantuan tersebut adalah untuk menjaga pengaruh Yordania di Palestina.

2.3 Upaya Gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir Membangun Basis Gerakan di Palestina

Pembangunan basis Ikhwanul Muslimin di Palestina dilakukan secara bertahap. Pada awalnya, upaya perluasan pengaruh Ikhwanul Muslimin di Palestina dilakukan melalui kegiatan syiar Islam yang dilakukan secara individual. Setelah memiliki kader yang terekrut oleh dakwah individual tersebut, maka gerakan dakwah baru dapat melakukan gerakan kolektif. Di Palestina, sudah wajar, bila mahasiswa perguruan tinggi Islam mengunjungi desa-desa tetangga atau berkutbah selama shalat Jum'at tentang kembali pada Islam dan kejayaan Islam di masa pertama. Kejayaan Islam di masa pertama merujuk pada Zaman Nabi Muhammad dan Khilafah. Khilafah adalah shahabat nabi yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam, setelah beliau wafat, dalam urusan pemerintahan maupun agama.⁷¹

Selanjutnya, Ikhwanul Muslimin menyaring orang-orang yang tertarik terhadap seruanya untuk dijadikan kader. Filterisasi dilakukan dengan cara

⁷¹ *Ibid.* hlm. 154.

melihat antusiasme obyek dakwah. Selanjutnya mereka dibina melalui serangkaian alur kaderisasi yang panjang. Sehingga, pada akhirnya menjadi corong-corong baru gerakan.⁷² Kaderisasi pesonal tersebut dilakukan karena Ikhwanul Muslimin mempercayai bahwa reformasi individu merupakan prasyarat bagi reformasi sosial.⁷³

Dalam proses kaderisasi Ikhwanul Muslimin menggunakan sistem tahapan. Seorang anggota muda Ikhwanul Muslimin diajari doktrin politik dengan legalisasi ayat-ayat al-Qur'an dan pemikiran tokoh-tokoh intelektual Islam seperti Hasan Al Banna, Sayyid Qutub, dan Abul Alla Al Maududi.⁷⁴ Bila dia mau menerima maka dia direkrut menjadi anggota penuh. Dalam tahap terakhir rekomendasi rapat pimpinan akan menempatkan mereka dalam posisi sesuai dengan keahlian mereka. Setelah penempatan, mereka masih dilatih agar memiliki keahlian lebih, contohnya bagi mereka yang di tempatkan di bagian perss diberi pelatihan jurnalistik⁷⁵.

Setelah Ikhwanul Muslimin merasa cukup mantap -memiliki sumber daya yang cukup- untuk melakukan interaksi lebih lanjut dengan masyarakat; memberikan kontribusi positif secara langsung terhadap perbaikan kondisi masyarakat yang masih berada pada level yang memprihatinkan. Sekaligus untuk memperluas segmentasi dakwahnya. Ikhwanul Muslimin mulai membangun lembaga-lembaga sosial di Palestina pada tahun 1970-an. Jadi waktu yang

⁷² Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai system kaderisasi politik Ikhwah baca, Utsman Abdul Mu'iz Ruslan. 2000. *Tarbiyah Siyasiyah Ikhwanul Muslimin* (Solo: Era Intermedia).

⁷³ Jensen dalam Mousalli, ed. Op. cit. hlm. 199.

⁷⁴ Buku-buku yang menjadi rujukan misalnya, *Majmu Ar-Rosail* karya Hasan, *Khilafah dan kerajaan* karya Abul Alla Al Maududi dan *Ma'alim Fi at-Thariq* karya Sayyid Qutb.

⁷⁵ Mustafa Abd. Rahman, *Jejak-Jejak Juang Palestina: dari Oslo hingga Intifadho Al-Aqsa*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002) hlm. 88.

dibutuhkan Ikhwanul Muslimin untuk eksis di Palestina tidak kurang dari seperempat abad.

Lembaga sosial pertama yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin di Palestina adalah *Al-Mujamma' al-Islami (Islamic Council)*. Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 oleh Ahmad Yasin, pimpinan Ikhwanul Muslimin di Gaza. Organisasi ini berdekatan dengan rumah Ahmad Yasin. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk memberikan edukasi dan sebagai tempat olahraga bagi anak muda di kota Gaza. Prinsip gerakan ini diilhami oleh Qs. Al-Imron: 104, yang berbunyi: *Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung*⁷⁶. Hampir semua peneliti menyatakan bahwa *Al Mujama'* memiliki peran penting bukan hanya sosial tapi juga secara politik. Karena sebagian besar pemimpin lembaga ini adalah pemimpin Ikhwanul Muslimin Palestina. Dengan adanya lembaga ini, maka tersedia sarana untuk memperluas Dakwah di dalam masyarakat Palestina⁷⁷

Selain *Al-Mujamma Al Islami* bermunculan organisasi lain yang pola gerakannya hampir sama, yaitu *Al-Ja'miyya Al-Islamiya*. Gerakan ini didirikan oleh Ahmad Bahr, seorang ustadz lulusan Sudan, yang menjadi Imam masjid Palestina di Pusat Gaza dan Professor di Universitas Islam Gaza. Seperti *Al-Mujamma Al Islami* gerakan ini berpusat di dekat kediaman pendirinya. Tujuan gerakan ini adalah membimbing rakyat Palestina kepada nilai-nilai Islam otentik (*Islam al-hanif*) yang bersih dari pengaruh nilai Barat atau pun nilai tradisional

⁷⁶ Jensen dalam Mousalli, ed. Op. cit. hlm. 198.

⁷⁷ Milton Edwards, *Islamic Politics*, dikutip Jensen dalam Mousalli ed. Op. cit. hlm 201.

setempat yang tidak Islami. Gerakan lainnya didirikan pada tahun 1978 oleh Ahmad Al-Kurd di kota Deir al-Balah. Meski berbeda organisasi, gerakan tersebut memiliki kesamaan pola perjuangan. Pergerakan mereka berkiblat pada pemikiran Hasan Al-Banna. Pada tahun 1981, berdiri pula organisasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu *Jam'iyat Al-Shabbat Al-Muslimat* (asosiasi muslimah muda) yang memberikan pelayanan bagi muslimah di Jalur Gaza, seperti pelatihan membaca Al-Qur'an, mengoperasikan komputer, menjahit dan lain-lain⁷⁸. Selain itu, masih ada lembaga sosial yang memiliki wilayah kerja spesifik di Gaza. Contohnya, *Al-Wafa li-Ra'iyya Al-Musanin* didirikan pada tahun 1980, *Islamic Home* (pesantren) bagi orang tua, *Maharrat Al-Rahma* dan *Islamic Home* bagi anak yatim.

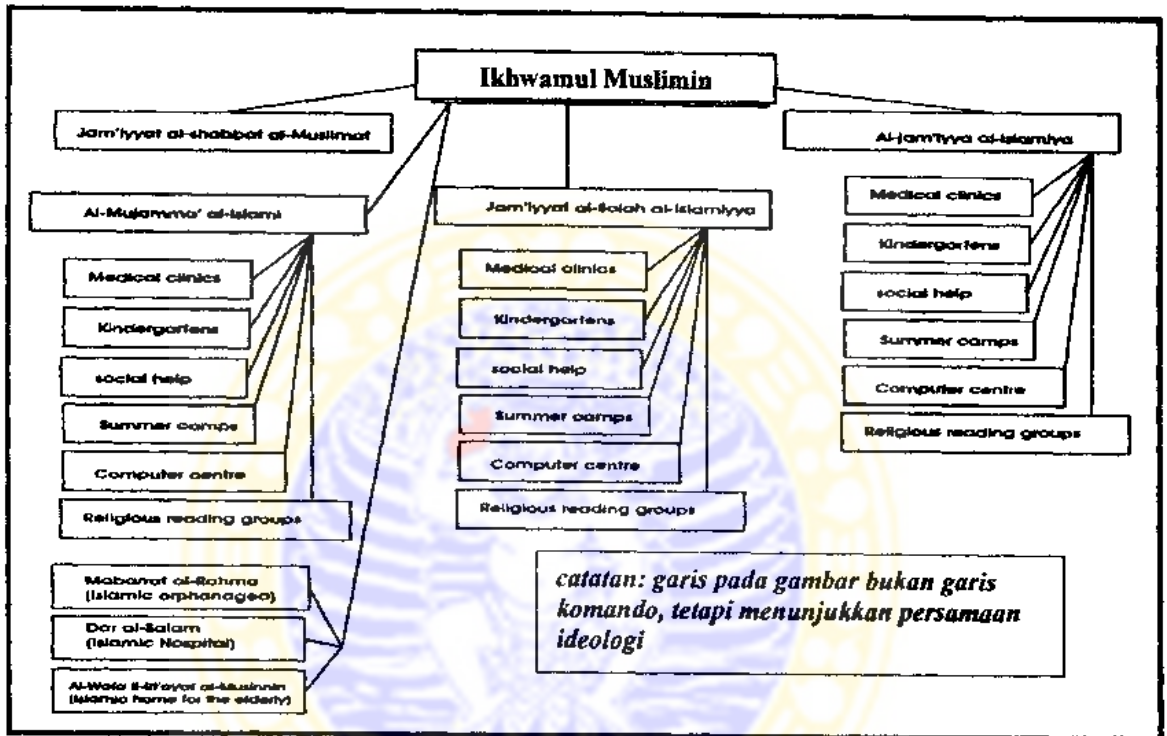
Semua institusi Islam tersebut bekerjasama dalam irama yang teratur, tidak ada kompetisi antar organisasi, karena mereka diikat oleh ideologi yang sama. Hampir semua pemimpin dari institusi muslim tersebut adalah anggota atau dekat dengan Ikhwanul Muslimin. Setiap gerakan memiliki tugas dan wilayah kerja tersendiri. Hal ini menunjukkan kuatnya koordinasi. Strategi ini dinamakan *a deliberate strategy* oleh pemimpin *Hizb al-khalas al-watani al-Islam*.⁷⁹ Strategi yang menekankan pada kehati-hatian dengan koordinasi bawah tanah (rahasia). Jadi pola hubungan antara berbagai organisasi tersebut layaknya jaring laba-laba, tidak jelas hierarkisnya. Hanya Hamas sendiri yang tahu bagaimana sumber dan arah intruksi

Meski tidak seluruh organisasi Islam digerakkan oleh Ikhwanul Muslimin,

⁷⁸ Ibid 200.

⁷⁹ Ibid 204.

tetapi mereka mengakui bahwa sebagian besar lembaga adalah miliknya. Untuk lebih jelas mengenai keterkaitan antara organisasi Islam di Jalur Gaza. Lihat diagram berikut.



Gambar 3. Skema Institusi Sosial Utama di Jalur Gaza.

(Michael Irving Jensen, *Islamism and Civil Society in the Gaza Strip*, in Ahmad S. Mousalli, *Islamic Fundamentalism: Myths and Realities*, (South Street Reading; UK: Ithaca Press, 1998) hlm. 200).

2.4 Hamas: Transformasi Ikhwanul Muslimin Palestina sebagai Gerakan Perlawanan terhadap Israel

Intifada I⁸⁰ menjadi titik tolak perubahan orientasi gerakan Ikhwanul Muslimin Palestina. Merespon Intifada yang merupakan perwujudan perlawanan

⁸⁰ Intifada terjadi dua kali, Intifada pertama berlangsung pada tahun 1987-1991. Perlawanan ini terjadi karena rakyat Palestina kecewa dengan upaya-upaya penyelesaian konflik oleh PLO yang tidak membuahkan hasil sama sekali. Apalagi PLO telah terkontaminasi oleh perpecahan akibat perebutan jabatan dan korupsi. Bagi rakyat Palestina PLO merupakan sandaran terakhir setelah negara-negara Arab menarik diri dari usaha menghancurkan Israel. Jadi Intifada muncul karena rakyat Palestina merasa bahwa mereka sendirilah yang mampu untuk menyelesaikan persoalannya. Intifada kedua meletus pada tahun 2000-2004. Meletusnya Intifada ke-2 disebabkan oleh pelanggaran Israel terhadap kesepakatan Oslo. Intifada ke-2 ini terkenal dengan sebutan Intifada Al-Aqsa. karena meletusnya Intifada ke-2 akibat “kunjungan” Ariel Sharon yang dikawal Skripsi

semesta rakyat Palestina, Ikhwanul Muslimin Palestina memutuskan untuk terlibat aktif bersama rakyat untuk melakukan perlawanan. Intifada mulai berkobar paska kecelakaan lalu-lintas 8 Desember 1987, yang mengakibatkan empat warga meninggal dunia dan sembilan warga Palestina luka parah. Kecelakaan itu akibat kelalaian sebuah truk yang meluncur dari pemukiman Iriz (pemukiman Yahudi).

Pada awal tahun 1988, *the Unified National Leadership of the Uprising* (UNLU) dibentuk oleh PLO sebagai lembaga untuk menyatukan dan mengkoordinasikan gerakan perlawanan. Meski tidak sejalan dengan tujuan UNLU, mendirikan negara Palestina yang sekuler berdampingan dengan Israel, semua gerakan perlawanan Islam, Islamic Jihad⁸¹ dan Hamas, bahu-membahu bersama PLO untuk melakukan perlawanan jalanan.

Paska Intifada I, sebagian besar perlawanan dilancarkan oleh gerakan Islam. Sejak tahun 1991, PLO menarik diri dari Intifada, dan selanjutnya berkonsentrasi dalam perjuangan diplomatik. Hampir semua pasukan brigade tempur PLO, *the Black Panthers of Fatah, the Fatah Hawks, the Red Eagles of the PFLP* dan yang lainnya, telah menjauhkan diri dari perlawanan. Penarikan diri ini menjadikan golongan Islam menjadi penopang utama perlawanan. Golongan Islam yang aktif melakukan perlawanan adalah Jihad Islam dan Hamas. Simpati Masyarakat Palestina terhadap Jihad Islam tidaklah besar, pada poling tahun 1994

Intifada ke-2 disebabkan oleh pelanggaran Israel terhadap kesepakatan Oslo. Intifada ke-2 ini terkenal dengan sebutan Intifada Al-Aqsa karena meletusnya Intifada ke-2 akibat "kunjungan" Ariel Sharon yang dikawal puluhan polisi ke Masjid Al-Aqsa pada tanggal 28 September 2000. peristiwa tersebut dianggap sangat menghina oleh gerakan Islam di Palestina atau pun dunia Islam umumnya.

⁸¹ Islamic Jihad didirikan pada tahun 1980 oleh Fathi Asy-Syaqaqi. Gerakan ini didirikan oleh Syaqaqi karena dia menganggap Ikhwanul Muslimin terlalu lembek. Mereka menganggap satu-satunya jalan kemenangan adalah revolusi. Islamic Jihad sangat terosepsi oleh kesuksesan revolusi Islam Iran 1979.

dukungan terhadap Jihad Islam hanya 2-5 % saja. Rendahnya dukungan ini akibat citra Jihad Islam yang radikal. Berbeda dengan Hamas, dukungan terhadapnya cukup besar (17 %), karena basis sosialnya yang cukup kuat hasil dari interaksinya dengan rakyat Palestina melalui berbagai lembaga sosial yang ia miliki sebelumnya. Dengan kata lain, selain memiliki wajah yang identik dengan kekerasan, Hamas memiliki wajah yang humanis. Menurut Legrain, Hamas telah sukses untuk menempatkan dirinya sebagai alternatif utama nasionalisme Palestina, karena memiliki kompetensi untuk menggantikan peran PLO di Palestina.

82

Sebelum Intifada I meletus, Ikhwanul Muslimin Palestina bergerak dalam koridor moderat (non-konfrontatif). Meskipun ia sudah memiliki barisan sayap militer. Namun sayap militer tersebut dibentuk bukan untuk melawan Israel, tetapi untuk membela diri sekaligus melawan para penghianat (*Palestinian Infidels*), utamanya partai komunis.⁸³ Barisan sayap militer tersebut dinamai *The Palestinian Holy Fighters*.⁸⁴

Keterlibatan Ikhwanul Muslimin Palestina dalam Intifada merupakan tekanan struktural; karena pada masa Intifada terjadi mobilisasi seluruh masyarakat Palestina untuk melawan okupasi Israel.⁸⁵ Hamas dideklarasikan pada pertengahan Desember 1987, oleh beberapa petinggi *Ikhwanul Muslimin* di Gaza;

⁸² Jean-Francois Legrain, *HAMAS: Legitimate Heir of Palestinian Nationalism?*, in John L. Esposito ed., *Radical Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?* (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1997) hlm. 165.

⁸³ http://www.net.org.il/water_tet/nydet.cfm?nyid=13, di akses 5 April 2006.

⁸⁴ Dibentuk oleh Sheikh Ahmad Yasin pada tahun 1982. Pada mulanya institusi ini berfungsi untuk melakukan suplai senjata dan menjaga *Al-Mujama* dari ancaman organisasi lain. Pada tahun 1986 oleh Ahmad Yasin berdam dua temanya yang aktif di Al-Mujama membentuk kesatuan baru, *Majmouath Jihad u-Dawa (Holy War and Sermonizing Group)* disingkat dengan nama *Al-Majd*. Tugasnya adalah melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap warga Palestina yang dicurigai berkolaborasi dengan Israel dan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Islam, misalnya menjual obat-obat terlarang. Pada saat Intifada dua brigade ini yang menjadi tulang punggung Ikhwan dalam melawan Israel.

⁸⁵ Jensen dalam Mousalli ed. Op. cit. hlm. 163.

Abd al-Aziz al-Rantisi (dokter anak yang bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Gaza, Salah Shahada dan Yahya al-Sinuwwar (pemimpin dewan mahasiswa Universitas Islam Gaza dan pengurus Iqwan dalam bidang keamanan). Pendirian ini merupakan inisiatif pribadi atas dasar dorongan emosional, bukan atas nama organisasi Ikhwanul Muslimin Palestina.

Ikhwanul Muslimin Palestina pada mulanya tidak mau mengakui eksistensi Hamas, meskipun mendapat dukungan dari Shaikh Ahmad Yasin. Sikap tersebut wajar, karena lahirnya Hamas membawa perubahan dramatis terhadap orientasi gerakan, dari gerakan non-konfrontatif (moderat) berubah menjadi gerakan konfrontatif (radikal). Konsekuensinya kedepannya, Hamas akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Karena dia akan menghadapi resistensi dari berbagai kelompok, utamanya Israel. Baru pada bulan February 1988, secara formal Hamas diakui sebagai *its strong arm*⁸⁶ di Palestina. Keputusan tersebut diambil setelah ada pertemuan antara pimpinan utama Ikhwan cabang Yordania dan Palestina di rumah sakit Islam Amman, Yordania.

Perlawanan Hamas Terus berlanjut, meski Intifada sudah berakhir. Pada tahun 1992 Hamas membangun sayap militer yang terkenal dengan nama *Izz ad-Din al-Qassam Brigades*. Karena mulai tahun tersebut Hamas menjadi menggantikan posisi Ikhwanul Muslimin Palestina sebagai pusat seluruh gerakan. Jadi, semua operasi militer Hamas diserahkan pada brigade tersebut. Kebanyakan serangan terhadap kepentingan Israel dinisbahkan kepada brigade ini. Dari brigade *Izz ad-Din al-Qassam Brigades* muncul seorang tokoh yang melegenda,

⁸⁶ Maksud dari *its strong arm* adalah Ikhwanul Muslimin Palestina menganggap HAMAS sebagai instrumen perlawanannya terhadap Israel.

Yahya Ayash sang insinyur yang menjadi motor serangan bunuh diri terhadap Israel. Dia diberi gelar sebagai sang insinyur akibat perannya sebagai perakit bom.

2.5 Hamas dan Intifada

Intifada tidak bisa dilepaskan dengan Hamas. Karena Intifada yang menjadi sebab lahirnya Hamas. Bukti dari gigihnya perlawanan Hamas adalah banyak pejuangnya yang menjadi tahanan Israel. Sejak tahun 1989 Israel telah menahan ribuan anggota Hamas. Konon sebagian besar tahanan yang meringkuk di Palestina adalah anggota Hamas. Namun penahanan tersebut tidak menjadi halangan atau mengurangi frekuensi perlawanan. Mati satu tumbuh seribu, mungkin itu peribahasa yang dapat menggambarkan gelora perlawanan Hamas.

Menurut Rahman,⁸⁷ gaya perlawanan Hamas memiliki ciri-ciri: pertama, jelas dalam memilih sasaran musuh (Israel). Kedua, menggunakan brigade ukuran kecil. Ketiga, meredam konflik internal dan berkonsentrasi melawan musuh. Menurut Dr. Rantisi, pemimpin Hamas, strategi perlawanan Hamas pada intinya adalah defensif. *He said, "We want to do the same to Israel as they have done to us".*⁸⁸ Serangan Hamas melalui sayap militernya terhadap Israel, baik militer atau pun sipil, merupakan serangan balasan (*counter attack*) atas serangan Israel. Setiap serangan yang mereka lakukan mereka sebarluaskan melalui internet⁸⁹ dan

⁸⁷ Rahman. Op. cit. hlm. 89.

⁸⁸ Mark Juergensmeyer, *Terror in The Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, (California: University of California Press, 2003). Revised Edition. hlm. 75.

⁸⁹ Website HAMAS adalah www.palestine-info.com. A news portal in Arabic. Selain alamat tersebut Hamas memiliki enam alamat lain dengan enam bahasa berbeda. Yaitu:

1. www.palestine-info.co.uk, the official Hamas website in the English language;
2. www.palestine-info.fr, the official Hamas website in the French language;
3. www.palestine-info.ru, the official Hamas website in the Russian language;
4. www.infoPalestina.com, the official Hamas website in the Malay language;

media massa lainnya. Agar mata dunia mengetahui bahwa mereka adalah pejuang bukan teroris. Selama ini, Barat mempropagandakan bahwa Hamas adalah organisasi teroris. Dengan memberikan informasi yang berimbang, Hamas ingin agar dunia melihat persoalan Palestina dengan sudut pandang yang benar. Dr Rantisi ketika diwawancarai oleh Jugensmeyer mengatakan, *"You think we are the aggressors. It is important for you to understand that we are the victims in this struggle, not the cause of it"*.⁹⁰ Jadi opini yang ingin dikembangkan oleh Hamas adalah opini bahwa Hamas adalah pejuang yang membela harga diri dan martabatnya dari agresi Israel.

Ketika Israel dan Amerika Serikat mengecam Hamas sebagai sebuah gerakan teroris, para pemimpin Hamas menanggapi dengan mengatakan bahwa penggunaan kekerasan, sasarannya hanya terbatas pada target-target politik dan militer di daerah pendudukan. Sikap ini berubah drastis setelah perjanjian Oslo tahun 1993, perubahan sikap tersebut akibat serangan ekstrimis Yahudi terhadap warga sipil Palestina.⁹¹ Sebagai respon Hamas memperkenalkan sebuah tipe peperangan baru; istishadi (bom bunuh diri) dan sasarannya tidak hanya terbatas pada sasaran militer. Serangan paling mematikan terjadi pada tanggal 19 Oktober 1994 di pusat kota Tel Aviv, yaitu pemboman sebuah bus yang menewaskan 23 Oarang dan melukai hampir 50 orang.

-
5. www.palestine-info-urdu.com, the official Hamas website in Urdu (the official language of Pakistan).
 6. www.palestine-persian.info, the official Hamas website in Farsi.
 - 7.

⁹⁰ Ibid. hlm. 75.

⁹¹ Pada tanggal 25 Februari 1994, seorang penunjukim Yahudi bernama Baruch Goldstein berjalan ke dalam Masjid Patriach di Hebron, menembakkan senjata apinya dan membunuh 29 kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah sholat Jum'at.

Dengan taktik baru ini, Hamas telah menyerang rasa kerentanan yang tiada tara dan teror ke tengah-tengah masyarakat Isarel. Mereka bangga dengan taktik ini, sebagaimana dinyatakan dalam poster-poster di Universitas-Universitas di Tepi Barat dan Jalur Gaza: "Israel memiliki bom nuklir, kita memiliki bom manusia".⁹² Serangan ini akan terus dilancarkan sampai Palestina bebas dari Okupasi Israel. Dr. Rantisi, yakin bahwa serangan-serangan semacam ini memastikan bahwa orang-orang Israel tidak akan merasakan stabilitas dan keamanan hingga aksi pendudukan berakhir. Para pembom bunuh diri adalah masa depan Israel katanya.⁹³

Kemudian orang bertanya-tanya, mengapa pemuda muslim dengan sukarela menjadi martir, mengorbankan nyawa untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Edward Said mencoba memberi jawaban untuk pertanyaan menarik tersebut.

"Tumbuh di tengah-tengah suasana penindasan dan pengepungan, menghadapi masa depan yang suram, tingginya pengangguran, dan kemiskinan endemic dapat menghasilkan kemarahan dan hasrat untuk melampiaskan dendam terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sebagaimana halnya para pemuda ditengah-tengah kota di Amerika Serikat, beberapa orang pemuda tersebut kehilangan semua harapan...agama memberikan jawaban...prospek untuk menjadi seorang pahlawan yang mulia di dunia dan menikmati Surga di akhirat nanti."⁹⁴

Pada tahun 2000 Intifada kembali meletus, kali ini disebabkan oleh

⁹² Kelley, *Devotion, desire drive Youth*, dikutip John L. Esposito. Ibid. hlm. 122.

⁹³ Anthony Syadid, *Legacy of the Prophet: Despots, Democrats and the New Politics of Islam* dikutip John L. Esposito. Ibid. hlm. 123.

⁹⁴ Edward Said dalam John L. Esposito, *Unholy War: Teror atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon Terabitara, 2003) terjemah. hlm. 122.

pelanggaran Israel atas kesepakatan Oslo. Sebagai pemicu adalah 'kunjungan' Ariel Sharon beserta pasukan keamanan Israel ke masjid Al-Aqso. Sehingga Intifada ke-dua ini sering disebut dengan nama Intifada Al-Aqso⁹⁵. Klimaks Intifada Al-Aqso terjadi pada hari Kamis 12 Oktober 2000 di Ramallah, Tepi Barat, dimana masa Palestina membunuh dua dari empat satuan elit Israel dan kemudian membakar dua Jasad tentara Israel tersebut. Israel membalas dengan membombardir kota Ramallah dan Gaza dengan Tank Mirkava dan helikopter Apache. Tindakan Israel itu menyulut unjuk rasa di berbagai negara Arab dan Islam. Dalam Intifada ke-2 ini, di pihak Palestina, ratusan korban tewas dan hampir 15.000 orang luka-luka.

Untuk mengatur alur Intifada ke-2, dibentuklah *steering committee*. Anggota dari *steering committee* ini adalah Palestinian Jihad Islam (PIJ), Hamas, Pemerintah Otoritas Palestina dan Fatah. Pada Intifada yang pertama, golongan Nasionalis yang dimotori oleh Fatah sebagai penggerak utama, kondisi tersebut berbalik, posisi tersebut saat ini diambil oleh kelompok Islam. Mahmoud Zahar, Juru bicara Hamas di Jalur Gaza, mengatakan bahwa *steering committee* melakukan pertemuan setiap harinya di Gedung Dewan Legislatif Palestina di Gaza untuk menyusun agenda esok hari, termasuk waktu dan lokasi demonstrasi dan kerusuhan. Dalam *steering committee* Hamas menjadi koordinator⁹⁶

Bagi Hamas, momen Intifada memberikan peluang untuk melakukan vitalisasi sayap militernya. Sebelum Intifada meletus, banyak anggota dan pimpinan sayap militer Hamas yang ditahan oleh pasukan keamanan Arafat.

⁹⁵ Untuk mengetahui perjalanan Intifada Al-Aqso secara lengkap, *day to day*, buka http://www.pna.gov.ps/arabic/quds/eng/general%20report/quds_eng5.html

⁹⁶ http://www.ql.org/ik/spealhigh/065_cjhu?id=510, diakses 16 April 2006.

Penahanan ini terkait dengan kesepakatan Oslo yang mengharamkan untuk saling serang. Hamas dituduh oleh Pemerintah Otoritas Palestina terlibat dalam serangkaian serangan.

Pada dasarnya meletusnya Intifada merupakan imbas dari kebuntuan politik untuk mewujudkan hak-hak minimal rakyat Palestina.⁹⁷ Jadi "kunjungan" Saron ke Masjid Al-Aqsa hanya sebagai pemacu perang yang sudah siap berkobar. Meletusnya Intifada pertama dipicu oleh hilangnya akses perlawanan Palestina dari negara-negara Arab garis depan setelah hengkangnya PLO dari Beirut pada tahun 1982; pindah ke Tunisia. Dan, negara-negara Arab lebih memberi prioritas perhatian kepada perang Irak-Iran. Intifada Al-Aqso merupakan konsekuensi logis dari kebuntuan politik semenjak berakhirnya KTT CampDavid II bulan Juli 2000.

2.6 Ideologi Hamas

Landasan gerakan Hamas adalah Islam. Dalam artikel 1 manifesto Hamas disebutkan.

"Islam adalah manhajnya (rujukannya), sumber pemikiran, dan konsepnya mengenai alam, kehidupan dan manusia. Islamlah yang menentukan dan menuntun seluruh tindakan dan langkah gerakan ini. Identitas keagamaan inilah yang menjadi ciri khas Hamas yang membedakannya dari gerakan perlawanan lainnya."⁹⁸

Untuk Palestina, Hamas memiliki visi akan menjadikan Palestina sebagai negara Islam. Dalam manifesto Hamas artikel 6 dinyatakan: ...ia (Hamas) menyerahkan wala'nya (kesetiannya) kepada Allah dan menjadikan Islam sebagai

⁹⁷ Rahman, Op. cit. hlm. 221.

⁹⁸ <http://www.fas.org/jrp/world/para/docs/889818.htm#htm> Hamas charter, diakses 17 April 2006.

pedoman hidup, dan berjuang menegakkan panji Allah di atas setiap jengkal bumi Palestina.⁹⁹ Jihad (perlawanan) merupakan kewajiban setiap individu yang mengaku muslim. Oleh karena itu, Hamas mengundang siapa saja yang memiliki semangat perlawanan dan mau bergerak dalam koridor moralitas Islam untuk bergabung dengannya. Pentingnya religiusitas dalam perlawanan ditegaskan Hamas dalam manifestonya dengan menukil bait syair Muhammad Iqbal.

*Tanpa Iman tak ada kedamaian
Tanpa agama tiada arti dunia
Kehidupan tanpa agama
Berarti kefanaan berkepanjangan*

Konsepsi Hamas mengenai Nasionalisme berbeda dengan gerakan yang lain. Konsep kesetiaan hanya kepada Allah menegaskan bahwa ikatan tersebut merupakan ikatan tertinggi dan dapat menegasikan ikatan yang lain. Cinta tanah air dalam perspektif Hamas merupakan aqidah atau prinsip. Jadi nasionalisme tidak hanya didefinisikan secara spatial geografis. Lebih dari itu, Islamlah yang menentukan demarkasi geografis. Dalam artikel ke-12 dinyatakan bahwa nasionalisme Hamas tidak hanya diikat oleh faktor geografis semata, yang terpenting adalah ikatan yang didasarkan pada faktor Rabbaniyah (Ketuhanan) yang memberikan ruh dan kehidupan; faktor Rabbaniyah itu adalah Islam.¹⁰⁰

Ideologi Hamas terangkum dalam slogannya:

“Allah adalah tujuan kami. Muhammad adalah tauladan kami. Al-Qur’an adalah undang-undang kami. Jihad adalah jalan kami, dan mati dijalan (perjuangan) Allah puncak cita-cita kami.”¹⁰¹

⁹⁹ ibid

¹⁰⁰ ibid

¹⁰¹ ibid

2.7 Struktur Organisasi Hamas

Struktur Hamas sulit untuk dideteksi. Karena Hamas memiliki garis komando yang jelas, garis komando dijalankan secara rahasia¹⁰² Struktur Hamas merupakan kombinasi antara organisasi regional dan fungsional. Artinya, sistem komando dijalankan dengan pertimbangan kewilayahan, sekaligus dalam ranah fungsional. Akibatnya, dalam sebuah wilayah yang sama ada beberapa organisasi yang identik dan memiliki framework yang sama beroperasi. Misalnya, di Gaza ada beberapa klub olahraga yang ditengarai di miliki oleh Hamas, yang melakukan operasi tanpa demarkasi wilayah operasi yang jelas.

Meski sulit untuk menggambarkan struktur Hamas dengan pasti, beberapa pihak mencoba untuk mengurai kekusutan tersebut dari berbagai pengamatan yang telah mereka lakukan. Israel mencatat bahwa Hamas memiliki empat organ utama¹⁰³:

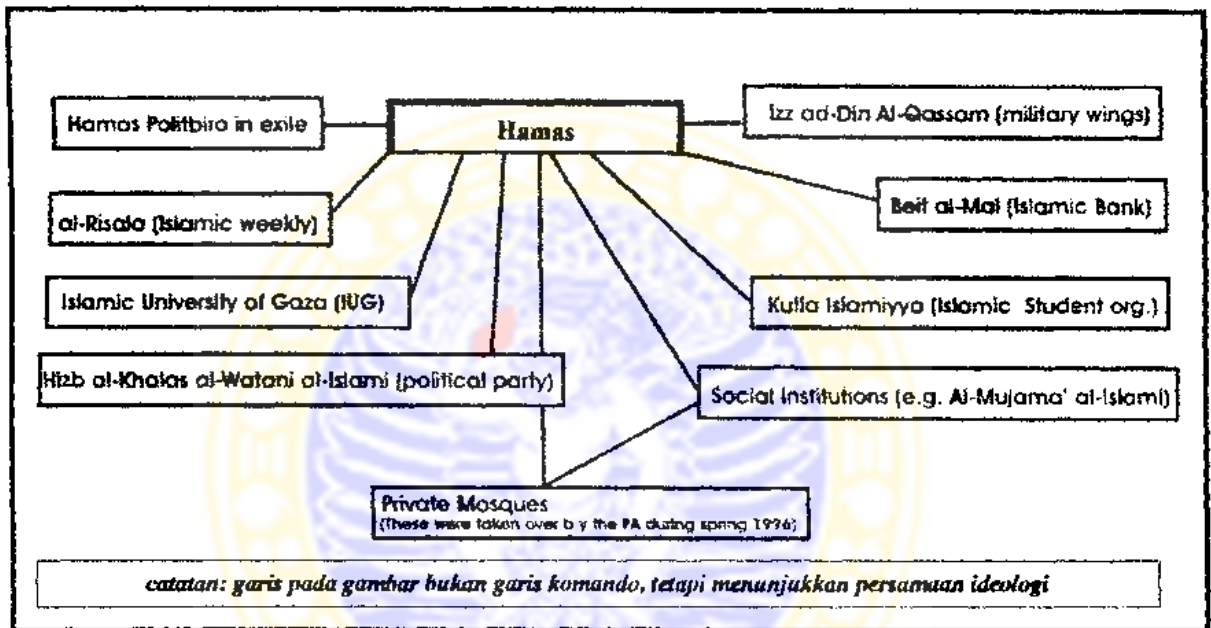
1. Infrastruktur dakwah yang fokus kegiatannya adalah rekrutmen dan penyaluran dana bantuan, serta kegiatan yang bersifat sosial lainnya.
2. *Popular Violence* dalam kerangka Intifada
3. *Security*, pengawasan internal untuk menangkap para penyusup dan kolaborator.
4. Pers, yang melakukan penyebaran leaflet, propaganda, serta sebagai kantor pusat informasi Hamas.

¹⁰² Aaron D. Pina, *Fatah and Hamas: the New Palestinian Factional Reality* dalam <http://pc.state.gov/documents/organization/62834.pdf>, di akses 17 mei 2006.

¹⁰³ Op. cit. <http://www.fas.org/irp/world/para/docs/930100.htm>

Jensen mencoba menggambarkan dengan lebih jelas struktur Hamas. Untuk menggambarkan struktur Hamas, Jensen secara langsung melakukan pengamatan di Palestina. Yang menjadi tolak ukur Jensen dalam penelitian adalah pengakuan anggota organisasi tersebut bahwa mereka berafiliasi dengan Hamas.

Gambar 4. Skema Struktur Organisasi Gerakan Hamas



Sumber: Michael Irving Jensen, *Islamism and Civil Society in the Gaza Strip*, in Ahmad S. Mousalli, *Islamic Fundamentalism: Myths and Realities*, (South Street Reading, UK: Ithaca Press, 1998) hlm. 205).

Aron D. Pina dengan merangkum dari berbagai sumber, mendiskripsikan jajaran pimpinan Hamas.¹⁰⁴

1. Khaled Mishal, lahir di Tepi Barat pada tahun 1956 dan menamatkan studinya di Universitas Kuwait jurusan Fisika. Saat ini tinggal di Damaskus, Syria. Dalam struktur Hamas, dia dipercaya sebagai jurubicara Politburo HAMA di luar negeri.
2. Ismail Haniya, pada usia 40 tahun dia berhasil meraih gelar master dari Universitas Islam Gaza. Di almamaternya, sebelum menjadi perdana

¹⁰⁴ Op.cit. <http://px.state.gov/documents/organization/62634.pdf>,

- menteri Palestina, Ismail Haniya dipercaya sebagai rektor. Para pengamat melihat dia sebagai sosok yang moderat.
3. Musa Abu-Marzuq, lahir di Gaza pada tahun 1951. Dia meraih gelar doktoralnya di Amerika Serikat dalam bidang industrial engineering. Dia lama tinggal di Amerika Serikat dan Yordania. Marzuq keluar dari dua negara tersebut akibat dideportasi. Saat ini dia tinggal di Syiria. Dalam struktur Hamas, Marzuq dipercaya sebagai ketua Politbiro. Pada tahun 2005, dia disidangkan pemerintah Amerika Serikat atas tuduhan mengumpulkan donasi bagi Hamas dengan cara ilegal.
 4. Mahmoud al-Zahar, lahir di Gaza dan menamatkan studinya di Universitas Kairo jurusan Farmasi. Saat ini dia dipercaya sebagai pimpinan fraksi Hamas di Palestina.
 5. Aziz Dweik, lahir pada tahun 1948. Dia menamatkan studi doktoralnya di Universitas Pennsylvania. Saat ini dia dipercaya sebagai jurubicara Hamas di Parlemen Palestina.
 6. Sheik Hassan Yousef, dia menjabat sebagai ketua Hamas wilayah Tepi Barat sejak tahun 2001. Saat ini dia mendekam di penjara Israel.
 7. Sheik Muhammad Tayr, berasal dari Yerusalem. Sebelum menjadi anggota Hamas, dia sempat menjadi salah satu pucuk pimpinan Fatah. Pernah mendekam dipenjara Israel selama 25 tahun.

8. Mohamed Deif, pada umur 40 tahun dia terpilih sebagai komandan Brigade Izz ad-Din al-Qasam. Guru Deif adalah Yahya Ayash.¹⁰⁵ Keberadaannya sampai saat ini tidak diketahui.

2.8 Strategi Hamas sebagai Organisasi Perlawanan

Dalam usaha untuk menggambarkan strategi Hamas, dalam sub bab ini akan diulas mengenai tujuan gerakan dan berbagai usaha yang diambil oleh Hamas untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Dengan asumsi bahwa untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan penahapan capaian gerakan. Bachtiar secara analitis menyimpulkan dari pengamatan dan data yang ia peroleh tujuan Hamas dapat dibagi dalam empat level; tujuan umum, tujuan strategis, tujuan antara dan tujuan segera. Tujuan umum gerakan HAMAS adalah mendirikan negara Islam di Palestina. Sedangkan tujuan strategisnya adalah memerdekakan seluruh tanah Palestina dari penjajahan Israel. Bagi Hamas, tanah milik rakyat Palestina adalah di Laut Tengah di selatan sampai Sungai Jordan di utara.

Tujuan antara Hamas menurut Bachtiar dapat di perinci sebagai berikut:

1. Membebaskan Tepi Barat dan Jalur Gaza dari penjajahan Israel. Meski sudah ditandatangani perjanjian Oslo yang memberikan hak kepada rakyat Palestina untuk membentuk Pemerintahan Otoritas Palestina di dua wilayah tersebut. Namun perjanjian itu belum benar-benar membebaskan Palestina. Sebab, kesepakatan itu justru semakin memantapkan kedudukan

¹⁰⁵ Dia adalah salah satu pemimpin brigade Izz ad-Din al-Qasam. Dibunuh oleh dinas intelejen Israel pada tahun 2002 melalui bom telpon genggam. Yahya Ayash merupakan perancang bom yang digunakan dalam aksi bom bunuh diri. Karena keahliannya itu dia mendapat gelar "Sang Insinyur" (*al-Muhandish*)

Israel di wilayah-wilayah Palestina dan diakui secara resmi keberadaan Israel oleh PLO dan kemudian oleh pemerintah Otoritas Palestina.

2. Mengislamkan masyarakat Palestina. Bagi Hamas, ini adalah prasyarat mutlak menuju kemerdekaan Palestina secara Paripurna. Ini semacam kekuatan moral yang dapat menopang tegaknya negara Islam di Palestina. Untuk mewujudkan masyarakat Palestina yang menjalankan Islam secara *kaffah* (sempurna), Hamas mengkoordinir kegiatan dakwah, sosial dan pendidikan.
3. Memperkuat legitimasi sayap militernya. Hamas yakin bahwa melawan pendudukan Israel di Palestina adalah tugas yang legal, baik secara agama maupun undang-undang internasional. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Hamas adalah organisasi teroris merupakan tuduhan yang keliru. Hamas mempromosikan gerakan militernya agar mendapat dukungan dari masyarakat Palestina dan dunia Internasional.
4. Melanjutkan Intifada. Intifada diyakini Hamas merupakan alat paling efektif untuk menekan Israel.
5. Menjaga kesatuan nasional. Hamas berkomitmen untuk menghormati berbagai golongan yang ada ditengah-tengah masyarakat Palestina, baik Muslim atau Kristen. Secara aktif Hamas berkerja di level bawah untuk menanggulangi politik adu domba Israel.
6. Membebaskan tawanan dan menghentikan serangan Israel terhadap warga sipil Palestina. Hamas telah berkali-kali meminta Israel untuk tidak menyerang warga sipil Palestina. Namun, permintaan ini ditolak. Sebagai

balasan, serangan Hamas tidak dibatasi pada target militer Israel saja.

7. Menggali dukungan negara-negara Arab dan Islam. Dukungan dalam bentuk finansial maupun dukungan moral dalam berbagai upaya diplomatik. Dengan dukungan mereka, Hamas berharap isu-isu Palestina dapat menjadi focus utama Dunia untuk segera diselesaikan.

Tujuan segera atau yang secepatnya dilakukan oleh Hamas ada dua. Pertama, netralisasi kekuatan militer Israel. Netralisasi kekuatan militer Israel. Netralisasi kekuatan militer ini merupakan strategi jangka pendek. Tujuannya adalah membendung kekuatan Israel agar tidak memasuki jantung-jantung pertahanan Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Memantapkan Legitimasi Politik di tengah-tengah rakyat Palestina. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Hamas ikut ambil bagian dalam kontestasi *Municipal Election 2006* dan Pemilu Legislatif 2006.

Hamas mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Hamas merancang dan mengesekusi beberapa kegiatan dalam lapangan yang berbeda. Secara umum program-program inti yang dilakukan oleh Hamas sebagai berikut. Usaha pertama adalah memakmurkan masjid. Aktifitas utama Hamas adalah mengaktifkan masjid-masjid di Palestina. Masjid dijadikan sebagai basis untuk membangun karakter dan kepribadian masyarakat. Seperti layaknya aktifitas memakmurkan masjid di tempat lain, Hamas mengajarkan dasar-dasar ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Al-Hadist melalui berbagai pengajian-pengajian, khutbah-khutbah jum'at, kelompok-kelompok diskusi terbatas dan sebagainya. Untuk itu, Hamas menyiapkan kader-kadernya untuk siap menjadi

aktivis masjid di mana saja mereka berada. Karena masjid di Palestina menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat Palestina, sangat wajar bila gerakan Hamas sangat mengakar, tidak elitis. Bagi Hamas, Masjid di Palestina adalah salah satu institusi yang efisien untuk melakukan ideologisasi dan perekrutan anggota.

Usaha kedua Hamas adalah melakukan Gerakan Politik dan Propaganda. Pada prinsipnya aktifitas polituik yang dialukan oleh Hamas melamjutkan apa yang dilakukan oleh Hamas melanjutkan apa yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh Ikhwanul Muslimin Palestina. Hamas melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan simposium politik, kampanye, pameran Islam, mengangkat ikut komunike bersama, menerbitkan buku-buku, brosur, dan publikasi. Teknik gerakan yang dijalankan Hamas antara lain:

- a. Masifikasi isu. Dengan menyebarkan isu politik, Hamas dapat menyadarkan dan membangkitkan perlawanan rakyat.
- b. Berpartisipasi dalam pemilu local dan pemilihan posisi Profesional dalam berbagai bidang. Tujuanya agar Hamas lebih dikenal public dan bagi kader secara pribadi dapat menjadi sarana untuk berintraksi langsung dengan masyarakat serta meningkatkan kemampuannya.
- c. Menjalin aliansi politik dan hubungan internasional. Setelah posisi Hamas dalam negeri Palestina sudah benar-benat mantap, Hamas kemudian menjalin kerjasama-kerjasama internasional untuk memperkenalkan diri sebagai gerakan yang penting di Palestina kepada negara lain. Untuk itu, Hamas membuka berbagai kantor perwakilan di beberapa negara Arab dan Islam lainnya.

- d. Membangun networking dengan institusi di bidang lain. Hamas menggandeng institusi lain yang bergerak dalam lapangan yang berbeda-beda seperti lembaga-lembaga pendidikan, organisasi sosial, organisasi politik, dan sebagainya yang memiliki cita-cita seperti Hamas.
- e. Menggerakkan perlawanan sipil. Program-program perlawanan sipil yang digerakkan oleh Hamas antara lain: demonstrasi, protes rakyat, kerusuhan massa, penyerangan, dan sebagainya. Hal lain yang dilakukan Hamas sebagai salah satu bentuk perlawanan ekonomi terhadap Israel adalah menyerukan boikot atas produk-produk Israel. Hamas juga menyerukan untuk melakukan penghematan, menggalakkan pertanian, dan kemandirian ekonomi. Dengan kemandirian ekonomi, rakyat dapat menghindari dikte ekonomi dari Israel dan sekutunya.

2.9 Hamas dan Politik

Dalam prespektif Ikhwanul Muslimin tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Hasan Al-Banna¹⁰⁶ menegaskan bahwa semua muslim adalah politikus. Dia mengatakan:

"Kita adalah para politikus, dengan pengertian bahwa kita memperjuangkan urusan bangsa kita. Kita berkeyakinan bahwa kekuatan eksekutif adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Dan bahwa kebebasan berpolitik dan berbangsa adalah satu sendi dan kewajiban Islam.

Karena itu kita berkewajiban berjuang demi keutuhan kemerdekaan dan perbaikan aparat eksekutif."¹⁰⁷ Pemikiran tersebut diamini oleh Hamas. Sebelum

¹⁰⁶ Pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir yang menjadi induk HAMAS.

keikutsertaannya dalam Pemilu Legislatif Palestina 2006, Hamas telah memiliki partai politik yang ia beri nama *Hizb al-Khalas al-Watani al-Islami (the Islamic National Salvation Party)*. Partai ini mendapat ijin dari Pemerintah Otoritas Palestina. Karena focus gerakannya adalah untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga dan usaha social Hamas.¹⁰⁸

Hamas juga terlibat dalam berbagai pemilihan jajaran pengurus organisasi profesi maupun organisasi kemahasiswaan. Paska Intifada pertama, Hamas memutuskan untuk melakukan perluasan pengaruh. Dia mencoba untuk menguasai lembaga-lembaga profesi yang telah ada di Palestina. Sebagian besar anggota Hamas merupakan kaum profesional, semisal insinyur, dokter, pengacara, guru, mahasiswa dan ulama. Penguasaan mereka lakukan melalui mekanisme demokrasi; mengikuti suksesi pimpinan lembaga-lembaga tersebut.

Pada bulan Mei 1993, Reuters mencatat bahwa Hamas telah memenangkan 10 kursi pada pemilihan dewan pengurus yang digelar oleh 5000 anggota persatuan kaum profesional di Gaza, sedangkan PLO meraih 16 kursi.¹⁰⁹ Selengkapnya Legrain mencatat, pada tahun 1994, Hamas kembali ikut berpartisipasi, kali ini suksesi dilakukan oleh *the Gaza Engineers' Association* yang memiliki anggota 929 orang. Hamas dengan bantuan *Jihad Islam* keluar sebagai pemenang dengan memperoleh 46.7 %, diikuti oleh Fatah 43.95%, PFLP 6.5%, *Arab Liberation Front* (pro-Iraq) 1.3%, dan Fida 1.2%. Selain lembaga profesional, Hamas juga ambil bagian dalam suksesi lembaga-lembaga

¹⁰⁷ Mahfuds Siddiq, *Pemikiran dan Manhaj Politik Ikhwanul Muslimin*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatua, 2002) hlm. 30-31.

¹⁰⁸ <http://www.ict.org.il/index.asp?orgid=13>, diakses 17 april 2006.

¹⁰⁹ Ehud Ya'ari, *The Metamorphosis of Hamas*, 'The Jerusalem Report', January 14, 1993, hlm. 24

kemahasiswaan (senat atau dewan mahasiswa). Pada bulan November 1993, pada pemilihan dewan Mahasiswa di Universitas Bir Zeit dengan pemilih mencapai 2536 orang, Hamas yang bergabung dengan *the Popular and Democratic Front* berhasil meraih suara mayoritas (52%), yang menjadi rival dalam pemilihan tersebut adalah kelompok Fatah, *the People Party*, dan Fida. Pada pemilu di Universitas Islam Gaza, 5-6 November 1994, Hamas meraih 91.5% suara dan *Islamic Jihad* 7.7% suara, Fatah dan PFLP menarik diri dari pemilihan. Namun dua minggu kemudian, dalam pemilihan di Universitas al-Azhar, Fatah dapat mengalahkan Hamas, dia memperoleh 64% suara menyisihkan Hamas yang hanya memperoleh 24% suara.¹¹⁰

Kesuksesan Hamas dalam berbagai pemilihan tersebut menunjukkan tingginya dukungan rakyat Palestina terhadap organisasi tersebut. Kemenangan tersebut juga menjadi tanda bahwa Hamas merupakan lawan politik serius bagi Fatah, yang nantinya dapat mengdongkel Fatah dari tampuk pimpinan otoritas Palestina.¹¹¹ Jendral Matzan Vilnay, ketua militer Israel wilayah selatan, meyakini bahwa dukungan rakyat Palestina terhadap Hamas mencapai 40%. Bahkan menurut intelejen Israel angka tersebut masih di bawah perkiraan, menurut estimasinya angka yang lebih realistis adalah 50% atau bahkan lebih¹¹².

¹¹⁰ Legrain dalam Esposito ed. Op. cit. hlm 164-165.

¹¹¹ kegelisahan Fatah mendapat konfirmasi, Pada pemilu legislatif 2006, mereka kalah dengan telak dari HAMAS.

¹¹² *Ibid.* hlm. 164.

BAB III

HAMAS DAN PEMILU DI PALESTINA: DARI BOIKOT 1996 SAMPAI PARTISIPASI 2006

Dalam bab tiga ini dibahas mengenai dinamika sikap Hamas terhadap Pemilu Palestina. Pemilu Palestina telah berlangsung dua kali, pada tahun 1996 dan tahun 2006. Menurut undang-undang Pemilu Pemerintah otoritas Palestina tahun 1995, Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Seharusnya pada tahun 2001 Palestina sudah menggelar Pemilu yang kedua. Keterlambatan suksesi ini diakibatkan oleh kondisi Palestina yang tidak kondusif akibat peningkatan eskalasi konflik Palestina-Israel. Pada tahun itu meletus Intefada kedua.

Dalam dua Pemilu tersebut, Pemilu 1996 dan 2006. Hamas mengambil sikap yang berbeda. Pada Pemilu pertama pertama (1996), Hamas menyatakan untuk tidak berpartisipasi (boikot) dan pada Pemilu kedua (2006) dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam Pemilu lokal dan legislatif.

Perubahan sikap Hamas tersebut cukup menarik untuk dikaji. Hamas yang dikenal oleh Barat sebagai gerakan radikal (teroris) ternyata memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Pada Pemilu Palestina 1996, Hamas melakukan boikot kolektif bersama gerakan perlawanan lainnya. Artinya semua gerakan perlawanan, selain Fatah, bersepakat untuk tidak terlibat dalam Pemilu. Karena Pemilu dianggap sebagai hasil dari Kesepakatan Oslo yang sangat merugikan rakyat Palestina. Namun pada tahun 2006, Hamas dan seluruh gerakan yang dulu memboikot Pemilu bersepakat untuk terlibat dalam Pemilu lokal dan

legislatif, hanya Jihad Islam yang masih melakukan boikot. Jihad Islam menyrukan untuk memboikot Pemilu tersebut.¹¹³

Perubahan sikap inilah yang menajdi inti kajian pada bab tiga ini. Pembahasan akan kami bagi bagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama ulasan di fokuskan pada Pemilu Palestina 1996. Dalam sub bab ini dijabarkan isi pokok kesepakatan Oslo yang menjadi dasar adanya Pemilu Palestina dan reaksi berbagai faksi perlawanan di Palestina terhadap kesepakatan tersebut. Selanjutnya diuraikan proses Pemilu Palestina 1996, hasilnya dan sikap Hamas bersama Faksi yang lain di Palestina.

Pada sub bab berikutnya, pembahasan kami fokuskan pada tahun 2006 dimana rangkaian Pemilu lokal dan legislatif Palestina berlangsung. Pada sub bab kedua dari bab tiga ini pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang menjadi sebab Hamas merubah sikap, kemudian memutuskan untuk berpartisipasi dalam Pemilu lokal dan Legislatif.

3.1 Pemilu 1996: Aksi Boikot Pemilu Palestina

3.1.1 Kesepakatan Oslo dan Reaksi Faksi Perlawanan Palestina

Kesepakatan Oslo secara resmi disebut *Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements* atau *Declaration of Principles (DOP)* ditandatangani oleh Mahmaoud Abbas yang mewakili *The Palestine Liberation Organization (PLO)* dan Shimon Peres yang mewakili pihak Israel pada tanggal 13 September 1993 di Washington DC. Kesepakatan tersebut disaksikan Warren

¹¹³ Kompas, Selasa 24 Januari 2006. Hlm. 7.

Christopher (mewakili Amerika Serikat) , Andrei Kozyrev (mewakili Rusia), Yitzhak Rabin (perdana menteri Israel), Yasser Arafat (Pimpinan PLO). Kesepakatan Oslo merupakan kulmunasi (puncak) dari serangkaian kesepakatan yang bersifat rahasia dan terbuka (*public agreements*) yang berlangsung paska *Madrid Conference*¹¹⁴ 1991.¹¹⁵

Esensi dari kesepakatan Oslo adalah penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat dan menjamin pembentukan pemerintahan Palestina. Pemerintahan Palestina yang dibentuk paska kesepakatan ini bersifat sementara sampai ada negoisasi dan ada kesepakatan yang permanen antara kedua belah pihak. Isu permanen seperti pengungsi, perumahan Israeli di Jalur Gaza dan Tepi Barat, keamanan, dan batas wilayah tidak dibicarakan dalam kesepakatan ini. Kesepakatan ini juga memita agar pemerintahan palestina dijalankan sesuai dengan prinsip demokratis dan dan oleh karena itu harus ada pemilu untuk memilih wakil-wakil permanen rakyat palestina. Pemilu ini harus dilaksanakan paling lambat lima tahun paska penandatanganan kesepakatan.¹¹⁶

Sebelum kesepakatan final atau permanen tercapai, Wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat dibagi ke dalam tiga Zona:¹¹⁷

¹¹⁴ The Madrid Conference merupakan awal dari komunitas Internasional untuk memulai proses damai di Palestina paska Intifada ke-1 yang melibatkan Israel dan negara Arab (Syiria, Libanon, Yordania, dan Palestina). sebagai tuan rumah adalah Pemerintah Spanyol dan sebagai sponsor adalah USA dan USSR. Konferensi dimulai pada tanggal 30 Oktober 1991 dan selesai dalam tiga hari. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk membuka jalan damai tanpa mengikutkan power (kekuatan perang) dan veto. Konferensi ini mempertemukan dua jalur negoisasi, bilateral dan multilateral. Hasil penting dari *Madrid Conference* adalah disepakatinya two stage formula dalam penyelesaian soal status Palestina.; *stage* pertama adalah negoisasi pembentukan pemerintah sementara Palestina dan *stage* berikutnya akan diikuti oleh negoisasi yang bersifat permanen mengenai status Palestina. Formula ini menjadi pondasi kesepakatan Oslo.

¹¹⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_Accords, diakses 2 mei 2006.

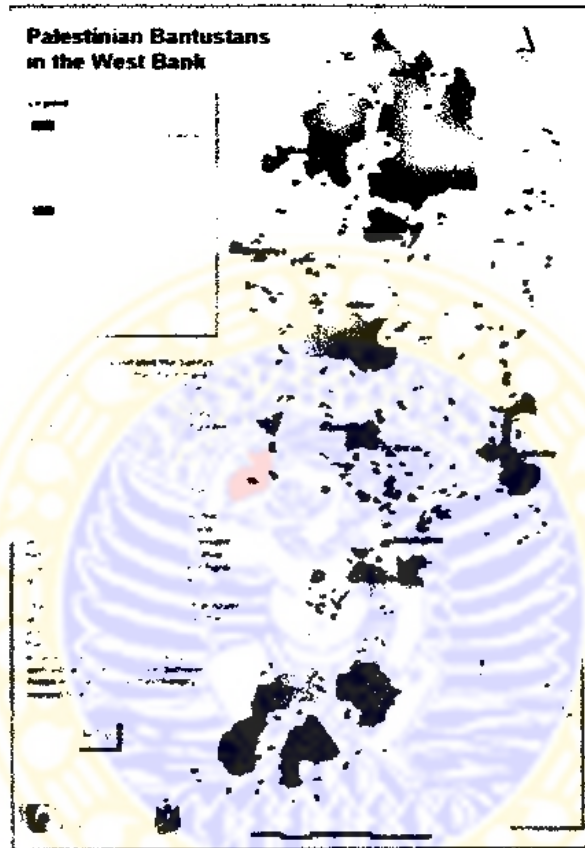
¹¹⁶ *ibid*

¹¹⁷ <http://www.indymedia.org.uk/en/2006/02/333275.html>, diakses 2 mei 2006.

1. Area A: The Palestinian Authority (PA) memiliki otoritas penuh untuk mengontrol wilayah ini baik dalam sector keamanan atau pun pemerintahan sipil. Area ini sekitar 18% dari wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat.
2. Area B: dalam area ini Militer Israel berhak mengontrol sector keamanan dan Pemerintahan Otoritas Palestina berhak untuk mengatur administrasi sipil. Area ini mencakup 24% dari wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat.
3. Area C: Pihak Israel memiliki otoritas penuh untuk mengontrol wilayah ini baik dalam sector keamanan atau pun pemerintahan sipil. Area ini sekitar 59% dari wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Untuk lebih jelasnya lihat peta tepi barat (gambar 5) yang menggambarkan pembagian wilayah tersebut. Disana kita dapat melihat bahwa wilayah Palestina sangat sempit dan terkurung oleh demarkasi atau batas-batas wilayah lainnya. Dengan jelas Israel ingin mengurung kekuatan Palestina dan memecah konsentrasi kekuatan Palestina dalam beberapa wilayah. Kondisi yang tidak menguntungkan ini tersebut memicu reaksi keras dari faksi-faksi perlawanan Palestina. Sebagai bentuk protes penolakan, mereka melakukan pemboikotan Pemilu Palestina 1996 yang menjadi salah satu poin kesepakatan Oslo.

Gambar 5.
Peta Wilayah Tepi Barat dengan Pembagian Area Menurut Kesepakatan Oslo.



Sumber: <http://www.indymedia.org.uk/en/2006/02/333275.html>, diakses 2 mei 2006.

Bersamaan dengan penandatanganan kesepakatan Oslo mereka juga menandatangani *Letters of Mutual Recognition* (nota kesepakatan untuk saling mengakui). Pemerintah Israel mengakui PLO sebagai wakil resmi dari rakyat Palestina, senaliknya PLO harus mengakui eksistensi pemerintahan Israel dan

menghentikan semua aksi perlawanan, kekerasan, dan keinginan untuk menghancurkan Israel.¹¹⁸

Perjanjian ini menuai reaksi cukup keras dari faksi perlawanan lain di Palestina. Hamas, *Palestinian Islamic Jihad* dan *Popular Front for the Liberation of Palestine* menolak dengan tegas kesepakatan Oslo. Ketegasan tersebut tidak lepas dari penandatanganan *Letters of Mutual Recognition* yang menyatakan bahwa Palestina mengakui kedaulatan Israel.¹¹⁹ Sedangkan di pihak Israel, parlemen Israel (Knesset), secara aklamasi menyetujui kesepakatan tersebut.¹²⁰

3.1.2 Pemilu Palestina 1996 dan Sikap Faksi Perlawanan Palestina

Pada tanggal 20 Januari 1996 Pemerintah Otoritas Palestina melaksanakan pemilu di daerah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur untuk memilih presiden dan anggota dewan legislatif Palestina. Pemilihan ini diwarnai oleh optimisme terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina. Rakyat Palestina percaya bahwa pemerintahan yang saat ini terbentuk akan menjadi yang pertama dalam masa kemerdekaan. Namun harapan ini buyar, karena Israel dan Palestina gagal untuk menyepakati isu-isu sentral yang tidak disentuh dalam kesepakatan oslo.¹²¹ Akibatnya, kekerasan kembali terjadi dan puncak konflik terjadi pada tahun 2000 dengan meletusnya Intifada ke-2 (Intifada Al-Aqsa). Instabilitas ini menyebabkan pemilu selanjutnya baru bisa terlaksana satu dekade kemudian.

¹¹⁸ Op cit. http://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_Accords

¹¹⁹ Kompas, 10 Maret 1996, hlm. 7.

¹²⁰ ibid

¹²¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_legislative_and_presidential_election%2C_1996, diakses 2 mei 2006.

Lebih dari satu juta rakyat Palestina memilih dalam pemilu tersebut. Menurut persentase sekitar 90% pemilih di Jalur Gaza menggunakan hak pilihnya, untuk wilayah Tepi Barat tidak kurang 80% pemilih menggunakan haknya, dan untuk daerah Yerusalem Timur jumlah pemilih hanya mencapai 40%. Persentase yang minim di Yerusalem Timur disebabkan oleh kondisi kondisi keamanan yang tidak kondusif, karena pada hari pemilihan Israel mengefektifkan operasi pengamanannya di daerah tersebut. Menurut pengamat internasional, Pemilu berjalan dengan baik, *free and fair*, namun boikot Hamas dan kelompok oposan lainnya membatasi alternatif pilihan.

Kelompok yang menolak perjanjian Oslo konsisten dalam sikapnya, sehingga pada pemilu ini mereka melakukan boikot. Pasalnya, pelaksanaan pemilu merupakan salah satu isi dari kesepakatan oslo.¹²² Bagi Hamas selain alasan prinsipil (bertentangan dengan ideologi gerakan), keengganan Israel untuk melepas Syaikh Ahmad Yasin menjadi alasan lain penolakan Hamas terlibat dalam Pemilu Palestina.¹²³

Dalam pemilihan Presiden, Yaser Arafat dengan meyakinkan mengalahkan rivalnya Samiha Khalil, yang tidak sekuat dengan kesepakatan

¹²² Dalam artikel 3 kesepakatan Oslo disebutkan: Demi rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi; langsung, bebas dan pemilu akan dilaksanakan dibawah pengawasan lembaga yang terakreditasi dan oleh lembaga internasional, sementara itu polisi Palestina berkewajiban untuk menjaga tertip sipil (*public order*).

¹²³ Syaikh Ahmad Yasin ditahan oleh Israel pada tanggal 17 Mei 1989 bersama ratusan aktifis gerakan HAMAS. Penahanan tersebut dilakukan oleh Israel dengan dakwaan melakukan penghasutan untuk kejahatan dan perencanaan pembunuhan atas tentara Israel. Syaikh Ahmad Yasin baru dilepaskan pada tanggal 1 Oktober 1997 setelah Raja Husain dari Yordania meminta dengan tegas kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk membebaskannya. Sebagai konsesi Raja Yordania membebaskan dua agen Mossad yang ditangkap oleh Pemerintah Yordania setelah gagal dalam usaha pembunuhan terhadap Khalid Mis' al di kota Amman.

Oslo, 88.6% melawan 11.5%. kelompok Fatah meraih kursi mayoritas di parlemen dengan raihan 55 kursi (62.5%).

Hamis menyatakan kemenangan tersebut tidak merepresentasikan sikap mayoritas rakyat Palestina. Juru bicara Hamas, Ibrahim Ghose, mengatakan bahwa jika warga Palestina yang terdiaspora ikut memilih, Arafat hanya akan mendapat tidak lebih dari 20% suara.¹²⁴ Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut. Jelas terlihat bahwa seluruh kelompok oposan yang menolak kesepakatan Oslo tidak terlibat dalam pemilu.¹²⁵

Tabel 2. Hasil Akhir Pemilu Legislatif Palestina 2006

Summary of the 20 January 1996 Palestinian Legislative Council election results	Votes	%	Seats
Fatah or Liberation Movement of Palestine (<i>Harakat al-Tahrâr al-Filistini</i>)			55
Independent Fatah	-	.	7
Independent Islamists	-	.	4

¹²⁴ *ibid*

¹²⁵ Daftar faksi yang ada di Palestina:

1. Democratic Front for the Liberation of Palestine (*al-jabhah al-dimûqrâtiyyah li-tahrîr filastîn*) (far-left)
2. Fatah or Palestinian Liberation Movement (*harakat al-tahrîr al-filastîni*) (centre-left)
3. Hamas or Islamic Resistance Movement (*harakat al-muqâwamah al-islâmiyyah*) (Islamist)
4. Palestine Democratic Union (*al-ittihâd al-dimûqrâti al-filastîni*, FiDA) (centre-left)
5. Palestinian National Initiative (*al-mubâdara al-wataniya al-filastîniyya*) (centrist)
6. Palestinian People's Party (*hizb al-sha'b al-filastîni*) (far-left)
7. Popular Front for the Liberation of Palestine (*al-jabhah al-sha'biyyah li-tahrîr filastîn*) (left-wing)
8. Palestinian Popular Struggle Front (left-wing)

Independent Christians	-	.	3
Independents	-	.	15
Samaritans	-	.	1
Others	-	.	1
vacant	-	-	2
Total (turnout %)			88
Source: Keesings Historisch Archief dalam http://en.wikipedia.org , diakses 2 mei 2006			

3.2 Pemilu 2006: Faktor-faktor yang mendorong Hamas terlibat dalam Pemilu Palestina

3.2.1 Kesuksesan Hizbullah: Menyandingkan Perlawanan dan Perjuangan politik

Asumsi yang mengatakan bahwa keikutsertaan Hamas dalam pemilu Palestina akan membuat mereka menjauh dari mainstream gerakan, sebagai Hamas gerakan perlawanan adalah asumsi yang tidak berdasar. Dalam prespektif Hamas tidak ada kontradiksi antara aktifitas politik dan perjuangan militer, keduanya merupakan dua sisi yang saling mendukung dalam setiap aksi perlawanan. Hamas percaya bahwa aksi militer dan perlawanan akan menguatkan posisi tawar Palestina dalam proses negoisasi dengan Israel. Seperti yang diungkapkan oleh Khalid Mis'al, ketua biro politik Hamas, bahwa negoisasi tanpa perlawanan berakhir dengan penyerahan atau ketundukan, tetapi negoisasi

yang didukung oleh perlawanan akan berujung pada perdamaian yang sejati.¹²⁶ Meski dalam masa *hudna*, *long term truce or cease of fire*, Hamas tidak akan meninggalkan resistensi karena hal tersebut merupakan salah satu prinsip utama dalam ideologi Hamas.¹²⁷

Khaled Duzhar, peneliti yang mengabdikan diri di Israel and Palestine Center for Research and Information, menyatakan bahwa Hamas memiliki a rigid fundamental radical theocratic movement (sebuah fundamen gerakan radikal yang kokoh). Hamas tidak akan merubah pola gerakannya meski dia keluar sebagai pemenang Pemilu. Ia menambahkan bahwa Hamas tidak percaya bahwa dirinya yang harus berubah; pihak lainlah yang harus mengikuti langkah Hamas bukan sebaliknya.¹²⁸ Jadi kemenangan Hamas dalam Pemilu, menurut Khaled Duzhar, tidak akan merubah Hamas menjadi gerakan moderat.

Pemikiran Hamas untuk mengemulsikan atau menggabungkan antara perlawanan militer dan politik dipengaruhi oleh kesuksesan Hizbullah, kelompok perlawanan berhaluan syi'ah di Libanon.¹²⁹ Sejak tahun 1992, Hizbullah telah berpartisipasi dalam pemilihan umum di Libanon. Dia memainkan peran sebagai oposisi yang berpengaruh dan sukses untuk menjaga dan memperkuat milisi atau sayap militernya. Sejak saat itu Hizbullah berkembang sebagai salah satu faksi terkuat di Libanon yang memiliki kekuatan basis sosial, politik dan militer yang mumpuni. Dengan wakil mereka di Parlemen dan menteri dalam jajaran kabinet

¹²⁶ Haim Malka. *Forcing Choices: Testing the Transformation of HAMAS*. The Washington Quarterly 28:4 (Autum, 2005) hal. 44.

¹²⁷ untuk lebih jelasnya lihat manifesto HAMAS di lampiran 1.

¹²⁸ Tim Youngs, *Parliamentary Election and the Rise of HAMAS* dalam <http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2006/rp06-017.pdf>, diakses 17 April 2006.

¹²⁹ Op.cit. Haim Malka. Hlm 50

pemerintahan Libanon, maka mereka lebih pragmatis (mempertimbangan kondisi faktual) dalam melakukan perlawanan untuk mencapai *ultimate goal* organisasi, salah satunya mengusir Israel dari Palestina. Meski terlibat dalam pertarungan politik, Hizbullah dapat menggerakkan kekuatan militernya dengan efektif. Kesuksesan yang terbesar dari Hizbullah adalah keberhasilannya mengusir Israel dari Dataran Tinggi Golan. Dengan statusnya sebagai kekuatan politik formal, dalam kesempatan tertentu, dapat bernegosiasi dengan pemerintah Israel untuk melakukan gencatan senjata dan pembebasan tawanan.¹³⁰

Ismael Haniya, salah satu pemimpi utama Hamas dan saat ini menjadi Perdana Menteri Palestina, menegaskan bahwa Hamas telah mengalami perubahan. Perubahan ini menjadi bukti kepada dunia bahwa gerakan perlawanan di Palestina memiliki *political vision* untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan Zionis Isarel tidak memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan mulia itu, imbuhnya.¹³¹

Sangat jelas bahwa Hamas tidak akan mengendorkan perlawanan bersenjata, jika Israel tetap bersikukuh untuk melakukan pendudukan. Seperti yang saya terangkan di atas, Hamas menyadari bahwa melakukan penghancuran total terhadap Israel tidak memungkinkan. Maka mereka melunak dengan menawarkan konsep *hudna, long-term truce or cease of fire*, berdasarkan demarkasi yang disepakati pada tahun 1967, dan Yerusalem menjadi Ibukota Palestina. Perlawanan akan terus berlanjut bila tujuan tersebut belum terwujud.

¹³⁰ Op. cit Haim Malka, hal. 45.

¹³¹ Simon Freeman, *Britain Criticized for Talking to Hamas*, dalam Haim Malka, hal. 45

Apalagi waktu telah membuktikan bahwa perjuangan militer lebih efektif dari pada negoisasi.

3.2.2 Menguatnya Tekanan Eksternal terhadap Hamas

Paska perang dingin semua masyarakat dunia berharap bahwa dunia akan kembali damai, namun kedamaian itu masih dalam impian. Konflik bermunculan dimana-mana tanpa demarkasi yang jelas. Dulu, ketika era perang dingin masih berlangsung, maka pusat-pusat konflik mudah terdeteksi, karena demarkasi atau peta konflik sangat jelas.

Selain demarkasi yang semakin kabur, muncul "musuh" baru dengan muka lama. Musuh baru tersebut adalah terorisme global, yang pada awalnya hanya bersifat lokal, pada saat ini area kerja mereka meluas, mengglobal. Tonggak kemunculan mereka adalah peristiwa *black september*, serangan terhadap *World Trade Center* di Amerika Serikat pada tanggal 9 September 2001 dengan menabrakkan pesawat penumpang pada gedung tersebut. Peristiwa itu memakan korban sampai ribuan orang. Serangan itu, menurut Amerika Serikat, dilakukan oleh *Al-Qaeda*. Sebuah organisasi yang didirikan oleh mantan-mantan mujahiddin Afghanistan.¹³² Sejak saat itu dunia menyadari bahwa musuh baru telah muncul.

Sebagai respon muncullah berbagai usaha *counter terrorism*. Bahkan agar perlawanan berjalan dengan lebih efektif maka dibentuklah payung hukum baru.

¹³² Para Mujahiddin tersebut pada mulanya merupakan didikan Amerika yang dia gunakan untuk melawan Uni Sovyet dalam perang Afghanistan.

Amerika Serikat misalnya, telah mengeluarkan berbagai aturan untuk membatasi ruang gerak para teroris. Berbagai aturan tersebut mengandung tiga hal pokok:

1. Melarang berbagai dukungan dalam bentuk apapun terhadap gerakan teroris
2. Menutup ruang bagi gerakan teroris untuk memperoleh, mengembangkan, serta menggunakan senjata pemusnah massal.
3. Menetapkan setiap kegiatan provokatif untuk melakukan kegiatan teroris adalah tindak kriminal.¹³³

Isu terorisme tersebut membuat posisi Hamas semakin sulit. Citra dan konsistensinya untuk melakukan perlawanan terhadap Israel membuat dia di cap sebagai salah satu gerakan teroris. Pada tahun 1993, pada saat penandatanganan kesepakatan Oslo, Hamas menyatakan bahwa telah melakukan serangan dengan korban 94 orang meninggal dunia. Mulai saat itu pemerintah Federal Amerika Serikat mencoba untuk menghentikan berbagai bantuan yang mengucur ke kantong Hamas dari badan-badan amal yang ada di Amerika. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan.¹³⁴ Pandangan negatif tersebut menjadi prespektif bangsa Eropa dalam memandang organisasi ini. Tentu saja, pandangan itu berdifat distorsif. Karena selama hampir dua dekade Hamas telah mengabdikan dirinya untuk memajukan rakyat Palestina dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi.

Israel tidak juga menyianyiakan kesempatan ini. Secara ekstensif dan sistematis dia mencoba untuk menghancurkan Hamas. Salah satu langkah berani

¹³³ Laura K. Donohue and Juliette N. Kayyem. *The Rise of the Counterterrorist States*, dalam <http://www.esdp.org>. hlm. 3, di akses 17 april 2006.

¹³⁴ *Ibid.* hlm.4

yang telah ia ambil adalah melakukan pembunuhan terhadap pemimpin sentral Hamas; Syeikh Ahmad Yassin dan Abdul ar-Rantisi.

Selain mendapat tekanan bertubi-tubi Hamas juga mendapat tekanan dari wilayah domestik; Pemerintah Palestina. sepanjang tahun 1993 sampai 2000 Hamas dikucilkan dari setiap pengambilan keputusan dan dilarang masuk dalam lembaga pemerintah. Para pemimpinnya di penjara oleh pemerintah Palestina, kadang atas permintaan Amerika dan Israel. Konflik kekerasan sering terjadi antara pendukung Hamas dan Pemerintahan Palestina. Konflik paling brutal terjadi pada bulan November 1994, ketika pendukung Hamas Hamas terlibat baku-hantam dengan polisi Palestina di luar Masjid Palestina di kota Gaza. Peristiwa ini memakan korban, 15 pendukung Hamas meninggal dunia dan 200 lainnya luka-luka.¹³⁵

Berbagai ujian yang menimpa Hamas tersebut tidak lepas dari statusnya sebagai gerakan teroris yang bergerak di bawah tanah. Dengan posisi tersebut, maka Hamas dapat disebut sebagai gerakan yang merusak order, karena sulit dikontrol, akibatnya setiap aksinya bersebrangan dengan kebijakan pemerintah Palestina. Akibatnya, pemerintahan Palestina, sebagai wakil dari rakyat Palestina, merasa punya legetimasi untuk melarang gerakan ini tumbuh dan berkembang. Status ini pun mempersulit upaya Hamas dalam usahanya untuk menggiring opini dunia bahwa berbagai bentuk pertlawanan terhadap Israel, termasuk bom bunuh diri, adalah upaya legal dari pihak yang tertindas.

¹³⁵ Op. Cit. Haim Malka. hlm.42

Keikutsertaan gerakan ini dalam pemilu akan mengubah statusnya sebagai gerakan terlarang menjadi lembaga yang memiliki dasar hukum formal. Sehingga cap sebagai gerakan pengacau dan semacamnya tidak dapat lagi disematkan kepada gerakan ini lagi. Dan eksistensi organisasi akan semakin kokoh, karena telah memiliki legitimasi secara *de jure*. Secara logika akan sangat naif jika pemerintah Israel, Amerika Serikat, dan sekutunya masih menganggap gerakan ini sebagai gerakan teroris dan melakukan tekanan-tekanan represif. Dengan posisi Hamas sebagai wakil rakyat Palestina yang sah, setiap tekanan terhadap gerakan ini menjadi tekanan terhadap seluruh rakyat.

3.2.3 Meningkatnya Populeritas Hamas di Mata Rakyat Palestina

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Birzeit, Ramallah Palestina, menunjukkan adanya peningkatan dukungan rakyat Palestina terhadap Hamas mengalami kenaikan cukup signifikan.¹³⁶ Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5-7 Januari 2006, dua minggu sebelum pemilihan, dengan jumlah responden 1500 orang yang tersebar di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Peneliti menggunakan *margin of error* +3%. Melalui penelitan tersebut terlihat adanya kenaikan dukungan terhadap kelompok v sebesar tujuh poin sejak tahun 2005. Sebaliknya fatah mengalami defisit dukungan sebesar 10 poin. Penurunan dukungan tersebut bukanlah hal yang aneh, karena Fatah mengalami kegagalan serius dalam menjalankan pemerintahan selama satu dasawarsa sejak tahun 1996. Salah satunya kegagalan untuk mewujudkan *order* di wilayah Palestina. Padahal

¹³⁶ <http://home.birzeit.edu/dsp/>, diakses 7 April 2006.

menurut polling yang sama, 98% responden menganggap bahwa anarki (*lawlessness*) yang saat ini terjadi membahayakan Palestina.

Terkait dengan pemilu PLC (*Palestinian Legislative Council*) penelitian ini menunjukkan bahwa Fatah memimpin dengan 35 %, diikuti Hamas dengan 30 %, sementara partai atau kelompok independen lainnya memperoleh dukungan hanya 6%. Yang menarik adalah masih ada 21 % pemilih yang belum menentukan dukungan. Dengan demikian, hasil pertarungan Hamas versus Fatah hanya dapat dilihat kepastiaanya pada saat-saat akhir. Karena dalam polling selisih mereka hanya sekitar 5% saja. Dengan posisi tersebut, Hamas dapat dinilai sebagai pihak yang paling berpeluang untuk keluar sebagai pemenang. Dia memiliki keunggulan karena citranya sebagai pendatang baru yang cukup cemerlang untuk menjadi alternatif utama dalam penyegaran Pemerintahan Otoritas Palestina yang selama ini dinilai tidak efisien dan penuh korupsi. Kecemerlangan tersebut telah mereka buktikan dengan kesuksesan memberantas korupsi di distrik Qauqilya yang mereka menangkan dalam *Municipal Election* (pemilu lokal) pada tahun 2005.¹³⁷ Trend dukungan pemilih terhadap kontestan pemilu selengkapny dapat dilihat dalam tabel berikut.

¹³⁷ <http://www.Ynetnews.com/articles/0.7340.L-3302162.00.html>, diakses 12 Mei 2006.

Tabel 3. Trend Dukungan Pemilih terhadap Kontestan Pemilu Legislatif Palestina 2006.

	Total %	West Bank %	Gaza Strip %
<i>Palestinian National Liberation Movement (Fateh)</i>	35	32	38
<i>Change and Reform (Hamass)</i>	31.3	26.8	38.2
<i>Undecided</i>	21	25.7	13.4
<i>Independent Palestine Barghouthi and Independents)</i>	5.7	6.4	5.1
<i>Badil (DFLP, PPP and Fida coalition)</i>	2.0 – 3.0 1.	3.0 – 4.0	0 – 1.5
<i>Third Way (Independents)</i>	2.0 – 3.0	2.0 – 3.0	2.0 – 3.0
<i>Martyr Abu Ali</i>	2.0 –	2.0 – 3.0	2.0 –

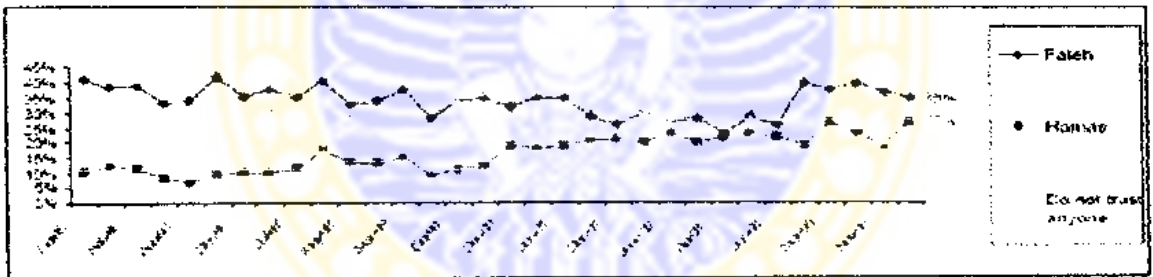
<i>Mustafa (PFLP)</i>	3.0		3.0
-----------------------	-----	--	-----

Sumber: [http://www. Home.berzeit.edu/dsp](http://www.Home.berzeit.edu/dsp), diakses 12 Mei 2006

Keterangan. Tabel diatas menunjukkan trend pemilih untuk daftar pemilihan dengan system proposional yang mencakup 50% dari seluruh jumlah pemilih.

Lembaga penelitian departemen dalam negeri Amerika Serikat telah menyajikan sebuah diagram terkait trend dukungan terhadap Fatah dan Hamas selama satu dekade, dari tahun 1995-2005. Diagram ini dibuat atas dasar data polling sejak tahun 1995. Nampak sangat jelas, bahwa Hamas sejak tahun 1995 mengalami peningkatan dukungan secara progresif. Sebaliknya, Fatah sejak Maret 2005 mengalami kemerosotan popularitas.

Diagram 1. Tren Dukungan Hamas dan Fatah antara 1995-2006



Sumber: <http://www.fas.org/irp/world/para/docs/880818a.htm>, diakses 17 april 2006.

3.2.4 Kemunduran Faksi Fatah

Serangkaian kegagalan Pemerintahan Palestina di tangan Fatah membuat kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap gerakan ini semakin menurun. Seperti yang terlihat dalam diagram 2 diatas. Terlihat dengan jelas bahwa, fatah mengalami defisit kepercayaan. Pada tahun 1995 tingkat kepercayaan rakyat Palestina pada posisi 40% lebih. Namun pada tahun 2006 terjadi defisit

kepercayaan. Pada tahun itu, tingkat kepercayaan rakyat Palestina hanya pada kisaran 35% saja.

Penurunan populeritas Fatah tidak lepas dari serangkaian kebobrokan internal Fatah. Kebobrokan tersebut bersumber dari beberapa faktor. Pertama, ketiadaan suksesi yang membuat kinerja organisasi tidak sehat. Hal ini ditegaskan anggota Parlemen Palestina dari Faksi Fatah sekaligus mantan Menteri Urusan Sipil dan Kepala Keamanan Preventif di Jalur Gaza, Muhammad Dahlan, mengatakan bahwa demokrasi di tubuh Fatah telah lama mati.¹³⁸ Pemilihan pimpinan Fatah terakhir diadakan pada tahun 1989 dan setelah itu tidak ada pemilihan lagi.¹³⁹ Akibatnya golongan muda Fatah yang memiliki potensi tidak memiliki kesempatan untuk melakukan mobilitas struktural untuk melakukan reformasi organisasi untuk menjawab tantangan zaman.

Kedua, perpecahan internal. Sudah maklum bahwa gerakan Fatah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah wafatnya Presiden Arafat pada tahun 2005 (tokoh yang mampu menyatukan berbagai kubu dalam organisasi tersebut). Kedisiplinan organisasi Fatah perlahan menurun karena sejak semula ikatan dalam tubuh Fatah memang sangat lemah dan sangat lentur. Karena dari awalnya Fatah terbentuk dari gerakan dan organisasi beragam ideologi, tidak seperti layaknya partai politik yang memiliki ideologi tertentu dan bentuk organisasi yang jelas. Alih-alih bahu membahu memelihara persatuan gerakan setelah mangkatnya pendiri dan pemimpin gerakan, namun malah mulai terjadi pertengkaran antar

¹³⁸ Disampaikan pada tanggal 31 Maret 2006 dalam sebuah wawancara dengan Kompas.

¹³⁹ <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/03/ln/2553578.htm>, diakses 12 Mei 2006.

tokoh-tokoh pimpinan dan pusat-pusat kekuatan yang berserakan di dalamnya, kondisi ini menandai mulai terjadi konflik yang tajam dan terang-terangan. Konflik ini tidak hanya terpusat pada perbedaan visi, namun juga seputar pembagian posisi dan uang.

Sudah maklum bahwa gerakan Fatah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah wafatnya Presiden Arafat pada tahun 2005 (tokoh yang mampu menyatukan berbagai kubu dalam organisasi tersebut). Kedisiplinan organisasi Fatah perlahan menurun karena sejak semula ikatan dalam tubuh Fatah memang sangat lemah dan sangat lentur. Karena dari awalnya Fatah terbentuk dari gerakan dan organisasi beragam ideologi, tidak seperti layaknya partai politik yang memiliki ideologi tertentu dan bentuk organisasi yang jelas. Alih-alih bahu membahu memelihara persatuan gerakan setelah mangkatnya pendiri dan pemimpin gerakan, namun malah mulai terjadi pertengkarannya antar tokoh-tokoh pimpinan dan pusat-pusat kekuatan yang berserakan di dalamnya, kondisi ini menandai mulai terjadi konflik yang tajam dan terang-terangan. Konflik ini tidak hanya terpusat pada perbedaan visi, namun juga seputar pembagian posisi dan uang.

Menurut Ali El Garbawi, dosen Ilmu Politik dan Manajemen Umum Universitas Beir Zet Palestina, Fatah terpecah dalam tiga golongan.¹⁴⁰ Pusaran pertama berasal dari kelompok para pelaksana di dalam institusi Fatah yang memiliki posisi kuat, yang disimbolkan dengan kelompok "status quo". Secara

¹⁴⁰ Ali El Garbawi, *Pemilu Palestina di Perimpangan Jalan*, dalam <http://www.infopalestina.com/lihatberita.asp?id=7877>, diakses 16 April 2006

umum mereka adalah orang-orang yang sudah berumur. Yang membedakan kelompok ini adalah monopoli mereka selama ini dengan mengambil semua posisi resmi pemerintah serta monopoli mereka terhadap keputusan politik Fatah dan Palestina. Golongan ini diisi tokoh-tokoh lama semisal PM Ahmad Qurei dan Presiden Abbas sendiri.

Poros kedua adalah kelompok yang terdiri dari para pemimpin pergerakan gerakan Fatah yang berasal dari dalam negeri Palestina secara umum. Keistimewaan mereka terletak pada kuatnya ikatan dengan basis Fatah dan rakyat Palestina. Kelompok ini diwakili Dewan Tinggi Pergerakan Gerakan Fatah, sebuah organ tidak resmi di atas bingkai gerakan Fatah dan mereka disegani oleh tokoh-tokoh Fatah. Beberapa waktu lalu kelompok pertama mengakomodari sejumlah pemimpin dari kelompok kedua pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan yang dikuasai gerakan Fatah. Namun kelompok kedua yang telah menyibolkan diri mereka sebagai “kelompok reformis” tetap meminta perluasan keikutsertaan mereka di dalam posisi-posisi kepemimpinan dan dalam pengambilan keputusan di dalam gerakan. Kelompok ini meminta pentingnya redinamika gerakan yang telah kehilangan kekuatan, posisi dan kemanfaatannya..

Golongan kedua diisi para aktivis jalanan yang menggelorakan gerakan Intifada yang kali pertama pecah pada 9 Desember 1987. Tokoh kaum muda yang paling populer saat ini adalah Marwan Barghouti yang tengah dipenjara oleh Israel. Oleh pengadilan Israel, Barghouti dijatuhi hukuman lima kali kehidupan atas dakwaan pembunuhan terhadap beberapa warga Israel di Tepi Barat.. Selain Marwan Barghouti, tokoh yang menonjol di kubu ini adalah Muhammad Dahlan

dan Jibril Rajoub (penasehat Keamanan). Kubu kedua ini menyebut dirinya sebagai Kubu Masa Depan.¹⁴¹

Barghouti belakangan menyatakan keluar dari Fatah dan mendirikan partai baru (Al-Mustaqbal, Partai Masa Depan).¹⁴² Manuver ini jelas akan menggembosi perolehan suara Fatah. Sebenarnya, Barghouti tidak menampik untuk pulang kandang, kembali bergabung dengan Fatah, asalkan Presiden Abbas mengganti daftar calon anggota DPR yang tua-tua dengan sosok-sosok muda yang jujur dan berkompetensi. Tapi sayangnya, permintaannya itu tidak dipenuhi oleh Abbas. Padahal, berdasarkan hasil polling yang dilaporkan BBC News 19 Januari 2006 lalu, kejujuran dan kompetensi kandidat jauh lebih diperhatikan atau diperhitungkan oleh pemilih ketimbang nama besar¹⁴³

Kelompok ketiga – penamaan terhadap mereka sebagai sebuah kelompok hanya bersifat kiasan – mereka terdiri dari orang-orang kuat yang menyebut dirinya sebagai pemimpin di wilayah mereka masing-masing melalui aktivitas-aktivitasnya. Dalam Brigade Martir al-Aqsa. Selama Intifadhah kedua atau sejak akhir September 2000, mereka terlibat persaingan dengan dua kelompok sebelumnya dalam perebutan posisi-posisi pimpinan Fatah. Tindakan tersebut bukan demi kepentingan pribadi mereka semata, namun demi kepentingan basis-basis dan wilayah-wilayah yang termarginalkan oleh Fatah.

¹⁴¹ Kompas, 9 Januari 2005. hlm. 15.

¹⁴² namun Marwan Barghouti akhirnya berubah sikap. Dia mau dicalonkan oleh partai Fatah untuk *national ballot list*. Tetapi partai al-Mustaqbal tidak dibubarkan olehnya dan partai ini tetap ikut dalam Pemilu.

¹⁴³ Chusnan Maghribi, *Pemilu Palestina, Fatah Vs Hamas*, dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/25/cpi03.htm>, diakses 12 Mei 2006

Konflik terang-terangan ketiga kelompok ini telah memunculkan pendaftaran dua daftar calon untuk berebut dalam gelanggang pemilu legislatif.¹⁴⁴ Daftar pertama dari kelompok pertama sedang daftar kedua dari kelompok kedua. Adapun orang-orang kuat dari kelompok ketiga terbagi di antara kedua kelompok tersebut.

Bentuk terakhir kebobrokan Fatah adalah terjangkitnya budaya korupsi dan nepotisme dalam tubuh organisasi. Setelah memegang kekuasaan otoritas Palestina dengan status mayoritas tunggal selama satu dekade, rupanya Fatah tidak mampu menjaga kemurnian gerakannya. Fatah yang dulunya menjadi idola, sebagai pejuang sejati rakyat Palestina untuk merebut kembali hak-haknya yang dirampas oleh Israel, sekarang mereka menjadi benalu yang menghisap rakyatnya sendiri. Kondisi ini selaras dengan adigium Lord Acton, *power ends to corrupt but absolute power corrupt absolutely*.¹⁴⁵

Korupsi di tubuh Pemerintah Palestina tekah terjadi cukup lama. Mending Yaser Arafat mengakui bahwa telah terjadi sejumlah kesalahan yang tidak dapat diterima telah dilakukan institusi kami dan beberapa orang telah menyalah gunakan posisi mereka serta melanggar kepercayaan yang diberikan.¹⁴⁶ Namun anehnya, meski dia menyatakan keprihatinannya akibat kondisi tersebut, Arafat malahan melakukan kesalahan yang cukup fatal. Arafat melakukan tindak nepotisme dengan memilih sepupunya, Moussa Arafat, untuk menjadi Kepala Keamanan Nasional meski dia terlibat kasus Korupsi. Akibatnya muncul reaksi

¹⁴⁴ Ali El Garbawi, Op cit.

¹⁴⁵ Iman Hidajat, *Teori-teori Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 60.

¹⁴⁶ http://search.jawapos.com/index.php?act=detail_s&l_search=otoritas%20palestina%20korupsi%20palestin&id=125100, diakses 17 april 2006.

keras atas kebijakan Arafat tersebut. Brigade Martir Al Aqsa, sayap militer faksi Fatah pimpinan Yasser Arafat, menduduki dan membakar kantor intelijen Palestina di Kota Khan Yunis, Jalur Gaza. Bahkan, Brigade Al Aqsa mengumumkan pembubaran lembaga intelijen tersebut. Massa juga membakar kantor-kantor intelijen militer dan membebaskan tahanan yang disekap di kantor-kantor itu. Dalam aksi tersebut mereka meneriakkan penolakan terhadap pengangkatan Moussa.

Contoh lain tindakan nepotisme Arafat adalah kebijakan pemberian monopoli kepada pembantu dekatnya dalam bidang telekonomikasi. Muhammad Rashid, penasehat Arafat untuk bidang ekonomi dan wakil presidennya, memiliki hak monopoli pengelolaan telekomunikasi. Hak tersebut dijalankan melalui perusahaannya, *the Palestinian Development and Investment Co. (Padico)*. Menurut investigasi *The Financial Times* pada bulan Desember 1998, Rashid terlibat pencurian \$160 juta gaji pegawai negeri wilayah Jalur Gaza yang ditransfer oleh Israel ke rekening Palestina pada tahun 1994. Dana tersebut dikorupsi secara perlahan 1996-1997. Menurut Freih Abu Medein, menteri kehakiman Palestina, dana korupsi tersebut telah diinvestasikan dalam sector telekomunikasi.¹⁴⁷

Di dalam tulisann Issam Abu Issa bertajuk *Arafat's Swiss Bank Account* dengan gamblang menguraikan perihal tindak korupsi yang dilakukan para pejabat PLO¹⁴⁸. Issam menyebutkan, kehidupan para tokoh PLO atau Fatah yang kembali ke Gaza dan Tepi Barat dari tempat pengasingannya di Tunisia berubah total. Mereka berlimpah kekayaan: selain membangun vila-vila seperti di Ramallah

¹⁴⁷ ibid

¹⁴⁸ PLO dalam pandangan public Palestina identik dengan Fatah.

(Tepi Barat) dan Gaza, juga mengirim anak-anak mereka untuk sekolah di luar negeri, terutama Amerika Serikat dan Inggris.¹⁴⁹

Hal itu diperjelas lagi oleh David Horovitz yang menyatakan, "di tingkat nasional, rakyat Palestina melihat para pejabat tinggi Fatah membangun rumah-rumah mewah dan mengoleksi mobil-mobil mewah untuk diri mereka sendiri. Sementara di tingkat lokal, mereka memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga dan kawan-kawannya sendiri."¹⁵⁰

Pada tahun 1997 terungkap data bahwa Pemerintah Otoritas Palestina memperoleh US\$548.727.000 dari berbagai lembaga donor internasional dan mendapat lebih dari US\$800 juta dari penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Israel. Pada akhir tahun itu, ketika Pemerintah otoritas Palestina mengeluarkan laporan tahunan, laporan tersebut menunjukkan bahwa \$323 juta dari anggaran tahunan telah hilang. Ada dugaan bahwa seluruh bantuan tersebut secara personal "bermanfaat" bagi Arafat. Karena penyaluran bantuan melalui rekening Arafat. Meskipun demikian, masyarakat dunia masih menyalurkan donasinya, dengan tujuan untuk "membeli" perdamaian.¹⁵¹

Pengadilan tidak berdaya untuk mengatasi korupsi. Karena kekuasaan mereka dikebiri oleh Arafat. Empat belas satuan polisi bentukan Pemerintah Otoritas Palestina ternyata hanya menjadi kaki tangan Pemerintah Palestina (Arafat), mereka cenderung untuk meninggalkan tugas utama mereka yaitu melakukan penegakan hukum untuk melindungi rakyat Palestina. Menurut Abdul Jawad Saleh, mantan menteri pertanian Palestina yang pernah dipukuli oleh pihak

¹⁴⁹ Op. cit. Chusuan Maghribi

¹⁵⁰ ibid

¹⁵¹ http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_pa_corrupt.php, diakses 2 mei 2006

keamanan akibat kesalahannya memimpin demo anti korupsi, Palestina telah berubah menjadi negara Mafia.¹⁵²

Keengganan Arafat tersebut wajar, karena dia juga terlibat kasus korupsi. Dia terlibat dalam penyalahgunaan dana dalam *The Palestinian Mortgage Housing Corporation* pada tahun 1998 terlibat dalam skandal korupsi. Uni Eropa menemukan bahwa \$20 juta donasinya telah disalahgunakan. Dana tersebut pada mulanya diperuntukkan untuk membangun perumahan sederhana di Jalur Gaza. Namun oleh Arafat, donasi tersebut digunakan untuk membangun perumahan mewah bagi para pendukungnya dari golongan berada.¹⁵³

Akibat berbagai tindakan korupsi tersebut GDP Palestina turun 70%.¹⁵⁴ Karena korupsi membuat kinerja perusahaan menjadi tidak efisien. Pada akhirnya perusahaan akan mengalami stagnasi dan kemunduran, akibat tidak mampu menanggung biaya produksi. Meski korupsi bukan sebab tunggal yang membuat Palestina terjebak dalam krisis ekonomi, namun saham terbesar ada padanya. Sebab lain adalah serangan Israel dan instabilitas internal Palestina karena menguatnya konflik antar faksi.

¹⁵² ibi

¹⁵³ ibid

¹⁵⁴ ibid

BAB IV

STRATEGI HAMAS DALAM PEMILU LEGISLATIF PALESTINA 2006

Dalam bab empat ini dibahas dengan komprehensif strategi Hamas untuk memenangkan pemilu Palestina. Di sini kita dapat melihat inovasi kreatif Hamas dalam usahanya untuk menarik dukungan rakyat Palestina. Kreatifitas Hamas tidak lepas dari keterbatasan Hamas dalam anggaran kampanye. Kekuatan kader dan citra positif yang tersemat padannya menjadi akar dari strategi Hamas melawan Fatah yang kuat secara finansial.

Untuk memudahkan pembasan, bab keempat ini dibagi menjadi lima sub bab. Dalam sub bab pertama dibahas mengenai aktifitas kampanye Hamas. Dalam sub bab ini penulis mendiskripsikan kegiatan dan kreatifitas Hamas dalam berkampanye. Sehingga kita dapat melihat usaha kreatif Hamas untuk menarik dukungan rakyat Palestina.

Dalam sub bab kedua dibahas taktik Hamas memenangkan *distric ballot*. Hal ini penting untuk dibahas, karena kemenangan Hamas dalam sistem tersebut telah menempatkan Hamas sebagai penguasa mayoritas kursi Parlemen.

Selanjutnya sub bab ke tiga membahas *strategic issues* Hamas dalam pemilu legislatif Palestina 2006. Isu kampanye menjadi salah satu penentu kemenangan. Karena dengan menyusung isu yang pas, maka sebuah partai akan lebih mudah untuk menarik dukungan massa pemilih.

Pada sub bab keempat di bahas instrumen atau sarana utama Hamas untuk mendulang dukungan. Pada sub bab ini difokuskan untuk mengeksplorasi

instrumen utama Hamas untuk manggalang dukungan. jadi yang kami bahas adalah instrumen vital yang menjadi kesuksesan Hamas untuk memenangkan Pemilu.

Dalam sub bab terakhir dibahas mengenai dukungan atau campur tangan eksternal dalam pemilu kali ini dan bagaimana isu tersebut dimanfaatkan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan yang terindikasi menerima bantuan. Palestina telah lama menjadi perhatian dunia. Berbagai kepentingan membaaur saling berkompetisi untuk meraih keuntungan. Sewajarnya bila pihak yang selama aktif dalam pusaran konflik Palestina-Israel mencoba unrtuk mengail keuntungan dalam perhelatan pesta demokrasi yang kedua ini.

4.1 Aktifitas Kampanye Hamas untuk Menarik Konstituen

Dalam masa kampanye¹⁵⁵ Hamas melakukan berbagai aktifitas untuk menarik dukungan massa pemilih. *Campaign are inherently persuasive communication activities*¹⁵⁶. Sehingga kampanye selalu diseting untuk mempengaruhi orang lain agar menerima dan mendukung sebuah gagasan atau kandidat. Apalagi dalam kampanye politik, dukungan suara menjadi ukuran kemenangan. Wajar bila dalam masa kampanye Hamas melakukan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan simpati dan berlanjut pada dukungan riil pada saat waktu pemungutan suara.

¹⁵⁵ Menurut Rogers dan Storey (1987) definisi kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu dalam Antar Venus, Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2004), hlm 7. Jadi kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga, terarah dan memiliki tujuan tertentu.

¹⁵⁶ Pfau dan Parot (1993) dalam ibid hlm. 29

Secara teoritis efek kampanye selalu terkait dengan '3A' (*awareness, attitude dan action*).¹⁵⁷ Sehingga tujuan awal dari kampanye yang paling dasar adalah sosialisai agar masyarakat Palestina mengetahui dengan benar mengenai partai atau pun calon yang diajukan partai tersebut. Tujuan selanjutnya adalah untuk merubah *attitude* atau sikap pemilih. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut akan menumbuhkan rasa simpati, rasa suka, dan keberpihakan masyarakat pada partai dan calon partai. Setelah terbangun keberpihakan diharapkan di hari pemungutan suara, mereka memilih partai dan calon tersebut. Dengan mempertimbangkan efek kampanye tersebut, maka dibuat berbagai kegiatan kampanye agar mencapai tahapan terakhir, yaitu obyek bertindak sesuai dengan yang kita inginkan.

4.1.1 Pemasangan Atribut Partai

Dalam masa kampanye Hamas melakukan berbagai kegiatan kampanye untuk mempromosikan partai dan para kandidat. Pada tahap awal mereka melakukan posterisasi dan pemasangan berbagai umbul-umbul di seluruh pelosok wilayah Palestina. Poster-poster tersebut berisi informasi secara garis besar mengenai partai, tawaran program (*platform*) dan kandidat. Agar dapat mencuri perhatian khalayak poster-poster tersebut dibuat semenarik mungkin dan membawa ciri khas yang kental mengenai identitas partai. Misalnya poster Hamas dibuat dengan warna dasar hijau. Warna hijau memang identik dengan Hamas. Karena bendera dan lambang partai dominan warna hijau. Dengan kekhasan

¹⁵⁷ lihat kerangka teori hlm.21

tersebut diharapkan dalam satu kerlingan saja orang sudah bisa mengetahui siapa pemasang poster tersebut. Karena poster adalah media kampanye yang bersifat pasif. Maka akses terhadapnya harus lah sangat mudah bagi khalayak. Sehingga poster akan dipasang pada tempat-tempat dimana orang biasanya mengakses tempat tersebut, misalnya diperempatan jalan.

4.1.2 Kampanye di Media Massa

Selain menggunakan media yang bersifat pasif, maka Hamas menggunakan media yang langsung menyentuh publik. Mereka menggunakan berbagai jenis media massa untuk menyampaikan persuasi politiknya. Biasanya mereka memasang iklan politik. Selain cara tersebut, mereka mencoba untuk menarik media untuk melakukan peliputan mengenai partai. Sehingga mereka mendapat iklan gratis melalui segmen pemberitaan. Untuk iklan politik, Hamas menggunakan media yang ia miliki. Hamas memiliki koran, radio, televisi al-aqsa yang baru diperkenalkan.¹⁵⁸ Selain itu Hamas melakukan kampanye via SMS dan e-mail.¹⁵⁹ Mereka juga membuat website yang berisi pesan-pesan kampanye dan edukasi mengenai sistem pemilu yang baru. Salah satu website menampilkan pandangan syariah Islam mengenai pemilu. Hamas menerangkan bahwa terlibat dalam dalam rangkaian pemilu tidak bertentangan dengan Islam.¹⁶⁰ Penjelasan ini penting untuk disampaikan agar pemilih yang saleh (taat beragama) tidak

¹⁵⁸ Selain TV al-Aqsa, HAMAS memiliki radio *Sawt al-Aqsa*, majalah Falistine Al-muslimah, dan koran ar-Risala

¹⁵⁹ <http://www.adln.uhr.ac.id/2006/778/it-2.htm>, diakses 10 Desember 2006

¹⁶⁰ Ibid

memiliki keraguan untuk menggunakan hak pilihnya¹⁶¹. Tipe pemilih tersebut merupakan lumbung suara bagi Hamas yang tercitra sebagai satu-satunya partai Islam.

4.1.3 Pawai dan Orasi Terbuka

Kegiatan lain yang Fatah dan Hamas lakukan selama kampanye adalah melakukan *rally* dan orasi terbuka. Kedua kontestan tersebut mengerahkan ribuan simpatisannya untuk berpawai di jalan-jalan utama dengan membawa atribut partai, seperti bendera, foto para kandidat, spanduk dan lain-lain. Selama berpawai mereka meneriakkan pesan-pesan kampanye yang pada intinya meminta dukungan masyarakat Palestina.¹⁶² Melalui kegiatan inilah Pemilu dapat dilihat sebagai sebuah pesta demokrasi. Dengan instrumen ini massa dapat dilibatkan secara langsung baik secara emosional dan fisik. Pawai penting untuk dilakukan karena dapat menunjukkan keberadaan partai. Jika massa partai terlihat besar dan tampil simpatik oleh masyarakat yang kita lalui di jalanan sekitar mereka, maka mereka akan menghargai kita sebagai partai besar, dan mungkin akan mereka pertimbangkan untuk dipilih.¹⁶³

Kegiatan kampanye selain pawai yang mengerahkan banyak massa adalah orasi terbuka. Massa dikonsentrasikan ditempat-tempat dimana bisa menampung banyak orang. Biasanya sambil menuju titik pertemuan massa melakukan pawai

¹⁶¹ ada faksi Islam di Palestina, salah satunya *Islamic Jihad*, yang menilai Pemilu bertentangan dengan Islam. Sehingga hukumnya haram bagi setiap muslim terlibat dalam proses tersebut. Mereka melihat pemilu sebagai produk Barat dan menjadi antitesa bagi penegakan syariah Islam. Karena dalam demokrasi hukum positif menggantikan hukum Islam.

¹⁶² Sumber: http://electronicinfotaja.net/artman/uploads/bussicet483_001.jpg, diakses 10 Desember 2006.

¹⁶³ Almuzzamil Yusuf, *Manajemen Kampanye Nasional dalam Majalah Saksi No.8 Tahun VI, 18 Februari 2004.*

di sepanjang jalan yang mengarah ketempat pertemuan. Di tempat tersebut para petinggi partai dan kandidat calon melakukan orasi yang terkait dengan pesan-pesan kampanye.

Orasi terbuka diadakan oleh kontestan pemilu untuk mengukuhkan semangat para pengurus, kader dan simpatisan yang ikut serta dalam usaha pemenangan Pemilu.¹⁶⁴ Penjagaan semangat penting untuk menjaga stabilitas dan akselerasi gerakan. Pemenangan Pemilu merupakan sebuah usaha kolektif, sehingga setiap kemandekan di salah satu bagian tim sukses akan mempengaruhi bagian yang lain. Jadi sangat penting bagi kontestan pemilu untuk menjaga irama semangat seluruh anggota tim suksesnya agar berada pada level yang sama.

4.1.4 Debat Publik

Untuk meraih dukungan masa intelektual yang kritis Hamas melakukan debat publik dengan kontestan lainnya. Ini bagus untuk meyakinkan kalangan terdidik, tapi tidak untuk akar massa akar rumput.¹⁶⁵ Salah satu debat yang dijalani oleh Hamas adalah debat versus Fatah. Dalam debate itu Hamas diwakili oleh Mahmoud Al-Zahar dan wakil dari Fatah adalah Muhammad Dahlan (*Palestinian Authority Minister of Civil Affairs*). Debat publik tersebut disiarkan secara langsung oleh *the Lebanese TV station LBC* pada tanggal 22 Januari 2006.¹⁶⁶

Dalam prosesi debat itu kedua belah pihak mencoba melakukan manuver-manuver untuk menjatuhkan citra lawan. Hamas mengkritik tindakan koruptif dan

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ <http://www.freemuslims.org/news/article.php?article=1253>, diakses Desember 2006.

sikap Fatah yang terlalu kooperatif dengan Israel. Sebaliknya Fatah menyerang Hamas atas sikapnya yang terlalu frontal. Sikap tersebut dalam pandangan Fatah sangat berbahaya bagi rakyat Palestina. Selama ini rakyat Palestina mengalami ketergantungan Ekonomi terhadap Israel.¹⁶⁷

4.1.5 Memanfaatkan Kharisma Tokoh

Selain dalam bentuk komunikasi langsung, Hamas menggunakan bahasa simbolik untuk menarik dukungan massa. Hamas menggunakan simbol ketokohan dan pengaruh mending Syeikh Ahmad Yasin.¹⁶⁸ Dalam kampanye tokoh tersebut selalu hadir dalam bentuk foto tunggal atau menjadi latar foto para kandidat dalam berbagai poster atau alat peraga kampanye lainnya. Dengan cara seperti itu Hamas seakan ingin mengatakan kepada para konstituennya, bahwa mereka adalah pewaris sesungguhnya dari gerakan dua tokoh tersebut. Dengan cara ini mereka berharap dapat menarik dukungan suara dari setiap orang yang menjadi pengagum tokoh tersebut.

Rival utama Hamas juga mengambil langkah yang sama. Mereka memanfaatkan pengaruh mending Yaser Arafat. Seperti Hamas, Foto mending Yaser Arafat selalu tampil dalam berbagai atribut Partai Fatah. Strategi ini pernah dilakukan di Indonesia. Salah satu partai besar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memanfaatkan kharisma Presiden Soekarno untuk menarik para pengagumnya

¹⁶⁷ *ibid*

¹⁶⁸ *Op.cit.* <http://electronicintifada.net/>

4.1.6 *Door to door Campaign: Special Hamas' direct selling method*

Hamas menjadi satu-satunya kontestan pemilu yang melakukan *direct selling*; secara langsung mendatangi tiap rumah untuk menawarkan program-program Hamas dan melakukan persuasi secara individu terhadap konstituen. Model kampanye ini layaknya metode seorang sales yang menawarkan barang dari rumah ke rumah. Untuk menjalankan metode ini dibutuhkan tenaga sukarela yang cukup besar. Untuk daerah Gaza, Hamas telah menyiapkan 10.000 orang sukarelawan.¹⁶⁹ kegiatan ini efektif menyerbu ke basis-basis eksternal yang belum menjadi pendukung partai. Selain itu sangat sangat fleksibel dilakukan kapanpun dan dimanapun.¹⁷⁰

Metode ini sangat efektif untuk membangun kedekatan dengan konstituen. Karena para sukarelawan langsung dapat berbicara empat mata dengan konstituen. Dengan cara ini pula Hamas dapat menggait suara ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki waktu cukup banyak untuk mengakses informasi. Untuk mendekati ibu-ibu rumah tangga tersebut Hamas mengerakkan kader-kader perempuannya. Selain menawarkan partai, para sukarelawan juga melakukan *voter education* terkait dengan sistem pemilu. Selain efektifitas membangun kedekatan dengan publik, metode ini sangat berguna untuk melihat dukungan riil masyarakat terhadap partai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghitung hasil persuasi dari masing-masing sukarelawan.

Selain *direct selling* terhadap individu, Hamas juga melakukan *direct selling* terhadap komunitas individu. Salah satunya melalui *diwan* (semacam

¹⁶⁹ <http://week.khazanah.com/2006/11/27/112.htm>, diakses 10 Desember 2006.

¹⁷⁰ Op. cit. Almuzamil Yusuf

forum pengajian di Indonesia). Salah satu contohnya adalah *diwan Al-Jamal Family* di Shujyah, kota Gaza. Dalam *diwan* tersebut terjadi tanya jawab seputar platform Hamas. Konstituen menanyakan apakah Hamas akan melanjutkan perlawanan terhadap Israel setelah menasbihkan dirinya sebagai partai politik. Siyam, sukarelawan Hamas, menegaskan bahwa keikutsertaan Hamas dalam pemilu adalah untuk menjaga kelangsungan perlawanan, pasokan senjata dan membuat perlawanan memiliki dasar legitimasi yang lebih kuat. Inilah yang membuat Eropa menghujat. Hamas berpolitik dengan senjata ditangan.¹⁷¹ Dengan pembicaraan yang terbuka dan panjang lebar tersebut maka berbagai bias dan keraguan masyarakat terhadap Hamas dapat diminimalisir..

Fatah melakukan antisipasi untuk membendung sepak terjang Hamas yang agresif tersebut. Dia menghembuskan kampanye negatif terkait dengan *direct selling* Hamas. Basma al-Ghalayini, warga kota Gaza, mengaku didatangi seorang perempuan yang mengaku sebagai panitia Pemilu. Perempuan tersebut meminta dia untuk tidak memilih Hamas. Karena jika Hamas berkuasa dia akan melarang pesta pernikahan dan melemparkan cairan asam ke wajahnya jika dia tidak berpakaian dengan benar (berjilbab). Fatah ingin agar citra Hamas yang moderat berubah menjadi radikal di mata rakyat Palestina. Dia ingin mengarahkan opini publik bahwa Hamas akan meniru pola Taliban jika berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilu. Fatah juga menyebarkan selebaran yang isinya menjatuhkan citra Hamas. Samiral al-Qadi, kandidat Hamas, menilai serangan ini sebagai wujud amoralitas Fatah.¹⁷²

¹⁷¹ ibid

¹⁷² <http://english.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=18067>, diakses 6 Desember 2006.

4.2 Taktik Hamas dalam Memenangkan *District Ballot*.

Dalam *district ballot* Hamas menggunakan taktik khusus agar mendapat kursi yang banyak. Taktik pertama, Hamas memasang calon-calon yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, agar para pemilih tertarik. Karena dalam sistem ini pemilih langsung memilih nama calon. Sehingga para kandidat yang diusung oleh Hamas merupakan hasil seleksi yang cukup ketat. Mereka harus *well educated* dan bersih dari korupsi. Sebaliknya Fatah memasang figur-figur yang kurang populer dan diragukan integritasnya karena menjadi bagian dari sistem yang korup.¹⁷³

Taktik kedua, Hamas sangat berhati-hati dalam menentukan jumlah calon tiap distrik. Jumlah calon disesuaikan dengan prediksi dukungan suara dari tiap distrik. Karena pemenang ditentukan melalui sistem ranking. Maka semakin sedikit calon akan semakin menguntungkan; diaspora suara dapat dihindari. Fatah mengalami kesulitan untuk mengurangi jumlah calonnya di tiap distrik. Karena dalam tubuhnya terjadi persaingan antar anggotanya untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Ditambah lagi sebagian suara mereka harus rela beralih kepada 120 *independents Fatah (former prominent members of the party who were using their political authority to attempt to win election on their own account)*.¹⁷⁴

Tidak heran dalam *district ballot* Hamas dapat menang dengan meyakinkan. Dari 66 kursi yang diperebutkan, Hamas memperoleh 45 kursi. Perolehan tersebut merupakan dua per tiga dari kursi yang ada. Perolehan kursi itu

¹⁷³ <http://www.opendemocracy.net/debates/article.jsp?id=2&debateId=97&articleId=3223>, diakses 10 Desember 2006.

¹⁷⁴ *Ibid.*

sungguh fantastis karena bila dihitung secara kumulatif suara Hamas dan Fatah tidak terpaut jauh. Hamas secara kumulatif memperoleh 440.000 suara dan Fatah 403.000 suara.¹⁷⁵

Dalam distrik tertentu perolehan suara Fatah jauh di atas Hamas, namun Fatah tidak mendapatkan satupun kursi. Meski secara kumulatif perolehan suara Fatah lebih besar dari Hamas, tetapi Fatah memasang lebih banyak kandidat. Sehingga bila dihitung perolehan suara per kandidat, kandidat Fatah tertinggal tertinggal jauh dari kandidat yang lain. Semisal di Distrik Tulkarem yang menyediakan tiga kursi, secara akumulatif perolehan suara Fatah jauh di atas Hamas, terpaut 20,2 % suara. Fatah memperoleh 50.979 dan Hamas memperoleh 40.679. Meskipun secara kumulatif Fatah memimpin dalam perolehan suara, tetapi dia tidak memperoleh satupun kursi. Sebaliknya Hamas memperoleh dua kursi. Hal ini bisa terjadi karena Fatah memasang kandidat lebih banyak dari Hamas; Fatah memasang tiga kandidat sedangkan Hamas hanya dua kandidat. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4 berikut.

¹⁷⁵ http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-02/04/content_517078.htm, diakses 10 Desember 2006.

Tabel 4. Distribusi Suara *District Ballot* untuk Distrik Tulkarem.

Electoral district: Tulkarem		District No. : 03	No. of candidates : 17	
Total No. of seats : 3				
No.	Candidate	Political affiliation	No. of votes	Remarks
1	HASAN NURESHI	Independent	21.179	Successful Candidate
2	ABDERRAHMAN ZAIDAN	Change and Reform	20.407	Successful Candidate
3	PIYAD RADDAD	Change and Reform	20.272	Successful Candidate
4	ERAHM HRAJH	Fatah movement	17.723	
5	MUSTAFA DERAWEYH	Fatah movement	17.369	
6	ADNAN DAMIR	Fatah movement	15.887	
7	NADA HAZITI	Independent	6.072	
8	ALLAM HAYDALLAH	The Popular Front for the Liberation of Palestine	5.850	
9	DOCTOR SHAWQ SAEBA	Independent	5.504	
10	MOHAMMAD BLADE	Independent	3.964	
11	JAHEF ARRAC	Independent	3.121	
12	ABDELRAHEEM KETTAN	Independent	2.919	
13	MOHAMMED AWAD	Independent	2.447	
14	MOHAMED ASH FABO	Independent	2.165	
15	MOHAMMED DAG	Independent	1.972	
16	MUSABEE HAYDON	Independent	1.091	
17	BAEED SHKID	Independent	420	

Sumber: www.election.ps.gov, diakses 6 Desember 2006.

4.3 *Strategic Issues*: Hamas Fokus pada Isu Anti korupsi dan Resistensi

Sebelum masa kampanye ada beberapa survei mengenai perilaku memilih salah satunya dilakukan oleh *The Office of Research United States*. Survei perilaku memilih dilakukan oleh *The Office of Research United States* di wilayah otoritas Palestina menunjukkan adanya persaingan ketat antara Hamas dan Fatah. Menurut survei tersebut 32% pemilih akan menjatuhkan pilihannya kepada partai Fatah dan 30% kepada Hamas. Korupsi menjadi isu utama yang menjadi perhatian public Palestina. Hamas dipandang sebagai partai yang paling memenuhi kualifikasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebaliknya Hamas dipandang memiliki kemampuan dibawah Fatah untuk membawa upaya damai pada level yang lebih tinggi. Menurut survei itu pula, mayoritas pendukung Fatah dan Hamas

mendukung kelanjutan gencatan senjata, dialog dengan Israel, dan solusi dua Negara (*two-state solution*).¹⁷⁶

Survei dilakukan pada tanggal 13-15 Januari 2006, hasilnya delapan dari sepuluh dari warga yang memiliki hak pilih akan menggunakan haknya. Survei dilakukan dengan system sampling dengan 1000 responden representatif dengan penyebaran 54% di Tepi Barat, 36% di Jalur Gaza, dan 10% di Yerusalem Timur. Toleransi kesalahan dalam kisaran 4%.¹⁷⁷ Dari hasil survei dapat dilihat pola afiliasi politik sementara. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel 5 berikut.

Tabel 5. Distribusi Dukungan sesuai Hasil Survei *Office of Research United States*

Table 1. "Who are you going to vote for on the National Ballot in the upcoming legislative elections?"
(among likely voters)

	Total	West Bank	Gaza	Jerusalem	Likely PLC Seats
The Alternative	6%	8%	3%	12%	4
Independent Palestine (Mustafa Bhargouti)	13	15	7	14	3
Martyr Abu Aji Mustafa	8	8	8	7	5
Martyr Abu al-Abbas	1	2	0	5	0*
Freedom and Social Justice	1	0	2	2	0*
Change and Reform (Hamas)	30	27	36	23	22
National Coalition for Justice and Democracy	1	1	1	3	0*
The Third Road (Salem Fayed)	3	3	4	2	2
Freedom and Independence	1	1	1	2	0*
Justice for Palestine	0	0	0	0	0
Fatah movement	32	30	37	29	24
Don't know/ No answer	3	5	2	2	TOTAL: 88

*Due to a 2% threshold these parties will not likely receive seats

Sumber: <http://ipc.state.gov/documents/organization/62834.pdf>, diakses 17 April 2006.

Untuk *distric ballot* yang memperebutkan kursi yang sama dengan *national ballot* menunjukkan tren yang berbeda. Menurut Khalil Shikaki dari empat puluh kursi akan terdistribusi cukup ketat antara Hamas dan Fatah; Hamas memperoleh 19 kursi (48%), yang berafiliasi dengan Fatah 18 kursi (45%), dan 3

¹⁷⁶ <http://ipc.state.gov/documents/organization/62834.pdf>, diakses 17 April 2006.

¹⁷⁷ *ibid*

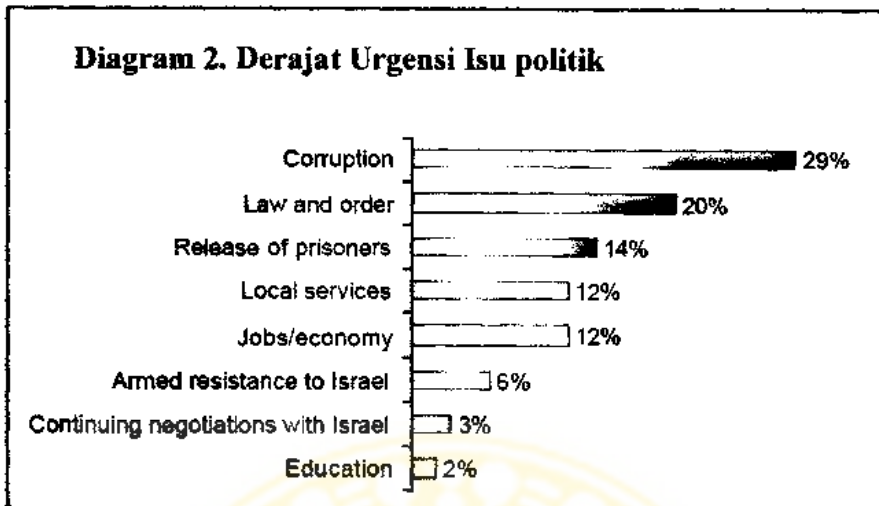
kursi (7%) dari independent. Perhitungan tersebut merupakan hasil survei yang dia lakukan pada tanggal 29-31 Desember 2006.¹⁷⁸

The Office of Research United States menemukan bahwa sekitar 22% dari pemilih akan mengubah pilihannya di detik-detik terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan sengit antara Fatah dan Hamas akan berlangsung sampai pada detik-detik terakhir pencoblosan. Dari jumlah tersebut ada 17% yang akan memilih Hamas, 15% akan memilih *Independent* dan 10% akan memilih Fatah.¹⁷⁹ Ini berarti para kontestan pemilu harus memikirkan strategi yang jitu untuk menarik suara mengambang tersebut, termasuk menentukan isu kampanye yang disesuaikan dengan kapasitasnya dan keinginan publik.

Mengenai isu kampanye, menurut *The Office of Research United States* hampir sepertiga pemilih (29%) menganggap korupsi sebagai isu yang paling penting dalam pemilu mendatang. Selanjutnya diikuti oleh isu tentang penegakan hukum dan ketertiban (20%), pelepasan tahanan Palestina dari Israel (14%) dan penyediaan pekerjaan dan peningkatan kondisi ekonomi sekitar 12%. Untuk lebih jelasnya lihat diagram 2 berikut.

¹⁷⁸ ibid

¹⁷⁹ ibid

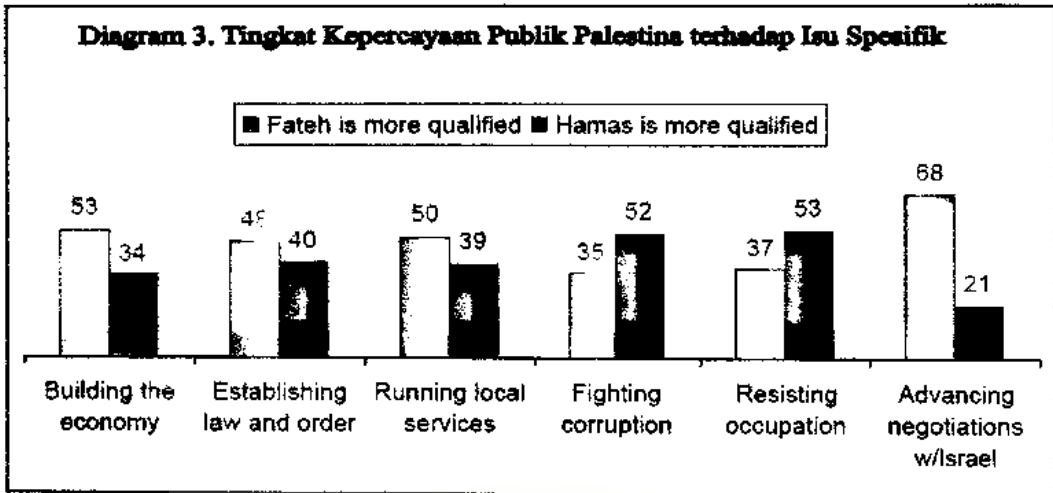


Sumber: <http://fpc.state.gov/documents/organization/62834.pdf>, diakses 17 April 2006.

Sesuai dengan keyakinan public tersebut, reputasi sebagai golongan yang bersih dari korupsi merupakan kriteria utama untuk menilai para kandidat. (34%), pengalaman dalam sektor ekonomi (13%), kemampuan akademis (12%) dan memiliki sejarah melancarkan perlawanan terhadap Israel (10%).¹⁸⁰

Dari hasil penelitian itu pula dapat dilihat komparasi kekuatan Fatah versus Hamas dalam penguasaan isu. Fatah lebih dipercaya untuk mewujudkan penegakan hukum dan ketertiban, revitalisasi sektor ekonomi dan menjalankan *local services* dan membawa negoisasi dengan Israel pada level yang lebih tinggi. Sebaliknya Hamas dianggap sebagai partai yang paling mapan untuk melakukan perlawanan dan partai yang siap membersihkan korupsi dari tubuh birokrasi otoritas Palestina. Untuk lebih jelasnya lihat digram 3 berikut.

¹⁸⁰ *ibid*



Sumber: <http://fpc.state.gov/documents/organization/62834.pdf>, diakses 17 April 2006.

Dalam Pemilu Legislatif 2006 Hamas mengusung Platform yang terdiri dari:

1. Mengakhiri okupasi Israel dan mendirikan negara Palestina yang berdaulat dengan Ibukotanya Yerusalem.
2. Memiliki komitmen untuk mengembalikan warga Palestina yang berada di Pengasingan.
3. Segala bentuk perlawanan adalah sah demi untuk mengakhiri okupasi Israel dan mengembalikan integritas nasional bangsa Palestina.
4. Reformasi birokrasi Otoritas Palestina atas dasar prinsip demokrasi, keadilan, penegakan hukum, pluralisme politik serta prinsip pembagian otoritas dan perlindungan hak asasi manusia serta penghormatan atas hak individu.
5. Merupakan hak pemerintah untuk meninjau ulang kesepakatan antara otoritas Palestina dan Israel dengan kacamata hukum Internasional dan mempertimbangkan hak-hak rakyat Palestina.

6. Pemerintah Otoritas Palestina akan menjaga kemerdekaan rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan akan membela kedaulatan dalam makna tersebut.
7. Pemerintah Otoritas Palestina akan menekankan solusi dalam kerangka bangsa Arab dan Islam dan akan menggalang dukungan bangsa Arab dan Islam untuk mendukung rakyat Palestina dalam setiap sektor kehidupan.
8. Pemerintah Otoritas Palestina akan menjaga hubungan baik atas dasar saling menghormati dengan negara-negara Arab dan negara muslim lainnya, serta negara lain di dunia.
9. Secara prinsip kita telah siap untuk melanjutkan *the calm* (gencatan senjata), untuk mencapai kepentingan nasional Palestina. Dan *the calm* tidak berarti menghilangkan hak untuk melawan dan membalas tindakan keji Israel. *The calm* merupakan salah satu jalan untuk mengakhiri okupasi Israel dan pelepasan warga Palestina dari penjara-penjara Israel.¹⁸¹

Sesuai dengan ekspektasi publik Palestina maka Hamas menempatkan reformasi birokrasi dan perlawanan terhadap Israel sebagai fokus isu kampanye. Dalam usaha reformasi birokrasi, Hamas akan melakukan pembersihan tindakan korupsi dan nepotisme yang selama ini telah menjamur dalam tubuh birokrasi Palestina. Tindakan tidak terpuji tersebut mewarnai birokrasi Otoritas Palestina selama pemerintahan Fatah.

Resistensi atau perlawanan menjadi isu utama kedua yang Hamas tawarkan. Hamas dipercaya publik sebagai faksi yang paling memenuhi

¹⁸¹ <http://lawofnations.blogspot.com/2006/01/HAMAS-party-platform.html>, diakses 13 Juni 2006.

kualifikasi untuk mengemban amanah perlawanan sampai pada tujuan akhirnya. Ditegaskan oleh Khaled Mis'al, tujuan perjuangan Hamas adalah mewujudkan kemerdekaan Palestina dengan wilayah yang membentang dari Dataran Tinggi Golan menyambung sampai ke Laut Tengah.

Agar masyarakat Palestina mampu memahami dan mengingat substansi platformnya dengan mudah, maka Hamas menyingkat platform tersebut dalam sebuah slogan. Slogan itu berbunyi "*One hand builds, the other hand fights.*"¹⁸² Dengan slogan tersebut Hamas ingin meyakinkan publik Palestina bahwa mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk menyanggah perlawanan terhadap okupasi Israel dan melakukan reformasi internal Palestina. Slogan tersebut merupakan realita sehari-hari Hamas. Selain terkenal sebagai faksi yang gigih untuk melakukan perlawanan terhadap Israel. Hamas juga rajin melakukan berbagai kegiatan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat Palestina.

Dengan posisi poling yang menempatkan Fatah sebagai faksi yang paling memenuhi kualifikasi untuk mewujudkan penegakan hukum dan ketertiban, revitalisasi sektor ekonomi dan menjalankan *local services* dan membawa negosiasi dengan Israel pada level yang lebih tinggi, maka Fatah menegaskan kepercayaan tersebut dalam janji-janji kampanyenya. Fatah juga ingin menggunakan kepercayaan masyarakat Palestina tersebut sebagai instrumen untuk meraih kemenangan. Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Fatah berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai problem rakyat Palestina yang sudah ia mulai sejak menjabat sebagai Presiden menggantikan Yaser Arafat. Mengenai

¹⁸² http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2006/01/21/islamist_women_redraw_palestinian_debate_on_rights/?page=2, diakses 10 Desember 2006.

konflik dengan Israel, Fatah berkomitmen untuk meneruskan jalan damai yang telah dia tempuh sejak akhir Intifada pertama.¹⁸³

Dalam masa kampanye, Fatah mengusung slogan "*guardian of the national project.*" Slogan tersebut menunjukkan komitmen Fatah untuk menyelesaikan berbagai masalah rakyat Palestina yang telah dimulai sejak masa Arafat sampai pemerintahan Abbas saat ini. Oleh karena itu, Fatah meminta kepada rakyat Palestina untuk memberinya kesempatan kedua, agar agenda-agenda yang sudah setengah jalan tersebut dapat diselesaikan. Mereka menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada rakyat jika terpilih atau menjadi pemenang dalam pemilu kali ini.¹⁸⁴ Namun kepercayaan rakyat ternyata sudah menipis. Rakyat menginginkan adanya perubahan rezim untuk mengatasi kemunduran kondisi kehidupan rakyat Palestina. Rakyat kelihatannya sudah bosan dengan Fatah yang selama ini tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bagaimana mereka bisa menjanjikan perubahan kalau mereka adalah bagian dari persoalan.¹⁸⁵ Hal tersebut ditunjukkan dengan survei, dari sekitar 22% suara mengambang yang masih menentukan pilihannya di detik-detik terakhir hanya 10% yang mempertimbangkan Fatah menjadi pilihannya. Sebaliknya rival utama mereka (Hamas) akan mendapat dukungan 17%. Sehingga pada pemilu legislatif kali ini, wajar bila Fatah harus mengakui kemenangan Hamas.

¹⁸³ <http://www.mideastweb.org/log/archives/00000430.htm>, diakses 10 Desember 2006.

¹⁸⁴ *ibid*

¹⁸⁵ Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pejabat Fatah yang terlibat korupsi dan Nepotisme, termasuk mendiang Yasser Arafat.

4.4 Instrumen Utama Pendulang Suara Hamas

4.4.1 Kader Perempuan: Ujung Tombak Hamas dalam Pemilu

Kemenangan Hamas dalam Pemilu Legislatif Palestina 2006 tidak lepas dari kiprah kader dan simpatisan perempuannya. Kader perempuan merupakan bagian penting bagi Hamas. Hamas memiliki prespektif berbeda dengan gerakan Islam lain yang dikenal radikal, semisal Taliban, dalam memperlakukan perempuan. Hamas menganggap kader perempuan menjadi salah satu bagian vital organisasi. Sehingga Hamas menjalankan berbagai program untuk memberdayakan para kader perempuannya bersama dengan perempuan Palestina umumnya.¹⁸⁶

Tidak seperti Taliban di Afganistan, Hamas tidak melarang perempuan untuk bekerja atau pun untuk mendapat edukasi. Banyak anggota dan para simpatisan perempuan Hamas adalah golongan profesional semisal dokter, pengacara, guru dan pekerja social. Hamas tidak hanya menyediakan pelatihan kerja bagi perempuan, lebih dari itu dia juga memberikan bantuan finansial terhadap perempuan Palestina agar bisa mendapat pendidikan agama Islam dan pendidikan tinggi di tingkat Universitas.¹⁸⁷

Peranan perempuan Palestina dalam dunia publik sudah dimulai sejak 1987. Pada waktu itu perempuan menjadi garda depan dalam kampanye untuk menyerukan pemboikotan produk Israel di daerah pendudukan Palestina. Dalam Intifada pertama tersebut, mereka juga berjuang untuk membuka kembali sekolah-sekolah yang telah ditutup secara paksa oleh Israel. Menurut Hanadi Loubani,

¹⁸⁶ Penjelasan selengkapnya lihat bab dua halaman 30.

¹⁸⁷ Kim Bullimore, *Palestine: Women, the occupation and HAMAS*, dalam <http://www.greenleft.org.au/back/2006/659/659p14b.htm>, diakses 2 Mei 2006.

pendiri *British Women for Palestine*, perempuan Palestina mendirikan sekolah-sekolah bawah tanah (rahasia) dan sangat aktif dalam perlawanan jalanan terhadap tentara pendudukan Israel.¹⁸⁸

Dalam Pemilu Legislatif Palestina 2006, perempuan diistimewakan dengan mendapat jatah perwakilan di Parlemen sebanyak 30 kursi (20% dari jumlah kursi di Parlemen) untuk menjamin adanya proporsionalitas antara jumlah anggota perempuan dan pria. Dari 30 kursi tersebut, Hamas mampu meraih 6 kursi. Dengan sistem quota tersebut, maka Hamas cukup diuntungkan. Citranya sebagai organisasi yang telah banyak memberi berbagai bantuan terhadap perempuan Palestina, membantu Hamas meraih dukungan mereka. Huda Neem, pekerja sosial dan salah satu dari enam calon perempuan Hamas yang terpilih dalam Pemilu Legislatif Palestina, mengatakan bahwa perempuan Palestina adalah pihak yang paling dekat dengan permasalahan masyarakat Palestina, inilah yang menyebabkan mereka mencari Hamas untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Pelayanan menjadi salah satu isu penting yang dibawa Hamas dalam masa kampanye. Kemampuan Hamas dalam melayani sudah diakui oleh masyarakat Palestina. Sejak tahun 1987, Hamas sudah terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, semisal menyediakan pelayanan medik dan kesehatan, pengasuhan anak, dan mendirikan taman kanak-kanak.¹⁸⁹

Jamila Shanti, Profesor Filsafat di *Islamic University* dan juga kandidat perempuan Hamas dengan urutan pertama, menjelaskan lebih lanjut prinsip

¹⁸⁸ *ibid*

¹⁸⁹ *ibid*

Skripsi

Hamis terhadap pemberdayaan perempuan. Dia menegaskan saat diwawancarai *the Guardian* bahwa Perempuan Hamas harus melawan diskriminasi.

“Our first job is to correct this because this is not Islam. We are going to show that women are not secondary, they are equal to men. Discrimination is not from Islam, it is from tradition. It may not be easy. Men may not agree”.¹⁹⁰

Dalam prosesi kampanye, para kader perempuan menjadi garda depan dalam menarik dukungan. Dukungan yang solid dari kader dan simpatisan perempuan adalah rahasia kemenangan Hamas. Alasannya, Hamas memiliki brigade kampanye yang terdiri dari ribuan sukarelawati, termasuk mahasiswi, yang mengetuk setiap rumah dan menjanjikan ibu rumahtangga kehidupan yang lebih baik di masa depan.¹⁹¹ Mereka membawa menyebarkan pesan Hamas, bahwa Islam melindungi perempuan, oleh karena itu wajar bila ada *equal partnership* antara perempuan dan pria dalam kehidupan kerja atau pun di dalam rumah tangga. Hamas juga menjanjikan *free education* untuk anak perempuan Palestina.

Selain mendatangi dari rumah sukarelawati Hamas tersebut juga mendekati mereka di berbagai tempat public yang biasanya diakses oleh mereka. Misalnya mereka mendekati sekaligus melakukan persuasi agar mereka memberikan suara kepada Hamas di Masjid dan kelompok-kelompok kajian ke-Islaman putri. “Kita memiliki banyak aktifitas, seperti mengunjungi mereka di rumahnya, memberikan penjelasan bagaimana cara memilih. Ide kita adalah apa yang mereka butuhkan,”kata Sahar as-Sharif, sukarewati Hamas lulusan

¹⁹⁰ *ibid*

¹⁹¹ http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-02/04/content_517078.htm, diakses 13 Juni 2006.

Universitas Islam Gaza.¹⁹² Menurut Nader Said, pengamat politik dari Universitas Bir Zeit Tepi Barat, Hamas adalah kontestan yang paling getol untuk meraih suara perempuan Palestina. Hal ini pun diakui oleh Fatah, Rabiha Diab, ahli hukum Fatah, partai kami tidak dapat sepenuhnya meraup suara perempuan Palestina, utamanya di desa yang nuansa religiusnya cukup kuat.¹⁹³

Hamas memiliki berbagai institusi sosial yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam pemilu Legislatif ini Hamas tidak menyalahgunakan berbagai potensi yang dia miliki. Seluruh kader yang dapat direkrut dari berbagai bentuk institusi tersebut mereka gerakkan untuk memenangkan pemilu, termasuk kader muda. Selain perempuan yang menjadi simpatisannya, Hamas juga menggerakkan anak-anak yang menjadi simpatisannya untuk membantu kampanye mereka. Mereka meminta anak-anak tersebut untuk menyebarkan brosur, menempelkan poster, dan memasang spanduk.

4.4.2 Hamas Memanfaatkan Masjid untuk Galang Dukungan

Dalam masa kampanye, Hamas menggunakan masjid untuk menggalang dukungan. Salah satu upaya Hamas tersebut direkam oleh *The Palestinian Center for Human Rights*. Dia melaporkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2006, puluhan imam masjid melalui khutbah Jumatnya meminta kepada para jamaahnya untuk memilih Hamas. Tidak semua jamaah bereaksi positif atas anjuran para imam tersebut. Pada masjid tertentu, yang sebagian jamaahnya menjadi

¹⁹² *ibid*

¹⁹³ Ketidakberdayaan ini tidak lepas dari posisi Fatah sebagai partai yang bersifat sekuler. Sekulerisme dalam pandangan Islam menjadi ancaman yang serius bagi eksistensinya. Karena sekularisme berusaha mematikan peran public agama Islam dengan mengkampanyekan bahwa agama adalah urusan pribadi dan Negara adalah urusan yang lain.

pendukung partai lain, sempat terjadi insiden. Salah satu insiden terjadi di Masjid Sousi yang terletak di *Shati refugee camp* kota Gaza. Penceramah mendapat ancaman dari seorang jamaah, bahkan mereka mencoba menurunkan sang imam dari mimbar. Insiden lainnya terjadi di Masjid yang berada di daerah Zahra yang juga masing termasuk wilayah kota Gaza. Beberapa jamaah melakukan protes dan salah seorang dari mereka melempar sang Imam dengan botol air mineral.¹⁹⁴

Protes tersebut layak untuk disampaikan karena Hamas telah melanggar artikel 64, pasal 2 Undang-Undang Pemilu Palestina No. 9 tahun 2005. pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

“Abstaining from organizing festivals and holding meetings in mosques, churches or near hospitals, buildings or premises used by government or public institutions.”

Hamas juga memakai masjid untuk menempatkan transmisi TV Al-Aqsa yang mengudara sejak 9 Januari 2006. Antena transmisi terletak di lantai tiga dari masjid Al-Bashir. Stasiun ini mengkampanyekan kandidat-kandidat Hamas. Atas pelanggaran tersebut Hamas menuai protes resmi dari PCHR yang menjadi pengamat independen dalam Pemilu. Protes itu dilakukan dengan mengirim nota protes atas nama Mr. Raji Sourani (*Director of the Palestinian Centre for Human Rights*). Hamas menjawab nota protes tersebut dengan sebuah surat resmi atas nama organisasi.

“With regards to Paragraph 2 in Article 64 in the Law 9 for the year 2005 on general elections, the law stated, “abstaining from holding election rallies and public meetings in mosques or churches...” It is an unambiguous legal text that cannot be misinterpreted. It limited the prohibition to holding campaign rallies and public meetings inside mosques. This was confirmed by

¹⁹⁴ <http://israelbehindtheneeds.com/pdf/week6.pdf>, diakses 13 Juni 2006

Mr. Ammar Duweik, the Executive Director of the Central Elections Committee.”

Untuk menyaingi sepak terjang Hamas tersebut, Fatah memanfaatkan birokrasi untuk melapangkan jalan menuju kemenangan. Salah satu Departemen yang menjadi alat kampanye Fatah adalah Departemen kepolisian. Dalam artikel 59 pasal 2 dan 3 Undang-Undang Palestina tentang Pemilu, No.9 tahun 2005 menggunakan birokrasi pemerintahan dan media resmi milik pemerintah dilarang dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Artikel tersebut selengkapnya berbunyi:

“Official media shall maintain an impartial position during all the phases of the elections process. Official media, or any of the bodies affiliated thereto, shall not perform any electoral or campaigning activity that might be construed as favoring one candidate over another.

The Executive Authority and all the bodies affiliated thereto shall maintain an impartial position during all of the phases of the election process and shall not perform any electoral or campaign activity that might be construed as favoring one candidate or electoral list over another.”

Terlihat Fatah kurang mengindahkan aturan tersebut.¹⁹⁵ Pada tanggal 14 Januari 2006, *The Fatah PLC Elections Committee* meminta partisipasi 100 kepala distrik yang loyal terhadapnya untuk hadir pada pawai yang bertajuk *“Commitment and Loyalty for Fatah Carnival”* yang digelar di kota Gaza pada tanggal 19 Januari 2006. Kenekatan Fatah tersebut wajar, karena mereka tidak memiliki tangan yang efektif sampai ke grassroad selain birokrasi. Berbeda dengan Hamas yang memiliki berbagai institusi sosial yang langsung bersentuhan

¹⁹⁵ CEC tidak sepenuhnya netral, karena sesuai dengan artikel 18 undang-undang no.9 tahun 2005 mengenai pemilu, lembaga ini hanya dapat dibentuk melalui keputusan Presiden. Dengan posisi tersebut, maka bias kepentingan sangat mudah terjadi. Kita tahu presiden Palestina berasal dari faksi Fatah.

dengan masyarakat Palestina.¹⁹⁶

Fatah juga melibatkan para memeterinya untuk berkampanye. *The Palestinian Ministry of Prisoners' Affairs* menjadi koordinator kampanye wilayah Fatah dan dia dibantu oleh *the deputy director of Abu Yousef al-Najjar Hospital Rafah*. Fatah juga membentuk tim-tim sukses di intitusi sipil dan keamanan (kepolisian) Palestina.¹⁹⁷

Pada tanggal 18 Januari 2006, PCHR (*Palestinian Centre for Human Rights*) melaporkan bahwa beberapa staf dari kementerian kesehatan mendistribusikan selimut dari gudang kementerian tersebut kepada staf yang bergaji rendah untuk menjamin bahwa mereka akan memilih partai tertentu (Fatah). Menurut surat yang dikirim oleh Dr. 'Abdul Rahman al-Barqawi, *director general of the ministry* yang ditujukan kepada *a senior official at the Ministry*, disebutkan tidak kurang dari 6350 selimut telah diambil dari gudang kementerian dan distribusikan kepada staf yang bergaji rendah. Al-Barqawi menyebut tindakan ini sebagai *irresponsible behavior* yang berdampak negative terhadap kepentingan public dan merusak *the fairness* Pemilu.¹⁹⁸

Menurut *article 73 of the Elections Law No. 9 of 2005*, Polisi memiliki hak untuk memilih. Mereka diberi waktu tiga hari sebelum hari pencoblosan. Oleh *Central Election Commission (CEC)* hari pencoblosan untuk aparat kepolisian ditetapkan pada tanggal 21,22, dan 23 Januari 2006, ebih dari 60.000 polisi yang memiliki hak pilih. Fatah sangat menginginkan suara seluruh kesatuan polisi diberikan padanya. Untuk memastikan seluruh dukungan polisi terarah padanya,

¹⁹⁶ www.pchrgaza.org, diakses 6 Desember 2006.

¹⁹⁷ *ibid*

¹⁹⁸ *ibid*

Fatah menggunakan berbagai cara termasuk pemaksaan. Hamas menyatakan bahwa para petinggi polisi memerintahkan semua bawahannya untuk memilih Fatah. Bahkan mereka mengeluarkan memorandum yang memperingatkan siapa saja yang tidak memilih Fatah akan ditembak. Hamas menyatakan bahwa seluruh kesatuan polisi dipaksa untuk memilih Fatah. Hamas membuat pernyataan yang kemudian di muat di Harian Al-Quds yang menyatakan bahwa polisi yang memilih Hamas ditahan dan diinterogasi. Setidaknya ada lima polisi yang ditahan dan diinterogasi selama lima jam.

Menjawab pernyataan Hamas tersebut, Fatah membalas dengan tuduhan yang tidak kalah kerasnya. Menteri Dalam Negeri Palestina, salah satu petinggi Fatah, mengatakan bahwa Hamas telah mengirim orang bersenjata di tempat pemungutan suara di mana polisi memberikan suaranya. Dia menandakan bahwa saksi dari Hamas yang hadir di tempat pemungutan suara membawa senjata api dan granat yang digunakan untuk mengintimidasi polisi.

Fatah juga mengguakan berbagai fasilitas yang dimiliki polisi untuk berkampanye. Pada tanggal 21 January 2006, PCHR mendokumentasikan sebuah kendaraan dinas kepolisian di tempeli oleh poster dan spanduk Fatah. Mereka juga melihat beberapa anggota kepolisian mengibarkan bendera Fatah saat berkampanye di jalanan.

Fasilitas Pemerintah lain yang digunakan oleh Fatah adalah Website *the Palestinian Ministry of Interior and National Security* (www.moi.gov.ps). Website tersebut mempublikasikan beberapa tokoh Fatah dan melakukan

kampanye negatif terhadap kontestan lainnya. Berikut beberapa informasi yang tertera dalam website tersebut:

1. Pada tanggal 14 Januari 2006, website memuat berita mengenai pidato yang dibawakan oleh Muhammad Dahlan, kandidat Fatah dari distrik Khan Yunis.
2. Pada tanggal 14 Januari 2006, website memuat berita mengenai rapat Komite Pemenangan Pemilu Fatah yang membahas bagaimana cara atau usaha untuk memenangkan Pemilu di wilayah Jalur Gaza Pada tanggal 15 Januari 2006, website melaporkan bahwa Fatah telah menyusun strategi pemengan untuk daerah Rafah.
3. Pada tanggal 15 January 2006, website memuat berita mengenai pernyataan Muhammad Dahlan, kandidat Fatah dari distrik Khan Yunis, dia menyatakan bahwa keikutsertaan oposisi pada pemilu kali ini membuktikan kredibilitas Fatah.
4. Pada tanggal 17 January 2006, website mempublikasikan pidato Hisham 'Abdul Raziq, Kandidat Fatah dari wilayah utara Gaza, ketika dia berpidato dalam temu massa yang dikoordinasi oleh Komite Pemenangan Pemilu.

Pelanggaran ini mendapat protes dari PCHR (*Palestinian Centre for Human Rights*). Akhirnya pihak terkait melakukan revisi terhadap isi website tersebut.¹⁹⁹

¹⁹⁹ ibid

4.5 Dukungan Eksternal Fatah: Mempengaruhi Hamas Menangkan Pemilu

Pemerintah Fatah mendapatkan bantuan yang signifikan dari pemerintah Israel dan Amerika Serikat. Bantuan tersebut diberikan kepada Fatah karena dalam pandangan mereka Fatah adalah satu-satunya faksi yang mudah di ajak kerjasama. Fatah dianggap Faksi yang paling moderat. Sebaliknya Hamas dipandang sebagai gerakan radikal yang sulit untuk diajak bernegosiasi. Bahkan Amerika Serikat Memasukkan Hamas sebagai salah satu organisasi teroris yang menjadi ancaman dunia. Amerika Serikat membantu Fatah dengan memberikan dana segar sebesar US\$ 2 juta untuk mendanai berbagai program kampanye Fatah. Dana tersebut merupakan bagian dari dana bantuan tahunan Amerika Serikat untuk Palestina yang jumlahnya sekitar US\$ 400 juta. Bantuan Amerika Serikat tersebut tersebar ke publik Palestina melalui Koran milik pemerintah dan media elektronik. Dana tersebut disalurkan melalui *U.S. Agency for International Development*. Salah satu program yang didanai dari bantuan tersebut adalah renovasi 110 apartemen di daerah Rafah dan 183 apartemen di Jabalya yang merupakan daerah paling sering mendapat serangan misil Israel.²⁰⁰ Padahal Undang-Undang Pemilu Palestina No.9 tahun 2005 artikel 100 pasal 1 melarang adanya bantuan eksternal. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

"It shall be prohibited for any electoral list or candidate running for the elections to obtain funds for his/her electoral campaign from any foreign or external non-Palestinian resources, directly or indirectly."

Karena mendapat bantuan dana tersebut, Fatah menjadi partai kontestan Pemilu Legislatif Palestina yang paling besar anggaran dana kampanyenya. Untuk

²⁰⁰ <http://israelbehindtheneeds.com/pdf/week6.pdf>, diakses 13 April 2006

dana kampanye *electoral list* (partai), Fatah mengeluarkan dana sebesar US\$ 970.873, jumlah dana tersebut cukup besar dibandingkan dana yang dikeluarkan Hamas yang menjadi rival terkuat, mereka hanya mengeluarkan dana US\$ 249.758. Jumlah Pengeluaran Hamas tersebut merupakan anggaran terendah dari seluruh partai yang mendapat kursi di Parlemen. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel berikut.

Tabel 6. Daftar Dana Kampanye Partai

Financial reports for electoral list			
NO.	Electoral List	Amount	
		USD	NIS
1	Change and Reform	249,758	
2	Fatah Movement	970,873	
3	Martyr Abu Ali Mustafa	225,46	
4	The Alternative	746,500	
5	Independent Palestine (Mustafa al-Barghouti and Independents)	675,272	
6	The Third Way	487,437	
7	Freedom and Social Justice	237,999	
8	Freedom and Independence	-	768,875
9	Martyr Abu al- Abbas	67,000	
10	The National Coalition for Justice and Democracy (Wa'ad)	138,576	
11	The Palestinian Justice	2,000	

Sumber:
<http://www.election/ps/pdf>, diakses 10
 Desember 2006.

Untuk kampanye distrik (perorangan) para kandidat Fatah terlihat paling royal dalam soal anggaran. Rata-rata anggaran dana mereka diatas US\$ 50.000 tiap kandidat. Sebaliknya calon lain dari seluruh peserta Pemilu tidak ada yang melampaui anggaran tersebut. Bahkan ada kandidat Fatah yang mengeluarkan dana di atas pagu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu sebesar US\$ 60.000. Mosa Abdu Sabha, kandidat dari Fatah untuk distrik Hebron, mengeluarkan dana kampanye tidak kurang dari US\$ 81.500. selengkapnya mengenai dana yang dikeluarkan oleh seluruh kandidat lihat lampiran 3.

Akibat menerima dana bantuan tersebut, Fatah menjadi sasaran empuk kampanye negatif dari kontestan lainnya. Salah satu serangan berasal dari Hasan Khreisheh, kandidat anggota parlemen dari partai *Independent*, dalam kampanyenya dia mengatakan:

"I am not talking about those NGOs that give services that were here before the occupation and continued during the occupation," he explains. "I am talking here about the 3,000 'storefronts' that opened at the behest of foreign governments. These organizations minimize the important causes, and broadcast the minor issues. Everyone is talking about early marriage, but no one is talking about [Israeli] settlements or the wall. They are driven by the interests of these foreign governments, and not by Palestinian interests."²⁰¹

Azmi Nibali, manajer kampanye partai golongan kiri *Freedom and Social Justice list*, mengatakan tidak seorangpun membantu kegiatan kampanye kelompok tertentu tanpa mengajukan sebuah konsesi dan bentuknya pastilah sangat jelas. Hal itu pasti dalam bentuk konsesi politik yang menguntungkan kepentingan Amerika.²⁰²

Hamis menyebut bantuan tersebut sebagai *an American bribe* kepada Fatah. Dengan kasus ini maka rakyat Palestina memiliki alasan lain untuk memilih *those whose hands are not tainted with American money*. Dalam sebuah orasinya, Nayif Rajub, kandidat Hamis dari sebelah selatan Tepi Barat., mengkritik bantuan terhadap Fatah tersebut dengan sebuah kalimat retorik. "*I want to ask the Palestinian people. Do you trust those who run their campaign with American grants and American assistance? Will you give your votes to those who work according to the American agenda?*"²⁰³

²⁰¹ <http://www.mideastweb.org/log/archives/00000430.htm>, diakses 10 desember 2006.

²⁰² <http://english.aljazeera.net>, diakses 16 Desember 2006.

²⁰³ *ibid*

Israel membantu Fatah dengan memberikan perlakuan istimewa. Israel mengizinkan Fatah untuk berkampanye di Yerusalem Timur dan melarang kontestan lain untuk melakukan kampanye. Tidak hanya sebatas pelarangan kampanye, Israel juga mencopot berbagai atribut peserta Pemilu kecuali milik Fatah. Yerusalem Timur memiliki arti cukup penting untuk meraih kemenangan. Apalagi dalam poling-poling sebelum pemilu, Perbedaan persentase dukungan antara Fatah dan Hamas tidak terlalu jauh. Perbedaannya hanya dalam kisaran 5% saja. Padahal jumlah pemilih yang terdaftar di Jerusalem Timur sekitar 123.000 orang atau 10% dari jumlah pemilih terdaftar.²⁰⁴

Israel juga memberkan ijin untuk mewawancarai Marwan Barghouti, tokoh muda Fatah yang dihukum lima kehidupan karena membunuh beberapa orang Israel di Tepi Barat. Tiga stasiun luar negeri diperbolehkan untuk masuk penjara dan mewawancarainya. Hasil wawancara tersebut disiarkan oleh Televisi Pemerintah dan disebarluaskan oleh Koran milik pemerintah. Dalam wawancara tersebut Marwan Barghouti meminta Hamas untuk bergabung dalam *a national unity government*. Barghouti menegaskan bahwa perpecahan di kalangan pejuang palestina sangat memalukan, karena efeknya dapat mengurangi kemampuan resistensi terhadap pendudukan Israel.²⁰⁵

Propaganda tersebut menjadi pukulan telak terhadap Fatah. Karena membuat citranya semakin menurun. Sebaliknya Hamas mendapat keuntungan dari adanya isu ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, citra dan isu partai menjadi alat penentu kemenangan. Karena akumulasi dukungan antara Fatah dan

²⁰⁴ op.cit. <http://israelbehindtheneeds.com/pdf/week6.pdf>

²⁰⁵ ibid.

Hamis menurut hasil survei tidak terpaut jauh, hanya sekitar 5%. Padahal persentase suara mengambang yang menentukan pilihan di detik-detik terakhir mencapai 22%. Dengan propaganda jangan memilih Partai yang tangannya terbelunggu oleh Amerika, Hamis seakan membuat demarkasi antara yang nasional dan tidak. Sebagai partai yang menyatakan dirinya sebagai partai yang nasionalis, Isu tersebut membuat Fatah mati kutu.



BAB V

KESIMPULAN

Fenomena keikutsertaan Hamas dalam Pemilu Legislatif 2006 terkait dengan pertimbangan strategis. Impian Hamas untuk mendirikan negara Islam Palestina harus dimulai dengan melakukan penataan pondasi. Keikutsertaan Hamas dalam Pemilu tidak lain untuk meneruskan pembangunan tersebut. Selama ini pondasi awal telah dia bangun dengan membentuk civil society yang cukup mapan.

Keputusan Hamas untuk ikut dalam Pemilu kali ini merupakan keputusan yang tepat. Ada beberapa alasan yang cukup kuat untuk mengambil langkah ini. Alasan pertama, Hamas belajar kepada Hizbullah dalam menyandingkan perlawanan dan perjuangan politik. Selama ini Hizbullah terkenal sebagai faksi Syiah di Libanon yang cukup disegani dalam kancah politik domestik Libanon dan perjuangan melawan Israel di daerah perbatasan. Alasan kedua, keputusan untuk mengikuti Pemilu juga didasari oleh menguatnya tekanan eksternal terhadap Hamas. Dalam wilayah domestik dia mendapat tekanan dari Pemerintah Fatah dan dari luar dia mendapat tekanan dari negara Israel. Hal ini tidak lepas dari sikap Barat yang menganggap Hamas sebagai salah satu gerakan teroris. Selanjutnya keputusan itu diambil atas dasar peningkatan popularitas Hamas di mata rakyat Panitia. Menurut berbagai penelitian, popularitas Hamas terus mengalami kenaikan sejak tahun 1995. Sehingga dapat disejajarkan dengan Fatah. Alasan terakhir adalah kemunduran popularitas faksi Fatah. Popularitas Fatah terus menurun

karena kebobrokan internalnya. Fatah terlibat berbagai kasus nepotisme dan korupsi.

Kunci strategi pemenangan Hamas adalah kekuatan kader dan citra partainya yang bersih. Hamas mengerahkan semua kadernya untuk melakukan kampanye termasuk kader muda dan perempuan. Bahkan kader perempuan menjadi garda depan dalam menarik dukungan konstituen. Mereka mendapat tugas partai untuk menarik dukungan dari ibu-ibu rumah tangga yang hanya memiliki sedikit akses terhadap dunia publik. Citranya sebagai konstetan yang bersih dia tegaskan dengan nama partainya, *Change and Reform*. Rumusan platform yang dibawa Hamas merupakan reflesi dari citranya di mata publik. Platform utamanya adalah membersihkan birokrasi Pemerintah Palestina dari korupsi dan nepotisme serta meneruskan resistensi.

Untuk mendulang pendukung Hamas menggunakan berbagai *resource* yang dimiliki. Berbagai institusi yang berada dibawah kendali Hamas menjadi perpanjangan tangan untuk menyentuh *grassroad*. Institusi utama Hamas untuk menarik dukungan adalah Masjid.

Dalam tahap kampanye Hamas melakukan berbagai kegiatan untuk menarik dukungan rakyat Palestina. Kegiatan kampanye yang dilakukan Hamas antara lain: 1) pemasangan atribut partai, 2) kampanye di Media massa dengan memasang iklan politik, 3) pawai dan orasi terbuka, 4) debat publik dengan kontestan lain untuk membahas platform partai, 5) memanfaatkan kharisma tokoh; Hamas memanfaatkan ketokohan Syaikh Ahmad Yasin, 6) *door to door campaign*; bentuk kampanye hanya dilakukan oleh Hamas.

Untuk memenangkan kursi dalam sistem distrik Hamas melakukan dua langkah. Langkah pertama adalah dengan memasang calon yang terkenal, *well educated*, dan terkenal bersih dari korupsi. Langkah kedua adalah dengan memasang sedikit jumlah jumlah calon di tiap distrik atau disesuaikan dengan prediksi jumlah dukungan di tiap distrik. Agar suara yang terkumpul dapat terfokus, sehingga kandidat Hamas secara individu mendapat dukungan yang besar.

Dalam Pemilu kali ini jumlah suara mengambang mencapai 22%. Jumlah suara itu membuka persaingan sengit antara Hamas versus Fatah. Dengan kondisi seperti itu, perang opini menjadi senjata utama untuk saling menyerang dan menggiring afiliasi. Dengan adanya perang opini, publik memiliki kesempatan untuk melakukan ricek terhadap kontestan dan pada akhirnya memutuskan ke mana dia berafiliasi. Hamas menyerang Fatah atas kasus-kasus korupsi yang telah menjadi rahasia umum. Serangan tersebut menjadi lebih tajam ketika tersebar kabar Fatah mendapat bantuan dari Israel dan Amerika Serikat. Sambil menyerang, Hamas mencitrakan dirinya sebagai kandidat yang bersih dari persoalan-persoalan diatas.

Kemenangan Hamas merupakan hasil dari perjuangan yang cukup lama; bukan bersifat instan. Kemenangan tersebut memiliki landasan historis yang panjang. Hamas telah membangun basis massa selama bertahun-tahun semenjak masih memakai wadah organisasi Ikhwanul Muslimin cabang Palestina. Dengan rentang waktu tersebut, Hamas telah mampu mencetak kader-kader yang memiliki kualifikasi tinggi. Selain melakukan pembentukan basis massa melalui rekrutmen,

Hamis juga membangun berbagai infrastruktur untuk mendekati, melayani, dan merangkul *grassroad*. Berbagai prasarana umum dibangun semisal rumah sakit, sekolah, dan masjid. Selain itu dia telah berpengalaman dalam berbagai pemilihan dalam lembaga profesi atau pun pemilihan senat mahasiswa.

Dengan kekuatan basis massa dan struktural yang kokoh tersebut, Hamas dapat menggerakkan massa dengan cepat dan efisien. Dibandingkan dengan pesaingnya Hamas hanya mengeluarkan dana kampanye yang relatif kecil.

Sehingga strategi kampanye dalam Pemilu hanya dibutuhkan untuk mengerakkan investasi yang selama ini sudah ditanam. Semacam menggugah memori yang sudah terekam di alam bawah sadar. Dengan partai *Change and Reform*, Hamas ingin menggugah memori rakyat bahwa dia telah mengabdikan dirinya tanpa pamrih bahkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Dengan dedikasi yang tinggi Hamas meyakinkan rakyat Palrstina bahwa dia yang paling siap untuk melakukan perubahan dan reformasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran awal dengan hasil penelitian memiliki bentuk yang hampir sama. Keterlibatan Hamas dalam Pemilu tidak lepas dari adanya *Political Opportunity Structure* akibat melemahnya kekuatan Fatah dan pengaruhnya di tengah rakyat Palestina. Perbedaan muncul saat penelitian ini menemukan bahwa ternyata ada sebab eksternal yang membuat Hamas terlibat dalam Pemilu, yaitu tekanan Barat dan Israel dan pengaruh Hizbullah.. Mengenai strategi, isu kampanye Hamas sepenuhnya memanfaatkan *Political Opportunity Structure* yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adam, Doug Mc, dkk. ed, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings* (New York: Cambridge University Press, 1999).

Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, (Yogyakarta: Qalam, 2004) terjemah.

Adrain, Charles F. dan David E. Apter, *Political Protest and Sosial Change: Analyzing Politics* (New York: New York University Perss, 1995).

Aribowo, *Sejarah, Pola, dan Format Gerakan Mahasiswa Indonesia: Studi tentang Gerakan Mahasiswa di Surabaya dan Yogyakarta* (Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1996).

Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006).

Bulmer dalam Marjorie Mayo, *Global Citizens: Sosial Movements and the Chalange of Globalization* (Toronto: Canadian Scholars' Press Inc, 2005).

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2001).

Esposito, John L. ed. , *Radical Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?* (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1997).

Hidajat, Imam, *Teori-teori Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Hunter, Shireen T. ed. , *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2001) terjemah.

Juergensmeyer, Mark, *Terror in The Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, (California: University of California Press, 2003). Revised Edition.

Kepel, Gilles, *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-agama Samawi di Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1977) terjemah.

Low, Angelica, *Penerapan The Art of War Sun Tzu dalam Strategi Politik*, (Jakarta: Inovasi, 2003).

Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994).

Mousalli, Ahmad S., *Islamic Fundamentalism: Myths and Realities*, (South Street Reading, UK: Ithaca Press, 1998).

Said, Edward dalam John L. Esposito, *Unholy War: Teror atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003) terjemah.

Siddiq, Mahfuds, *Pemikiran dan Manhaj Politik Ikhwanul Muslimin*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatua, 2002).

Sihombing, Frans Bona, *Ilmu Politik Internasional: Teori, Konsep dan Sistem* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1986) hlm 92-93, cet ke-2.

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

Media Massa:

Kompas, 9 Januari 2005.

Kompas, 24 Januari 2006.

Kompas, 10 Maret 1996.

Almuzzamil Yusuf, *Manajemen Kampanye Nasional dalam Majalah Saksi No.8 Tahun VI*, 18 Februari 2004

Jurnal:

Ehud Ya'ari, *'The Metamorphosis of Hamas,' 'The Jerusalem Report,'* January 14, 1993.

Haim Malka. *Forcing Choices: Testing the Transformation of HAMAS*. *The Washington Quarterly* 28:4 (Autum, 2005)

Website:

Aaron D. Pina, *Fatah and Hamas: the New Palestinian Factional Reality* dalam <http://fpc.state.gov/documents/organization/62834.pdf>, di akses 17 mei 2006.

Ali El Garbawi, *Pemilu Palestina di Persimpangan Jalan*, dalam <http://www.infopalestina.com/lihatberita.asp?id=7877>, diakses 16 April 2006

Chusnan Maghribi, *Pemilu Palestina, Fatah Vs Hamas*, dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/25/opi03.htm>

Chusnan Maghribi, *Pemilu Palestina, Fatah Vs Hamas* dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/25/opi03.htm>

<http://.voanews.com>, diakses 22 Februari 2006

http://electronicintifada.net/artman/uploads/buselect483_001.jpg, diakses 10 Desember 2006.

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_legislative_and_presidential_election%2C_1996, diakses 2 Mei 2006.

<http://english.aljazeera.net>, diakses 16 Desember 2006.

<http://english.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=18067>, diakses 6 Desember 2006.

<http://fpc.state.gov/documents/organization/62834.pdf>, diakses 17 April 2006.

<http://indonesian.irib.ir/POLITIK/2006/januari06/HAMAS.htm>, diakses 12 April 2006

<http://israelbehindthenews.com/pdf/week6.pdf>, diakses 13 Juni 2006

<http://israelbehindthenews.com/pdf/week6.pdf>, diakses 13 April 2006

<http://lawofnations.blogspot.com/2006/01/HAMAS-party-platform.html>, diakses 13 Juni 2006.

http://search.jawapos.com/index.php?act=detail_s&f_search=%20kampanye%20hamas&id=209464, diakses 2 Mei 2006.

http://search.jawapos.com/index.php?act=detail_s&f_search=otoritas%20palestina%20korupsi%20palestina&id=125100, diakses 17 april 2006.

<http://weekly.ahram.org.eg/2006/778/re2.htm>, diakses 10 Desember 2006

<http://weekly.ahram.org.eg/2006/778/re2.htm>, diakses 10 Desember 2006.

<http://www.Ynetnews.com/articles/0.7340.L-3302162.00.html>, diakses 12 Mei 2006.

http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2006/01/21/islamist_women_redraw_palestinian_debate_on_rights/?page=2, diakses 10 Desember 2006.

http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-02/04/content_517078.htm, diakses 10 Desember 2006.

http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-02/04/content_517078.htm, diakses 13 Juni 2006.

<http://www.fas.org/irp/crs/931014-HAMAS.htm>, diakses 22 Februari 2006.

<http://www.fas.org/irp/world/para/docs/880818.htm4.htm> hamas charter, diakses 17 April 2006

<http://www.freemuslims.org/news/article.php?article=1253>, diakses Desember 2006.

http://www.ict.org.il/inter_ter/orgdet.cfm?orgid=13, di akses 5 April 2006.

http://www.ict.org.il/inter_ter/orgdet.cfm?orgid=13, diakses 17 April 2006.

<http://www.ict.org.il/spotlight/det.cfm?id=510>, diakses 16 April 2006.

<http://www.indymedia.org.uk/en/2006/02/333275.html>, diakses 2 mei 2006.

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/03/ln/2553578.htm>, diakses 12 April 2006

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/04/ln/2558990.htm>, diakses 12 April 2006

<http://www.mideastweb.org/log/archives/00000430.htm>, diakses 10 Desember 2006.

<http://www.mideastweb.org/log/archives/00000430.htm>, diakses 10 desember 2006.

<http://www.opendemocracy.net/debates/article.jsp?id=2&debateId=97&articleId=3223>, diakses 10 Desember 2006.

<http://www.pogar.org/countries/elections.asp?cid=14>, diakses 2 Mei 2006.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu>, diakses 5 April 2006

<http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/01/26/brk.20060126-73019.id.html>, diakses 12 April 2006

Kim Bullimore, *Palestine: Women, the occupation and HAMAS*, dalam <http://www.greenleft.org.au/back/2006/659/659p14b.htm>, diakses 2 Mei 2006.

Tim Youngs, *Parliamentary Election and the Rise of HAMAS* dalam <http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2006/rp06-017.pdf>, diakses 17 April 2006.

www.pchrgaza.org, diakses 6 Desember 2006.

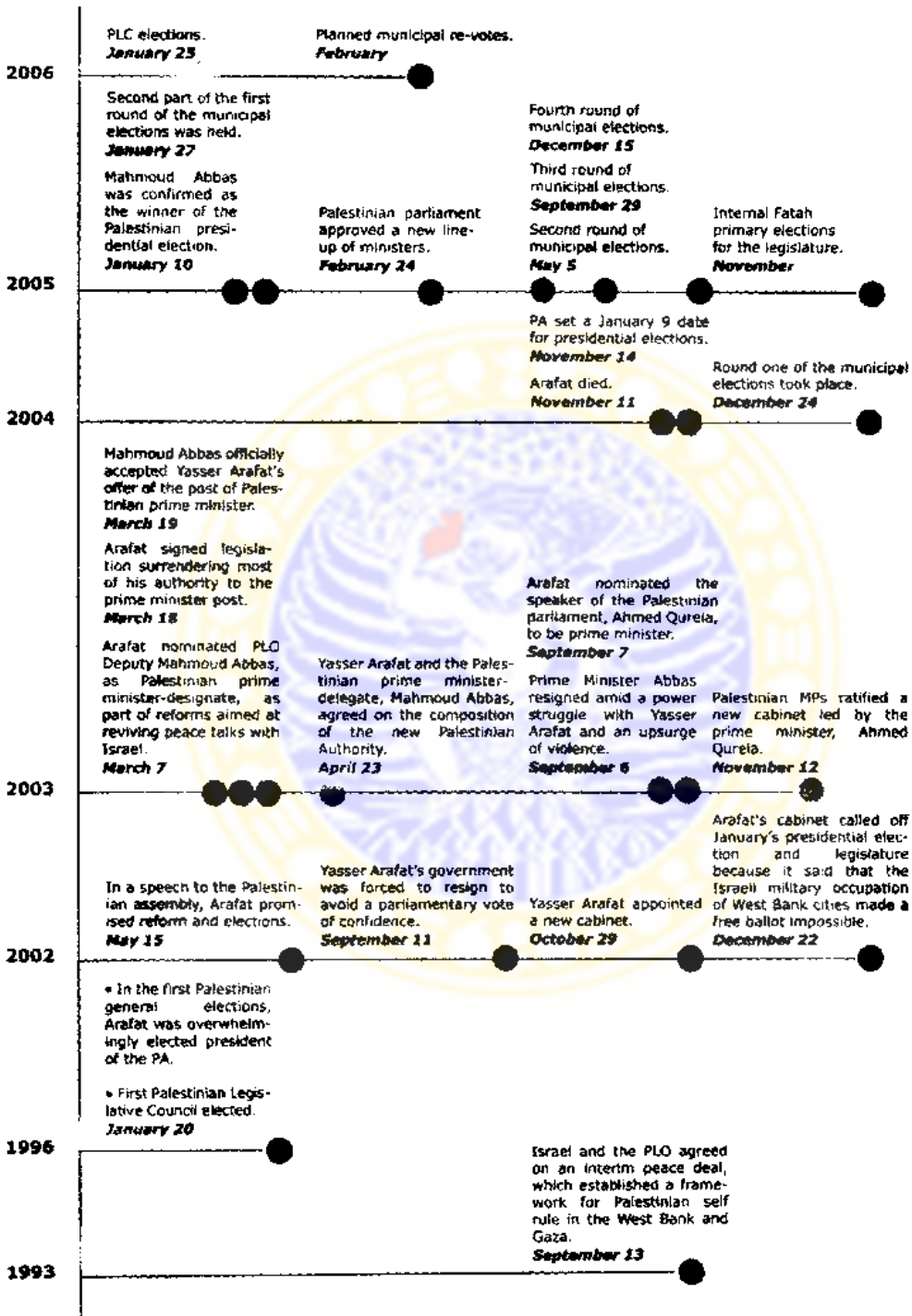
www.thefreedictionary.com/strategy, diakses, 2 mei 2006.



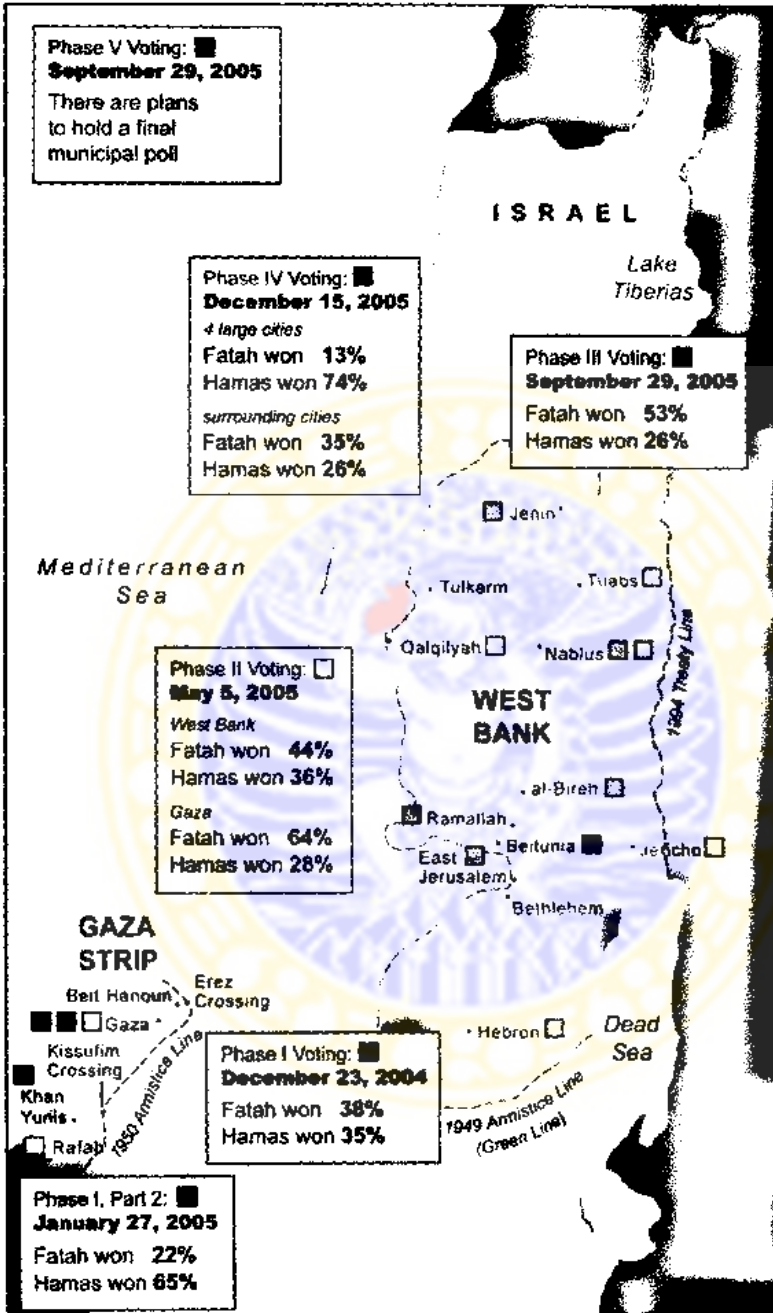


Lampiran-Lampiran

Appendix A: Palestinian Elections Timeline



Appendix B: Municipal Election Results

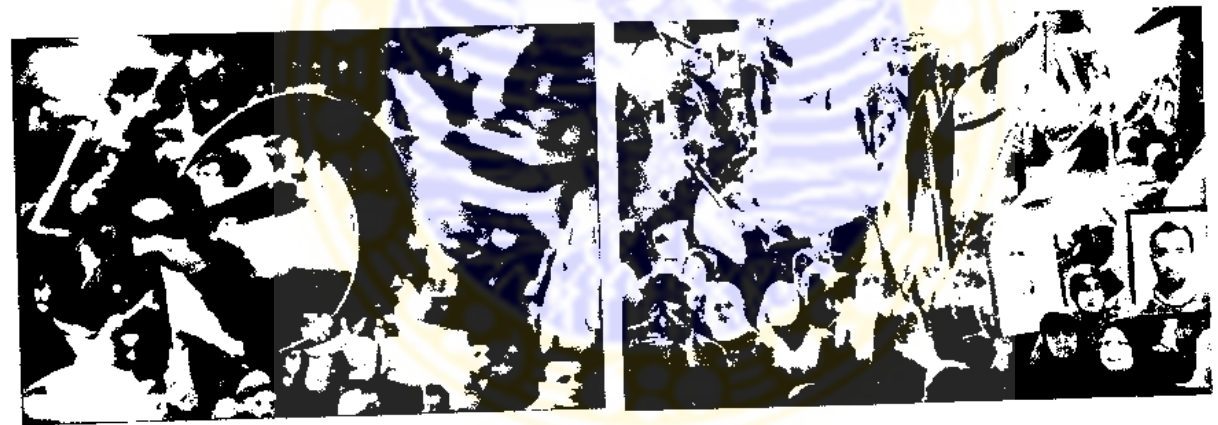


Source: Information provided by the Palestinian Central Elections Commission. Map Resources. Adapted by CRS. (K.Yancey 1/30/06).



Gambar 1. *A general view over Al Manara roundabout adorned with posters for the electoral campaign one day before the legislative elections, in the West Bank town of Ramallah January 24, 2006. (MAANnews/Charlotte de Bellabre)*

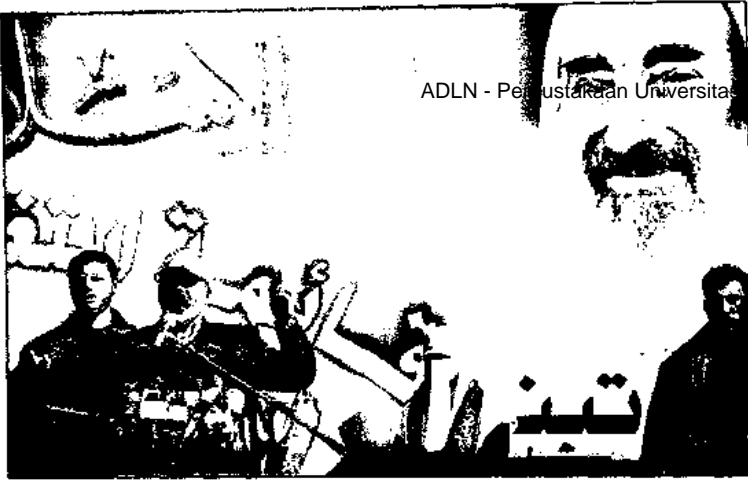
Sumber: http://electronicintifada.net/artman/uploads/buselect483_004.jpg, diakses 10 Desember 2006



Gambar 2. Foto pawai simpatisan HAMAS yang sedang melakukan pawai.

Sumber: http://electronicintifada.net/artman/uploads/buselect483_001.jpg, diakses 10 Desember 2006.

DOKUMENTASI KAMPANYE HAMAS DAN FATAH



Gambar 3.

Ismail Haniya gives a speech in the final campaign in front of HAMAS' public meeting.

http://electronicintifada.net/artman/uploads/buselect483_001.jpg, diakses 10 Desember 2006.



Gambar 4. Foto anak-anak simpatisan HAMAS yang sedang menyebar atribut partai.

Sumber: <http://electronicintifada.net/> diakses 10 Desember 2006

DOKUMENTASI KAMPANYE HAMAS DAN FATAH

Gambar 5. Foto Fasilitas Kepolisian yang digunakan Fatah untuk berkampanye
Sumber: www.pchrgaza.org, diakses 6 Desember 2006



Gambar 6. Foto Mending Ahmad Yasin dan Yaser Arafat dalam Poster Kontestan Pemilu.

Sumber: http://electronicintifada.net/artman/uploads/buselect483_007&8.jpg, diakses 10 Desember 2006



DOKUMENTASI KAMPANYE HAMAS DAN FATAH



List of elected PLC members according to their residency

Districts / lists	Political affiliation	Full Name	Address
Districts	Change and Reform	Ibrahim Sa'eed Hussein Abu Saleem	Jerusalem
Districts	Change and Reform	Mohammad Intan Saleh Touan	Jerusalem
Districts	Fatah Movement List	Emir Mousa Basil Jarjou'i	Jerusalem
Districts	Fatah Movement List	Iyivah Zakarya Abdullah Sabia	Jerusalem
Districts	Change and Reform	Wale' Mohammad Abde Fatah Abdel Rahman	Jerusalem
Districts	Change and Reform	Ahmad Mohammad Ahmad Attour	Jerusalem
Districts	Change and Reform	Khaled Abed Abdullah yahya	Jenin
Districts	Fatah Movement List	Azzam Najib Mustafa Al Ahmad	Jenin
Districts	Change and Reform	Khaled Suliman Fayez Abu Hasan	Jenin
Districts	Fatah Movement List	Shanty Yousif Mohammad Shanti	Jenin
Districts	Independent	Hasan Abdel Fatah Abdel Hama Khraishy	Tulkarem
Districts	Change and Reform	Abdel rahman Fahmi Abde rahman Zeidan	Tulkarem
Districts	Change and Reform	Riyad Mahmoud Saeed radad	Tulkarem
Districts	Change and Reform	Khaled Hamad Hamed Abu Tous	Tubas
Districts	Change and Reform	Ahmad Al Ahmad Ahmad	Nablus
Districts	Change and Reform	Hamed Suliman Jabir Khair	Nablus
Districts	Fatah Movement List	Mahmoud Othman Ragheb al-Aou	Nablus
Districts	Change and Reform	Riyad Ali Mustafa Amal	Nablus
Districts	Change and Reform	Husni Mohammad Ahmad Borini yassin	Nablus
Districts	Change and Reform	Daoud Kamal Daoud Abu Seer	Nablus
Districts	Fatah Movement List	Waleed Mahmoud Mohammad Assaf	Qaqliya
Districts	Fatah Movement List	Ahmad Haza' Ibrahim Sharam	Qaqliya
Districts	Change and Reform	Nassir Abdullah Odeh Abde Jawwad	Safit
Districts	Change and Reform	Hasan Youif Daoud Dar Khalil	Ramallah & Al-Bireh
Districts	Change and Reform	Fadi Mohammad Saieh Hamdan	Ramallah & Al-Bireh
Districts	Change and Reform	Ahmad Abdel Aziz Saieh Moharak	Ramallah & Al-Bireh
Districts	Change and Reform	Mahmoud Ibrahim Mahmoud Msteh	Ramallah & Al-Bireh
Districts	Fatah Movement List	Mahm Salama Abdulrah Saama	Ramallah & Al-Bireh



List of elected PLC members according to their residency

Districts / lists	Political affiliation	Full Name	Address
Districts	Fatah Movement List	Saleh Mohammad Sa'eed Orayqat	Jericho
Districts	Fatah Movement List	Fouad Kareem Saliba Kokali	Bethlehem
Districts	Fatah Movement List	Fayez Antoun Elias A. Saqqa	Bethlehem
Districts	Change and Reform	Khaled Ibrahim Tafesh Dwaib	Bethlehem
Districts	Change and Reform	Mahmoud Daoud Mahmoud a. Khteb	Bethlehem
Districts	Change and Reform	Naief Mahmoud Mohammad Al-Rjoub	Hebron
Districts	Change and Reform	Sameer Sa'eed Ibrahim Al-Qad	Hebron
Districts	Change and Reform	Azz Sa'eed Murtada Al-Dwaik	Hebron
Districts	Change and Reform	Azzam Ne'iman Abdel rahman Sa'hab	Hebron
Districts	Change and Reform	Mohammad Mutaq Abde Mahdi Abu Jhaisha	Hebron
Districts	Change and Reform	Nza Abdel Aziz Abdel hamid Ramadan	Hebron
Districts	Change and Reform	Hatim Rabah Rshaid Qafisha	Hebron
Districts	Change and Reform	Basim Ahmad Mousa Za'areer	Hebron
Districts	Change and Reform	Mohammad Ismael Othman Al-Tal	Hebron
Districts	Change and Reform	Yousif Awwad Yousif A. Shrafi	North Gaza
Districts	Change and Reform	Mosheer Omar Khams Al-Habal	North Gaza
Districts	Change and Reform	Mohammad Abdel Hadi Abdel rahman Shihab	North Gaza
Districts	Change and Reform	Ali Ibrahim Mohammad adwan	North Gaza
Districts	Change and Reform	Ismael Abdel Latif Mohammad Al-Ashqar	North Gaza
Districts	Change and Reform	Saeed Mohammad Sha'ban Syam	Gaza
Districts	Change and Reform	Ahmad Mohammad Attieh Bahar	Gaza
Districts	Change and Reform	Khal Ismael Ibrahim Al-Hayya	Gaza
Districts	Change and Reform	Mohammad Faraj Mahmoud Hussein al-Ghou	Gaza
Districts	Change and Reform	Jamal Ta'ab Mohammad Sa'eh	Gaza
Districts	Independent	Jamal Najj Shhada A. Khodary	Gaza
Districts	Independent	Zead Mahmoud Hussein Abu Amro	Gaza
Districts	Independent	Husam Fouad Kamal Yacoub Al-Taweel	Gaza
Districts	Change and Reform	Abdel Rahman Yousif Ahmad Al-Jamal	Deir Al-Balah



List of elected PLC members according to their residency

Districts / lists	Political affiliation	Full Name	Address
Lists	Change and Reform	Samira Abdullah Abdelrahman Al-Ayyaq	Hebron
Lists	Change and Reform	Khalil Mousa Khalil Rabo'i	Hebron
Lists	Change and Reform	Lamia Abdullah taha Al-Shanty	North Gaza
Lists	Martyr Abu Ali Mustafa List	Jamil Mohammad Ismael A - Majdarow	North Gaza
Lists	Change and Reform	Fathi Ahmad Mohammad Hammad	North Gaza
Lists	Fatah Movement List	Abdelhamid jom'a yousif Al-Aia	North Gaza
Lists	Fatah Movement List	Aladdin Mohammed Abed Raboh yaghy	Gaza
Lists	Fatah Movement List	Intisar Moustafa mahmoud A - Wazeer	Gaza
Lists	Fatah Movement List	Nabil A I Rasheed Sha'ath	Gaza
Lists	Fatah Movement List	Faysal Mohammad Ali Hasan Abu Shahla	Gaza
Lists	Change and Reform	Meryam Mohammad Yousif Farhat	Gaza
Lists	Change and Reform	Marwan Mohammad Ayesh Abu Ras	Gaza
Lists	Change and Reform	Jamal Ismael Hashim Skalk	Gaza
Lists	Change and Reform	Ahmed Youif Ahmad Abu halabiya	Gaza
Lists	Independent palestine Lists/ Mustafa A - Barghouthy and Independents	Rawya Rashad Sa'eed A - Shawwa	Gaza
Lists	Change and Reform	Ismael Abdel Salam Ahmad haniyeh	Gaza
Lists	Change and Reform	Mahmoud Khaled Al-Zahar Al-Zahar	Gaza
Lists	Change and Reform	Abdel Fatah hasan Abdel Rahman Dokkar	Deir Al-Balah
Lists	Change and Reform	Huda Nazeem Mohammad Al-Grinawy	Deir Al-Balah
Lists	Fatah Movement List	Ibrahim A I Ibrahim Al-Masdar	Deir Al-Balah
Lists	Fatah Movement List	Raja' Mahmoud Souleiman Baraka	Khan younis
Lists	Fatah Movement List	Najat Ahmad Ali Al-Astaf	Khan younis
Lists	Change and Reform	Yehya Abde Aziz Mohammad Al-Da'absa	Khan younis
Lists	Change and Reform	Sayyed Salem Al-Sayyed Abu Mosameh	Rafah
Lists	Fatah Movement List	Najma Mohammad Mohammad Issa A - Sheikh Ali	Rafah
Lists	Fatah Movement List	Majeed Mohammad Ahmad Abu Shama'a	Rafah



List of elected PLC members according to their residency

Districts / lists	Political affiliation	Full Name	Address
Lists	Change and Reform	Inad Mahmoud rajih Nofal	Qaqiya
Lists	Change and Reform	Omar Mahmoud Matar Matar	Sa'fi
Lists	Change and Reform	Meryam Mahmoud Hasan Saleh	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Change and Reform	Mahmoud Ahmad Abdelrahman Al-ramahi	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Martyr Abu Ali Mustafa List	Ahmad Sa'adat yousif Abdel Rasoul	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Martyr Abu Ali Mustafa List	Khalida Karlan Mohammad jarar	Ramallah & Al-Bireh
Lists	The Alternative (Coalition of the Democratic Front, The Peoples' Party, Fda, and Independents)	Qas Kamil Abdel Karim Khadir	Ramallah & Al-Bireh
Lists	The Alternative (Coalition of the Democratic Front, The Peoples' Party, Fda, and Independents)	Bassam Ahmad Omar Sa'idi	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Independent palestine Lists/ Mustafa A - Barghouthy and Independents	Mustafa Kamil Mustafa Al-Barghouthy	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Change and Reform List	Abdel jabir Mustafa Abdel jabir Fagaha	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Fatah Movement List	Marwan Hassen Hussein A - Barghouthy	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Fatah Movement List	Rabna diab Hussein hammad	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Fatah Movement List	Issa Ahmad Abde Hamid Qaraci	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Fatah Movement List	Lihad Mohammad Abdel Rahman Tmaia	Ramallah & Al-Bireh
Lists	Change and Reform	Al Sa'eed Saïman Romaneen	Jericho
Lists	Change and Reform	Anwar Mohammad Abdel Rahman Al-Zboun	Bethlehem
Lists	Fatah Movement List	Mohammad Khalil Khalil Al-Lahhani	Bethlehem
Lists	Fatah Movement List	Saher Fahad Daoud A - Qawasmi	Hebron
Lists	Fatah Movement List	Mohammad Ibrahim Mahmoud Abu Al	Hebron
Lists	Fatah Movement List	Akram Mohammad A I Al-Haymoura	Hebron
Lists	Change and Reform	Mohammad Jamal Nofian Omran Aladin	Hebron
Lists	Change and Reform	Mohammad Maher Yousif Mohammad Badr	Hebron



List of elected PLC members according to their residency

Districts / lists	Political affiliation	Full Name	Address
Districts	Fatah Movement List	Ahmad Hasan Awwad Abu Holy	Deir Al- Baian
Districts	Change and Reform	Salem Ahmad Abdel Hadi Sa'ama	Deir Al- Baian
Districts	Fatah Movement List	Mohammad Yousif Shakir Dahlan	Khan younis
Districts	Change and Reform	Younis Mohyi Addin Fayed A - Star	Khan younis
Districts	Change and Reform	Salah Mohammad Ibrahim Al- Bardawail	Khan younis
Districts	Change and Reform	Khanis Jawdat Khanis Al- Najjar	Khan younis
Districts	Fatah Movement List	Sufian Abdallah Yousef A - Agha	Khan younis
Districts	Fatah Movement List	Mohammad Sujeiman Mousa Hijazi	Rafah
Districts	Fatah Movement List	Ashraf Mustafa Mohammad Jom'a	Rafah
Districts	Fatah Movement List	Redwan Saeed sul eman A - Akhras	Rafah
Lists	Change and Reform	Mohammad Mahmoud Hasan Abu Fair	Jerusalem
Lists	The Third Way List	Hanan Dabud Khalil Ashrawy	Jerusalem
Lists	Fatah Movement List	Abdulrah Mohammad Ibrahim Abdallah	Jerusalem
Lists	Fatah Movement List	Jihad Awadallah Hamad Abu Zaid	Jerusalem
Lists	Fatah Movement List	Jamal Mustafa Issa Hwall	Jenin
Lists	Fatah Movement List	Jamal Mohammad Mahmoud Abu Al- Rob	Jenin
Lists	Change and Reform	Ibrahim Mohammad Saleh Dabbour	Jenin
Lists	Change and Reform	Fathi Mohammad Ali Qara'aw	Tulkarem
Lists	Fatah Movement List	Hakan Omar As'ad Bel'awi	Tulkarem
Lists	The Third Way List	Salam Khalid Abdallah fayyad	Tulkarem
Lists	Fatah Movement List	Siham Adel yusif Thabet	Tulkarem
Lists	Change and Reform	Ayman Hussein Amin Daraghma	Tubas
Lists	Change and Reform	Muna Saleem Saleh Mansour	Nablus
Lists	Change and Reform	Yasser Daoud Sujeiman Mansour	Nablus
Lists	Fatah Movement List	Nasser Jamil Mohammad Khalil	Nablus
Lists	Fatah Movement List	Abdel Rahim Mahmoud Abdel Rahim Borhani	Nablus
Lists	Fatah Movement List	Jamal Abdel hamid Mohammad Hajj	Nablus
Lists	Fatah Movement List	Najat Omar Sadiq Abu Bakr	Nablus

Part I
Definitions and General Provisions

Article (1)

Definitions

The following terms and expressions, mentioned in this law, shall have the meanings specified herein, unless specified otherwise:

The National Authority: The Palestinian National Authority.

The President: President of the National Authority.

The Council: The Palestinian Legislative Council.

President of the Council: President of the Palestinian Legislative Council (the speaker).

Election Commission: Central Elections Commission.

Voter: Every person who is eligible to elect the president and/or the members of the council.

Elector: Every voter who practices his/her right to elect.

Candidate: Every person whose candidacy for presidency and/or council membership has been officially accepted.

Preliminary Voters List: The list which includes the names and data of the voters that is prepared for exhibition and challenge.

Final Voters List: The final list includes the names and data of the voters who are eligible to vote and shall be published after the filing appeals period ends and adjudication thereof.

Final List of Candidates: The final list includes the names of the candidates nominated for the position of President or membership of the council at the level of the constituencies and the election list.

The Constituency Elections: The election of council members who shall be allocated seats in the constituencies

The Election List: The proportional election list considering the entire Palestinian territories as one single constituency.

Constituency: Each specified area for which quotas of council seats have been allocated according to the population of the constituency.

Polling Center: The location assigned by the Central Elections Commission within the constituency for the purpose of conducting polling therein.

Resident: A Palestinian who is residing and registered within the constituency, or whose working place is within the constituency and has the right to vote therein.

Place of Residence: The person's address as specified by any polling center.

The Court: The Election Appeals Court formed in accordance with the provisions of this law to consider electoral appeals.

Article (2)

Electing the President and the Members of the Council

Without prejudice to the provisions of the provisional Article (111) of this law, and with the exception of the first legislative elections that shall be conducted after the approval of this law only:

1. The President and the council members shall be elected simultaneously via secret balloting in general, free, direct elections.
2. The presidential office term shall be four years subject to re-election for only two consecutive terms.
3. The council shall be composed of (132) members.
4. The council shall serve for a four year term commencing from the election date thereof. Elections shall be held periodically every four years.

Article (3)

Electoral System and Allocation of Seats

1. The Palestinian electoral law shall be based on the mixed electoral system evenly (50%-50%) between the relative majority (multiple constituencies) and proportional representation (list system) considering the entire Palestinian territories as one electoral constituency.
2. The number of the council members shall be 132 and distributed as follows:
 - a. 66 members elected on the basis of relative majority (multiple constituencies) and distributed in the 16 constituencies according to the population of each constituency, and with no less than one seat for each constituency. Six seats shall be allocated for Christians selected from different constituencies defined by a presidential decree.
 - b. 66 members elected on the basis of proportional representation (lists) considering the entire Palestinian territories as one electoral constituency.
 - c. The electoral list shall be formed by a party or a coalition of parties or grouping of voters for the purpose of elections provided that the lists shall be in compliance with the requirements for candidacy as per the election law.

Article (4)

Women's Representation

Each electoral list nominated for the proportional elections (lists) shall include a minimum limit for the representation of women that is not less than one woman in:

1. The first three names in the list;
2. The next four names that follow;
3. Each five names that follow.

Article (5)

Proportional Allocation of Seats

1. Each electoral list that receives 2% or more of the valid votes on the basis of the proportional representation system shall be allocated a number of seats proportional to the total number of votes that the list receives.
2. Each electoral list shall provide the Central Elections Commission (CEC) with a list of its candidates before the candidacy deadline ends.
3. The list of electoral list candidates shall be closed in terms of the order of names, and the seats each list wins shall be distributed over the candidates in accordance with the order of names in the list, (the first, the second and so on).

Article (6)

Electoral Constituencies

1. The Palestinian territories shall be one constituency for the purpose of:
 - a. Electing the President of the Palestinian National Authority
 - b. Elections on the basis of the proportional representation system (lists).
2. For the purpose of electing the members of the legislative council in the constituencies on the basis of relative majority (multiple constituencies) the Palestinian territories shall be divided into sixteen electoral constituencies in the following manner:
 - a. Jerusalem

- b. Jericho
- c. Hebron
- d. Bethlehem
- e. Jenin
- f. Khan Younis
- g. Deir Al Balah
- h. Rafah
- i. Salfit
- j. North Gaza
- k. Tubas
- l. Tulkarem
- m. Qalqilyah
- n. Ramallah and Al Bireh
- o. City of Gaza
- p. Nablus

3. The CEC, in consultation with the Higher Council for Planning, shall issue an instrument that defines the boundaries of each electoral constituency and the population centers affiliated hitherto. The instrument shall be issued by the cabinet ministers.

Part II

The Right to Election and Nomination

Chapter One

The Electoral Right

Article (7)

The Call for Elections

The President shall, within at least three months prior to the expiry of the council's term in office, issue a decree calling for presidential and legislative elections throughout the Palestinian territories indicating the date thereof. The decree shall be published in the official gazette, in addition to publication in the daily press.

Article (8)

The Electoral Right

1. Every Palestinian in the West Bank and the Gaza Strip, including Holy Jerusalem, who meets the requirements in this law, shall enjoy the right to vote, regardless of religion, political affiliation, social or financial position.

2. Every voter shall exercise their electoral right in a free, secret, direct and individual manner. Voting by proxy shall not be permitted.

3. A voter shall not be registered in more than one constituency. A voter can only vote in the constituency in which he/she is registered.

Article (9)

The Electoral Eligibility

1. A person who fulfills the following requirements shall be deemed eligible to vote:

- a. To be Palestinian.
- b. To be at least 18 years of age on polling day.
- c. To be registered in the relevant constituency where he/she practices his/her electoral right.
- d. To be enlisted in the final voter register.
- e. Not to be deprived of the right to freely elect in accordance with Article (10) of this law.

2. For the purposes of this law, a person shall be considered Palestinian:

- a. If he/she was born in Palestine with borders defined in the British Mandate

era, or was entitled to acquire the Palestinian nationality under the application laws.

6

b. If he/she was born in the Gaza Strip or the West Bank, including Holy Jerusalem.

c. If one of his/her ancestors falls under the application of paragraph (1) above irrespective of where he/she was born.

d. If he/she is a spouse of a Palestinian as defined above.

e. If he/she has not acquired Israeli nationality.

Article (10)

Disfranchisement

1. An individual shall be deprived of the electoral right if he/she:

a. Was deprived of that right by virtue of a final judicial decision throughout the term of such a ruling.

b. Was declared incapacitated by a final judicial ruling.

c. Was convicted of high treason and not rehabilitated as per the provisions of law.

2. The CEC shall take appropriate measures and coordinate with the competent judicial bodies to apply the conditions outlined in paragraph (1) above.

Chapter Two

The Candidacy Right

General Principles

Article (11)

Candidacy and Holding of Public Services

1. The following categories of employees may not run as candidates for membership of the council or the position of the President unless they resign prior to the date set for the announcement of the final list of candidates. Their resignation shall be deemed acceptable from that date without prejudice with the right of any of the employees to apply when there is a vacancy in the department of the Authority or institutions from which they resigned. To be re-employed, they shall submit to the competition and selection conditions, like other competitors, in accordance with the provisions of the civil service law and the service law in the Palestinian Security Forces, or, the employment systems in the public authorities and institutions:

a. Ministers.

b. Palestinian National Authority employees (civil and military) and/or those who are paid a salary or monthly allowance by the state treasury or public funds affiliated thereto or under the supervision thereof.

c. Employees of public institutions and international organizations and heads of local authorities.

d. Chairpersons, directors and employees of NGOs.

2. The heads and members of local authorities and elected heads and members of other institutions and authorities may not run as candidates unless they resign. An individual shall not return to his/her position unless he/she has been re-elected at the end of the period in which he/she submitted his/her resignation, as per the provisions of the election law specified for those authorities and institutions.

3. The following person/s shall be excluded from the terms outlined in paragraph (1): the President who is applying for a new term of candidacy; persons who are council members in the term prior to the elections.

4. A candidate who is running for the presidential position or council membership shall attach to their candidacy applications a letter of resignation if they belong to any of the categories listed in paragraphs (1) and (2).

5. In accordance with the provisions of paragraph (1) judges, security and military personnel, police officers, governors and those who do not win the elections shall not resume their posts.

Section One

8

Presidential Candidacy

Article (12)

Eligibility for Candidacy

The candidate for the position of president must meet the following requirements:

1. To be Palestinian, a descendant of Palestinian parents.
2. To be at least 40 years of age on polling day.
3. To be a permanent resident in the Palestinian territories.
4. To be registered in the final voters list and meet the requirements for exercising the electoral right.

Article (13)

Deprivation of Candidacy

An individual shall be deprived of the right to become a presidential candidate when he/she:

1. Has been disfranchised.
2. Has been denied the right to candidacy by virtue of a final judicial ruling passed by a competent Palestinian court throughout the term of the ruling.
3. Has been convicted by a competent Palestinian court for a felony or misdemeanor against honor or honesty.

Article (14)

Application for Candidacy

1. The candidacy application for the position of the President shall be submitted to the CEC by any person registered in the final voters list and who meets the candidacy requirements stated in Article (12) above.
2. Each presidential candidate must submit with his/her candidacy application a list that includes the support in a written form of at least 5 000 voters and this does not apply to a candidate who has held the position of President in the term prior to the elections.

9

Section Two

Candidacy for Legislative Council Membership

Article (15)

Eligibility for Candidacy

The candidate for the legislative council membership must meet the following requirements:

1. To be Palestinian.
2. To be at least 28 years of age on polling day.
3. To be registered in the final voter register.
4. To be a permanent resident within the Palestinian territories.

Article (16)

Application for Candidacy

1. In the event of candidacy on the basis of constituency elections:
 - a. The candidate shall submit the candidacy application to the electoral district office by any person registered in the final voters list and who meets the candidacy requirements stated in Article (15).
 - b. Attached to the candidacy application shall be a list containing the names and signatures of at least five hundred voters who are eligible to vote, with the

exception of person/s who held council membership during the period preceding the running of the elections.

2. In the event of candidacy on the basis of (electoral lists):

a. The electoral list shall submit the candidacy application to the Central Elections Commission provided that the application is accompanied by a closed list that includes the candidates' names and confirmation of their acceptance of candidacy.

b. Attached to the application shall be a list containing the names and signatures of at least three thousand eligible voters, with the exception of accredited lists and parties duly accredited.

c. The number of electoral list candidates must not exceed the number of seats allocated to the proportional representation elections. The minimum number of candidates shall be seven.

d. The number of electoral list candidates in any of the given constituencies should not exceed the number of seats allocated to those constituencies.

10

3. The parties and electoral list candidates in the constituency elections shall be treated as independent candidates whereby the voting shall be for individuals and not for lists, and the voter shall select the name he/she desires to vote for from the different lists or independent candidates.

Article (17)

Candidacy Surety

1. Each candidate, whether independent or nominated on an electoral list, shall deposit into the account of the Central Elections Commission a guarantee of one thousand USD or equivalent in the officially circulated currency.

2. In the case of the electoral list system, six thousand USD or equivalent in the officially circulated currency shall be deposited as a guarantee into the account of the Central Elections Commission.

3. The guarantee shall be refunded to those individuals and lists who are elected regardless of the seats that the list wins.

4. The amounts deposited by candidates who lose the elections shall be referred to the fund of the Central Elections Commission.

Part III

Administration and Supervision of Elections

Chapter One

Election Committees

Section One

Central Elections Commission

Article (18)

Formation of the Central Elections Commission

1. The Central Elections Commission shall be formed by a presidential decree accompanying the call for the running of the elections in order to administer and supervise thereof. The Central Elections Commission shall be responsible for the preparation and organization of elections and shall take all required actions to ensure integrity and freedom thereof.

2. The Central Elections Commission shall appoint the appropriate administrative body to enable the commission to carry out its respective mandates and tasks as per this law. Such a body shall be formed from the:

a. Central Elections Office.

b. Electoral Districts Offices.

Article (19)

The Central Elections Commission

1. The Central Elections Commission is the supreme authority which shall undertake the management and supervision of elections and be responsible for their preparation and organization, as well as the adoption of procedures necessary to secure the integrity and freedom of elections.
2. The Central Elections Commission shall be composed of nine members to be selected from the Palestinian judiciary, outstanding academics and lawyers with professional experience. The duration of the term of office for members of the commission shall be four years from the date of the formation.
3. The Central Elections Commission members shall be appointed by virtue of a presidential decree.
4. The Central Elections Commission chairperson and secretary general shall be appointed by the President from among the nine members and by the same presidential decree.

Article (20)

Prerequisites of the Chairperson and Members of the Central Elections Commission

The chairperson or members chosen for the Central Elections Commission shall fulfill the following prerequisites:

1. To be Palestinian.
2. To be under 35 years of age.
3. To hold a bachelors degree, or at least the equivalent thereof.
4. To be highly efficient and experienced.
5. To be honest and well reputed.
6. He/she does not face a final judicial ruling in any election-related crime, case of treason, or felony affecting honor or trust.
7. He/she must not be an employee or member of any charity, society or civil organization.
8. He/she must not nominate himself in any of the general elections, or participate in any election campaign for any candidate throughout his term of office in the commission.
9. He must not reveal any confidential information in relation to the elections.

Article (21)

Vacancy of the Commissions Chairperson or Member post

In accordance with the provisions in Article (19) paragraph (3), if the position of the chairperson or member of the CEC becomes vacant due to resignation, death, illness or any other reason, the chairperson shall appoint a new member within a maximum of two weeks from when the position becomes vacant.

Article (22)

The Independence of the Central Elections Commission

1. The Central Elections Commission shall have the privilege of being a permanent body with corporate personality and administrative and financial independence.
2. The Central Elections Commission shall be allocated a budget as an independent financial center in the state's budget.
3. The Central Elections Commission shall publish an administrative and financial report on the activities of the Commission three months after the announcement of the final election results. A copy shall be submitted to the President and the council.

Article (23)

**The Tasks and Mandates of the
Central Elections Commission**

The tasks and mandates of the Central Elections Commission shall be as follows:

1. Implementing the provisions of this law in such a way that achieves its respective purposes.
2. Preparing the systems whose issuance is stipulated by the law and implementing the provisions thereof paving the way for approval by the council of ministers.
3. Adopting a code of ethics for the observers and the agents that identify the principles, conduct and methods they should follow while in the committees and the polling centers.
4. Adopting internal regulations to regulate the operations of the committee.
5. Appointing personnel and councilors in the central office and other offices in the various constituencies.
6. Undertaking all appropriate procedures necessary for the preparation of the elections and organizing the methods of supervision.
7. Supervising the constituency administrations, offices and the Central Elections Office, as well as monitoring the compliance thereof to the provisions of this law.
8. Appointing the members of the registration centers and the polling centers.
9. Approving the locations of the registration and polling centers upon recommendation of the constituency offices.
10. Registration of the electoral lists and the signs referred thereto and approving the logos of the electoral lists.
11. Approving the applications of candidacy for presidency and membership in the council, as well as preparing the final lists of candidates and publishing thereof in the local press.
12. Organizing media and public campaigns for the voters.
13. Deliberating on objections made with respect to the registrations of the voters, candidates, and electoral lists.
14. Issuing cards accrediting local and international observers, and co-operating therewith in all the stages of the process, including in the registration of the voters.
15. Approving the accreditation of the agents of the electoral lists and constituency candidates.
16. Re-conducting elections in any polling center in which it has been proven that violations have taken place, and where such violations could affect the results of the elections in any constituency.
17. Announcing the final results of the elections.
18. Exercising any other mandate stipulated by the provisions of this law.

Article (24)

Appeals Against the Central Elections Commission's Decisions

1. Every decision that is issued by the commission shall be liable to appeal before the court within two days from the date of the report on:
 - a. Approval or disapproval of the candidacy applications for the presidential or council membership posts.
 - b. Whether or not to conduct re-elections in any polling center.
 - c. Approval or disapproval of the registration requests submitted by any electoral list.
 - d. Approval of the logo of each electoral list.
2. The appeal shall be submitted to the court secretariat or through the initial court secretariat in each of the constituencies, and the court shall decide on the appeal within five days from the date of the submission thereof.
3. The appeal submitted as per this article shall be exempted of charges.

Article (25) Central Elections Office

The Central Elections Office shall be considered the executive instrument of the Central Elections Commission and work under its administration and supervision.

Section II

Electoral District Offices

Article (26)

Formation of the Electoral District Offices

1. The Central Elections Commission shall form the Electoral District Offices by a two thirds majority of its members in each of the relevant districts in accordance with the provisions of this law.
2. The Electoral District Offices shall be constituted of at least five members.
3. The Central Elections Commission shall set the prerequisites that the commission chairperson and members have to meet.
4. The Central Elections Commission, in its decision referred to in paragraph (1) above, shall appoint a chairperson and a secretary general for each district office.
5. If there is a vacancy for the membership in the district office, then vacant positions shall be filled in the same way that was detailed in the previous paragraphs.

Article (27)

The Tasks and Mandates of the Electoral District Offices

The Electoral District Offices hold the responsibility of administrating, organizing and monitoring the election process within the relevant districts. Their mandate includes:

1. Supervising the preparation of the preliminary and final voters list and submitting them to the CEC for approval and publication.
2. Receiving candidacy applications for the membership of the Palestinian Legislative Council (PLC) and submitting them to the Central Elections Commission on the same day as receiving them with all supporting documents.
3. Reviewing the minutes of election results issued by polling center committees and verifying their accuracy and compliance with the provisions of this law prior to the submission thereof to the Central Elections Commission.

Section Three

Polling Center Committees

Article (28)

Appointment of Polling Center Committee Members

1. The members of polling and registration center committees shall be appointed by virtue of a resolution by the Central Elections Commission based on recommendation by the Electoral District Office.
2. The polling and registration center committees are deemed the basic unit for the administration of elections.
3. Regulations issued by the Central Elections Commission shall determine the competences of polling and registration center committees.
4. The chairperson and members of the polling and registration center committees must hold a secondary school certificate and be no less than 25 years of age.

Chapter Two

The Election Cases Court

Article (29)

Formation of the Court

In accordance with the provisions of the law, the Election Cases Court shall be declared by virtue of a presidential decree. The court shall be comprised of a chief justice and eight judges upon the recommendation of the Supreme Judicial Council.

Article (30)

Convening of the Court

The court shall be duly convened of a president and two judges at least. The court may be duly convened in crucial cases with its full jury according to what the court president decides.

Article (31)

Court Seat

1. Arab Jerusalem shall be the permanent official seat of the Election Cases Court and shall have two seats in Ramallah and Gaza.
2. The court shall have two offices (in Gaza and the West Bank) for case registration and receipt of reviews.
3. The court president may decide to have the court convened in a place other than its official seat in order to make it easy for the litigants. Alternatively, the President may find it necessary to have the court convened at the place where the actual events occurred.

Article (32)

Trial Procedures

The trial may not be adjourned unless required by necessity to maintain the right of defense. Such an adjournment may not exceed twenty four hours.

Article (33)

Court Jurisdiction

1. The court shall have the competence of hearing appeals filed for cancellation or amendment of the decisions passed by the Central Elections Commission, or appeals which may be challenged according to this law before the Election Cases Court.
2. The court jurisdiction shall not cover the electoral crimes stipulated by this law which fall under the jurisdiction of the normal judiciary.

Article (34)

Schedule of Appeals Filing and Adjudication Thereof

1. Unless otherwise stipulated by the law, an appeal shall be submitted to the court within two days of notification of the appealed decision. The court shall not hear any appeal or challenge filed after the aforesaid period.
2. The court shall settle the challenges submitted thereto within a maximum period of five days from the date of submitting the challenges.
3. Challenges may be submitted to the court directly or through the Central Elections Office or the district offices.

Article (35)

Representation before Court

The court shall not accept any statement of appeal or challenge unless signed by a practicing lawyer.

The Central Elections Commission shall be represented before the court by one of its legal councilors, or any other practicing lawyer chosen by the commission.

Section Four

Registration of Voters

Article (36)

The Right to Register in the Voters List

1. Registration is a right for each Palestinian that fulfills the requirements of eligibility in accordance with the provisions of this law.
2. The Central Elections Commission shall register voters according to the provisions of this law.
3. Any person who desires to practice his/her electoral right and fulfills the requirements for voter eligibility may apply for enrolment in the preliminary voters list, and he/she shall register his/her name.
4. No voter shall be registered in another district's voters list other than that where he/she resides unless otherwise notified by a decree of the Central Elections Commission.
5. Registration of any person in the voters list shall not be possible unless he/she qualifies for voter eligibility. Registration shall be conducted in person, through an authorized proxy, or a first degree relative.
6. Any Palestinian who has lived for at least one year in the Palestinian Territories and is not registered in the final voters list may request, according to Article (9), to add his/her name to the list.

Article (37)

Regulation of Voters List

1. The Central Elections Commission shall update the preliminary voters list before every electoral process by auditing the list, registering new voters and declaring the register for challenge as per the provisions of this law.
2. The Central Elections Commission shall, through coordination with the Civil Status Department or the Central Statistics Bureau, prepare and audit the preliminary voters list in accordance with the law, provided that it includes the following data on each voter:
 - a. Full name.
 - b. Gender.
 - c. Date and place of birth.
 - d. Place of permanent residence.
 - e. Number of identification card or passport.
3. The process of organizing the preliminary voters list shall be conducted in public and open to the scrutiny of international and local observers, to journalists and representatives of the mass media.

Article (38)

Challenge on the Preliminary Voters List

1. Any person whose name has not been included in the preliminary voters list, or whose registration data is incorrectly recorded, may appeal to the polling and registration center committees for the inclusion of the person's name or correction of data pertaining thereto. Any person may object to the enrollment of another person who is not an eligible voter, or to the omission of the enrollment of an eligible voter.
2. Written appeals, with all the supporting documentation, shall be submitted within five days from the publication of the preliminary voters list.
3. If the appeal pertains to the enrollment or failure to enroll a person in the voters list, he/she should be informed in person or via proxy of that appeal so as to present a defense prior to making an appeal.
4. The polling and registration center committee shall decide on the appeal within

three days commencing from the date of the submission thereof. Its decision shall be subject to appeal before the electoral district office.

5. The decision of the electoral district office is subject to appeal before the Central Elections Commission.

6. The preliminary voters list shall be modified in light of the decisions made by the relevant electoral district office with respect to the filed appeals; in the case of appealing the decision, modification of the register shall be made upon the decisions of the Central Elections Commission.

Article (39)

Registration of Non-enrolled Voters in the Preliminary Voters List

1. Any eligible voter whose name is not registered in the preliminary voter register may, within the time limit specified for objection, apply to the relevant polling and registration center committee for enrollment to register his/her name provided that the application shall include, besides the information required by Article (37), paragraph (2) above, the following information:

- a. Acknowledgement that the submitted information is true and correct.
- b. The date of the submission of the application.
- c. The signature of the applicant.

3. Any of the official documents currently used in the Palestinian territories may be endorsed for the purpose of verifying the place of residence.

4. The polling and registration center committee, having verified the correctness of the information included in the application and mentioned in paragraph (1) above, shall enter the name of the applicant in the preliminary voters list.

Article (40)

Appealing the Electoral District Office Decisions

1. Any person having interest may appeal any decision made by the electoral district office before the Central Elections Commission within three days commencing from the date of notification of the decision.

2. The Central Elections Commission shall adjudicate on appeals within three days of their submission to the CEC. The commission's decisions shall be subject to appeal before the Election Cases Court.

Article (41)

Final Voters List

1. After the period specified to file appeals has expired and all appeals filed against the preliminary voters list have been finally adjudicated, subject lists shall be deemed final and voting shall take place accordingly.

2. Each district office shall publicize each relevant final voters list at the seat thereof and render it accessible to the public. It shall also send a copy to the Central Elections Commission.

Article (42)

General Voters Record

1. The Central Elections Commission shall prepare the general voters record based on the final voters lists submitted thereto by the district offices.

2. Each citizen shall have the right to view the general voter records and the Central Elections Commission shall facilitate the views of citizens thereof.

Part V

Nomination for the Presidency and Membership of the Council

Chapter One

Nomination for the Presidency

Article (43)

Registration of Candidates

1. Presidential candidates shall be registered at the Central Elections Commission.
2. The registration of candidates shall commence on the date specified in the presidential decree calling for elections and shall remain open for twelve days. No candidacy applications shall be accepted after the end of that term.
3. Every presidential candidate shall pay a deposit of three thousand USD or equivalent in the locally circulated currency as a guarantee to the account of the Central Elections Commission. In the case of the candidate's election, it shall be refunded.
4. No electoral list may nominate more than one candidate for the position of President.
5. Candidacy applications shall be submitted to the Central Elections Commission on official forms. The application shall include:
 - a. The full name of the candidate, his/her age, address, registration number in the voters list, and signature.
 - b. In the case of a candidature submitted by an electoral list, in addition to the provision of paragraph (a) above, the application shall bear the signature of the electoral list representative. The list that is registered at the Central Elections Commission and attached thereto shall be a copy of the registration certificate issued by the committee to that list.
6. The Central Elections Commission shall register the presidential candidates and provide them with a certificate of registration stating the date, time, and serial number of the registration.
7. The Central Elections Commission shall decide upon the acceptance of the application if it fulfils all the requirements stated herein. Applications that fail to comply with the candidacy requirements shall not be accepted. In the event of the rejection of any application, the Central Elections Commission shall present, in writing, detailed reasons for such a rejection.
8. An application shall be deemed acceptable if the Central Elections Commission does not communicate a decision of rejection to the applicant within three working days of submission thereof.

Article (44)

Appeals of Candidate Lists for the President's Post

1. Any presidential candidate whose application has been rejected by the Central Elections Commission, and any person who has objected to the nomination of any other candidate and whose objection has been rejected by the Central Elections Commission, may file an appeal against this decision before the Election Cases Court within three days of communicating the Central Elections Commission's decision thereto. The Election Cases Court shall decide upon the appeal within five days of the date of the filing thereof.
2. The decision of the Election Cases Court shall be communicated to the Central Elections Commission for implementation.

Article (45)

Publishing of Candidates' Names

1. The Central Elections Commission shall publish the list of candidates for the position of President twenty two days at most prior to the designated polling day. The list shall include the full names of candidates and the electoral lists each candidate is affiliated to or, alternatively, the term "independent" when the

**Submission of the Minutes to the
Central Elections Commission**

The chairperson of the electoral district office shall personally, upon the completion of all the procedures set forth in Article (90) herein, submit to the Central Elections Commission all minutes, papers, and election-related material together with a report of Committee procedures and the results reached thereby.

Section Three

**The Counting of Votes at the
Central Elections Commission**

Article (92)

The Final Counting Of Votes

1. Upon receiving all minutes, papers and materials attached thereto, and the reports made by the electoral district office, the Central Elections Commission shall assure the accuracy of the vote counting in the centers and constituencies, and shall declare the final results accordingly.
2. The final vote counting shall be conducted in public, within a time interval no greater than five days after polling day at the headquarters of the Central Elections Commission. No person/s except those specified in Article (88) paragraph (2)f herein shall be permitted to be present during the counting of votes.
3. The Central Elections Commission shall review all the reports of the district offices, and the decisions adopted in respect of the objections submitted by the candidates, agents and representatives thereof, and take note of all concerns.
4. Upon the discovery of any violation which could affect the results of the elections whether for the President's post, council membership, or allocation of the seats among the candidates in any constituency, the Central Elections Commission shall conduct new elections in the constituencies where such violations took place within a time interval of no greater than ten days from the date of completing the final counting. In such cases, re-election shall be confined to the polling centers where the violation/s occurred. The right to vote shall be confined to those registered in any of the aforementioned polling centers. Candidacy rights shall be restricted to the names registered in the final list of candidates.
5. Upon the completion of the procedures mentioned above, the Central Elections Commission shall immediately announce the final results of the elections.
6. The announcement of the final results of elections shall include the following:
 - a. The total number of voters registered in the final voters list.
 - b. The number of voters who cast their votes according to the voter registers.
 - c. The number of ballot papers collected in the ballot boxes.
 - d. The respective numbers of valid ballot papers for the election of the presidential position, members of council and the lists.
 - e. The respective numbers of invalid ballot papers for the election of the presidential position, members of the council and the lists.
 - f. The respective numbers of blank ballot papers for the election of the presidential position, members of the council and the lists.
 - g. The names of the presidential candidates and the number of votes obtained by each in a sequential, descending order.
 - h. The names of the council member candidates and the number of votes obtained by each in a sequential, descending order.
 - i. The electoral lists nominated for council membership and the votes obtained by each list in a sequential, descending order.
 - j. The date and time of the final counting of the votes.
 - k. The signatures of the chairperson and members of the Central Elections

Commission.

Article (93)

Challenges against the

The Central Elections Commission's decisions

1. Any electoral list, candidate, candidate agent or representative may appeal the decisions issued by the Central Elections Commission within two days from the announcement of the final results of the elections.
2. The election court shall adjudicate on the appeal within five days from the filing thereof, and immediately communicate the decisions taken by the court to the Central Elections Commission for enforcement.

Part IX

Announcement of the Final Results

Article (94)

The Elected President

1. The candidate who obtains the majority of actual votes shall be considered the president-elect.
2. The Central Elections Commission shall issue an official certificate to the candidate who has been elected as President.
3. The elected President shall commence his/her duties as President of the Palestinian National Authority one month after the announcement of the final election results by the Central Elections Commission and after taking an oath in accordance with the provisions of the basic law.

Article (95)

**The Members Elected for the Membership
of the Palestinian Legislative Council**

1. Candidates obtaining the greatest number votes in a constituency shall be allocated seats in that particular constituency.
2. In constituencies where seats are reserved for Christians, seats shall be allotted to those Christian candidates who obtain the greatest number of votes.
3. In cases of a tie between two or more candidates who gain the highest number of votes in a single constituency with one seat, or, in cases of a tie between two or more candidates who compete on the last seat in a single constituency with several seats, re-election of two or more candidates shall be held within ten days. The same arrangement shall apply to the seat/seats allotted to Christian Candidates.
4. The Central Elections Commission shall issue official certificates to the elected candidates.

Article (96)

Announcement of the Final Results

The final election results shall be published in the Palestinian Official Gazette. The daily newspaper and public shall have access to a detailed, tabulated form of the final results for the constituencies and electoral lists within two weeks of the election day.

Part X

**By-Elections for the position of President
and PLC membership**

Chapter one

By-Elections for the Position of President

Article (97)

Vacancy of the Position of President

1. The position of the President shall be considered vacant in cases of:
 - a. Death;
 - b. Resignation submitted to the Palestinian Legislative Council, which shall be

deemed valid two weeks after its submission to the council speaker.

c. Disqualification upon a verdict issued by the Supreme Constitutional Court and a two thirds approval from members of the Palestinian Legislative Council.

2. If the position of President becomes vacant for any of the reasons stated in paragraph (1), the speaker of the Palestinian Legislative Council shall assume the responsibilities of the Presidency provisionally for a period that does not exceed ninety days provided that free and direct elections to elect the President, in accordance with the provisions of this law, shall be organized within sixty days starting from the date the position became vacant. The provisional presidential term shall finish after the announcement of the final election results and immediately after the elected President takes a legal oath in accordance with the provisions of the basic law.

3. In the event that the speaker of the Palestinian Legislative Council wishes to run for the position of President, he shall convene a session immediately after the position of the President becomes vacant, and submit his resignation in order for a new speaker to be elected and execute the presidential duties provisionally.

4. In accordance with the provisional article (111) of this law:

a. If the term remaining of the presidency of the National Authority is more than one year, the new presidential term shall be the remaining of the term of presidency as specified and stipulated by the law.

b. If the term remaining of presidency of the National Authority is less than one year, the new presidential term shall be the remaining of the previous term and a new term of 4 years provided that the general council elections shall be on time to accompany the new presidency term and run for the same period.

Article (98)

Calling for Presidency Elections

1. The call for by-elections for the position of President shall be made by virtue of a presidential decree issued by the provisional president (speaker of the Palestinian Legislative Council).

2. By-elections for the presidential position shall take place within sixty days commencing from the date the position becomes vacant, in accordance with the provisions established by this law for the election of the President.

3. The final voter registers compiled in accordance with the provisions of this law shall be endorsed and used for the purpose of conducting the by-elections provided that the registers are updated and modified in the following cases: in the event of death, reaching the legal age of voting eligibility, candidature and changing a place of residence.

Chapter Two

By-elections for PLC Membership

Article (99)

Vacancy of Council Membership

1. The Palestinian Legislative Council shall issue a decision declaring the position of a member of the council vacant in the following cases:

a. Death;

b. Disqualification via a final legal verdict authenticated by a two-thirds majority of the council members.

2. Resignation of members shall be submitted to the speaker of the council and shall be effective two weeks from the date of presentation thereof.

3. If the period remaining for a member's term in the constituency is greater than one year, by-elections shall be held in accordance with the provisions of this law with

respect to the election of Palestinian Legislative Council members. However, if the term is less than one year, the seat shall remain vacant until the end of the term and election of a new council.

4. In the event that the council electoral list seat becomes vacant three months prior to the end of the council term, the vacant seat shall be occupied by the candidate who is next in line according to the order of the winning list of candidates.

Article (100)

Election Campaign Financing

Resources

1. It shall be prohibited for any electoral list or candidate running for the elections to obtain funds for his/her electoral campaign from any foreign or external non-Palestinian resources, directly or indirectly.

2. Every electoral list taking part in the elections and every successful candidate therein will submit to the Central Elections Commission, within a maximum period of thirty days from the date of announcement of the final election results, a detailed statement of his/her financing resources and the sums he/she spent on the electoral campaign.

Article (101)

Limits of Expenditure on the Election Campaign

It shall be prohibited for any electoral list or candidate to spend on his/her election campaign an amount greater than the following figures:

- a. One million USD or equivalent thereof in the currency officially circulated for expenditure on the election campaign for candidates running for the position of President and/or electoral list.
- b. Sixty thousand USD or equivalent thereof in the currency officially circulated for expenditure on the election campaign for the candidate running for the election of PLC membership in the constituency.

Part XI

Electoral Crimes and Punishment

Article (102)

1. The following actions shall be deemed a crime:

- a. Any person who assumes the personality or name of another for the purpose of voting in elections.
- b. Any person who uses his/her right to vote more than once.
- c. Any person, who illegitimately keeps, appropriates, hides, or destroys the election card of another person.
- d. Any person who pretends to be illiterate or unable to write.
- e. Any person who carries a firearm or any other tool which poses a danger to security and public safety in any polling or counting center on election day.
- f. Any person who influences the right of the voter to cast his/her ballot, or obstructs the election process in any form.
- g. Any person who tampers with any ballot box, voter register or paper required for voting, steals or destroys, fails to put a register or paper in the box, or undertakes any action that is intended to damage the integrity of electoral procedures and confidentiality thereof. Such offences are punishable by the maximum punishment as stipulated in this article.
- h. Any person who forces any voter by any means into disclosing the name/s of the candidates whom he/she voted for, or the content of the ballot paper according to which he/she voted.
- i. Any person who encourages or helps any other person to vote knowing that he/she is legally ineligible to vote.

j. Any person who commits any of the prohibited actions stipulated by Articles (63 and 64) of this law.

2. Any person who commits any action stipulated in paragraph (1), shall – upon indictment – be punished with one or both of the following penalties:

- a. Imprisonment for no less than six months.
- b. Payment of a fine that does not exceed one thousand USD or equivalent thereof in the officially circulated currency.

Article (103)

Bribery

1. Any person who commits any of the following actions shall be committing an offence:

- a. Any person who gives, lends, offers, or commits himself/herself to give, directly or indirectly, money or any other benefit to a voter in order to force him/her to vote in a specific manner, or to abstain from voting.
- b. Any person who accepts or asks, directly or indirectly, for money or a loan, or any other benefit, for himself or herself or for any other person, in order to vote in a specific manner, or to abstain from voting, or to influence any other person to vote in a specific manner, or to abstain from voting.

2. Any person who commits any action stipulated by paragraph (1) above, shall – upon indictment and confiscation of the items of bribery – be punished with one or both of the following penalties:

- a. Imprisonment for a period that does not exceed three years.
- b. Payment of a fine that does not exceed three thousand USD or equivalent thereof in the officially circulated currency.

3. The court may order the exclusion of the person's name from the list of candidates.

Article (104)

Electoral Materials

1. Any person who commits any of the following actions shall be committing an offence:

- a. Any person who moves, destroys, hides, or helps to move, destroy, or hide any electoral material described in this law, without being authorized to do so by the Central Elections Commission.
- b. Any person who prints, makes or prepares any electoral material described in this law without written authorization from the Central Elections Commission.

2. Any person who commits any action stipulated by paragraph (1) above, shall – upon indictment – be punished with one or both of the following penalties:

- a. Imprisonment for no longer than one year.
- b. Payment of a fine that does not exceed one thousand USD or equivalent thereof in the officially circulated currency.

Article (105)

Any person who violates any or both of the regulations of Articles (100 and 101) of this law shall be punished with imprisonment for a period no longer than six months, or a fine not more than one thousand USD, or equivalent thereof in the legally circulated currency, or with both penalties. The court shall have the right to remove his/her name from the list of candidates and confiscate his/her funds.

Article (106)

Ballot Papers and Electoral Minutes

1. Any person who commits any of the following actions shall be committing an offence:

- a. Any person who falsifies or introduces false information into the electoral protocol and in the voters' lists which this law requires to be organized.

- b. Any person who introduces or allows the introduction of ballot papers into a ballot box under the name of persons who have not voted or do not exist.
- c. Any person who intentionally includes false data in the nomination, application, declaration or date of registration or submission thereof.
- d. Any person who hides, destroys, or damages any bill of challenge or appeal filed by an electoral list or a candidate under the provisions of this law.
- e. Any person who hides, destroys, or damages any nomination application submitted by any list or candidate.

2. Any person who commits any action stipulated in paragraph (1), shall – upon indictment – be punished with one or both of the following penalties:

- a. Imprisonment for no longer than one year.
- b. Payment of a fine not more than one thousand USD or equivalent thereof in the legally circulated currency.

Article (107)

Other Crimes

Any act, omission, refrain, failure, or neglect of any duty promulgated by this law and for which there is no specified penalty, shall be considered a crime punishable with a penalty of imprisonment for a period no longer than 3 months, or a fine of not more than 500 USD or the equivalent thereof in the legally circulated currency or, with both penalties.

Article (108)

Members and Staff of the Election Committees

If the person who commits any of the crimes defined in this part of the law is the chairperson, member of any election committee, employee of the administrative body of the committee, or any other person charged with misconduct of his/her official functions under the provisions of this law, he/she shall be punished – upon indictment – with the penalty of imprisonment for a period no longer than three years, or a fine of not more than three thousand USD or equivalent thereof in the legally circulated currency, or with both penalties.

Article (109)

Proportional Allocation of Seats

Amongst Lists

In the list based elections, seats are distributed in accordance with the number of votes obtained by each list. The allocation is distributed as per the Sainte-Laguë method, in the following manner:

- 1. The number of votes obtained by each list is divided by 1, 3, 5, 7, 9, et seq. for the allocation of seats.
- 2. The numbers resulting from these series of divisions shall be the “quotients.” The maximum number of quotients for one list is the number of candidates on the list.
- 3. The quotients shall be arranged in order from the highest quotient to the lowest.
- 4. Seats shall be distributed in order to the highest quotient until all the seats have been distributed.

Part XII

Closing and Interim Provisions

Article (110)

Opening of the Ordinary Session of the PLC

The President of the Palestinian National Authority shall inaugurate the ordinary session of the Palestinian Legislative Council and deliver its opening statement.

Article (111)

The next Presidential Elections

The new presidential elections shall be conducted by the end of the legislative term of the first elected Palestinian Legislative Council after the enforcement of the provisions of this

amended law and in accordance thereof.

Article (112)

Elections in Jerusalem

1. The Palestinian voter registers shall be created in Jerusalem, in accordance with the provisions of this law. The Central Elections Commission is entitled to follow any of the appropriate instruments to guarantee Jerusalem voters their voting rights.
2. Any candidate who wishes to run for election in the constituency of Jerusalem shall have a valid address within the constituency of Jerusalem.
3. Elections in Jerusalem shall take place in accordance with the provisions of this law and regulations, instructions and procedures set forth by the Central Elections Commission.
4. Without prejudice of the above, provisions of the present law shall apply to the elections that run in Jerusalem just as they apply to any other constituency.

Article (113)

Monitoring and Covering Elections

1. All phases of the electoral process defined by this law shall be public and transparent in a manner that enables observers to monitor the different stages of these processes, and give the local and international press and mass media representatives the opportunity to cover the elections.
2. Local and international observers, local and international press and media representatives shall be accredited by the Central Elections Commission. The Central Elections Commission shall issue an accreditation card for anyone whom so requests.
3. Persons and institutions assigned with the enforcement of this law, as well as Palestinian security personnel, shall render available all facilities for anyone who carries an accreditation card in accordance with paragraph (2) above.

Article (114)

Notifications

Every decision, order, document or notification which is required under the provisions of this law for any person concerned shall be considered valid and legal if:

- a. It is received by the person concerned by hand,
- b. It is received 48 hours after its posting by registered mail to the person's known address.

Article (115)

Issuing of Regulations

1. The Central Elections Commission shall draft the regulations necessary for the implementation of the provisions of this law.
2. The aforementioned regulations shall be issued by a decision of the ministerial cabinet and shall enter into force after their publication in the official gazette.

Article (116)

The Elections Law No. (13) of 1995 and its amendments shall be revoked as well as any other provision which may contradict the provisions of this law.

Article (117)

Implementation and enforcement of this law

All competent authorities, each within its jurisdiction, shall execute the provisions of this law, and the law shall come into force three months after the publication in the official gazette.

Issued in the city of Gaza Date: 13/08/2005 AD

Corresponding: 8th of Rajab, 1425 H

Mr. Mahmoud Abbas Chairperson of the Palestinian Liberation Organization & President of the Palestinian National Authority